

# LAPORAN PENELITIAN

## **Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal**

(Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan  
Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul untuk  
Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata)



Oleh :  
**Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
JANUARI 2014**

# LAPORAN PENELITIAN

## **Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal**

(Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan  
Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul untuk  
Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata)



Oleh :  
**Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
JANUARI 2014**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN INTERNAL PERORANGAN**  
(Berdasarkan SK Rektor Nomor 101/HP/Per.Pen/2012)

1	Judul Proposal Penelitian	<b>Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal</b> (Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul untuk Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata)	
2	Kata Kunci (Inggris)	Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Pesisir, Kearifan Lokal	
3	Jenis Kegiatan	Penelitian Lapangan	
4	Nama Ketua Peneliti	Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si	
	Pangkat/Golongan	Pembina/IV a	
	NPP/NIDN	07.90.315/ 0509066601	
	Jabatan	Lektor	
	Unit/Fakultas/Jurusan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Sosiologi	
	Alamat	Jln. Babarsari no 6 Yogyakarta, 55281	
	No. Telp/Faks	(0274) 487711	
	Email	<a href="mailto:Yuningtyas_06@yahoo.com">Yuningtyas_06@yahoo.com</a>	
5	Lokasi Penelitian	Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY	
6	Jarak dari Kampus UAJY	60 (Km)	1,5 (Jam)
7	Waktu Pelaksanaan	Periode: 6 bulan	Waktu Efektif: (Jam)
8	Berbebani SKS	Ketua: (sks)	Anggota: (sks)
9	Sesuai dengan rencana unit	Judul penelitian ini sesuai dengan pengembangan unit, karena berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dalam rangka menciptakan sustainable development	
10	Sesuai dengan track record pengusul	Bidang peminatan pengusul adalah Sosiologi Gender dan Sosiologi Pembangunan, judul penelitian ini dipilih untuk mengembangkan Sosiologi Bisnis pada umumnya dan Sosiologi Pembangunan pada khususnya	
11	Sesuai dengan agenda kegiatan pribadi pengusul	Penelitian ini dilakukan pengusul dalam rangka untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir dan pengembangan daerah wisata pantai	
12	Dana yang diusulkan	Dana UAJY	Dana Pribadi Peneliti
		Rp. 7.500.000,-	Rp. 2.080.000,-
	Jumlah Total	Rp. 9.580.000,-	
	Terbilang	Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah	

Yogyakarta, 2 Januari 2014

Mengetahui dan Menyetujui  
Dekan

Pengusul:

Dr. Lukas S. Ispandriarno, MA  
NPP: 09.81.065/NIDN:0530125501

Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si  
NPP: 07.90.315/NIDN: 0509066601

Mengetahui dan Menyetujui  
Ketua LPPM

Dr. Ir. Y. Djarot Purbadi, MT  
NPP: 08.87.217/NIDN: 0516065701

# KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudul "**Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal** (Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul untuk Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata)", dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir berdasarkan kearifan lokal di Kawasan Pantai Kuwaru dan Pandansimo yang mendukung pada pengembangan Sektor Pariwisata.

Oleh karena itu, semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak, terutama bagi para pembaca dan peneliti yang menekuni kajian pemberdayaan masyarakat pesisir; dan tak terkecuali juga bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal, regional maupun nasional sebagai bahan yang dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang berorientasi pada nilai lokal dan kebutuhan masyarakat desa di sekitar pesisir.

Sehubungan dengan proses penyelesaian penelitian ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Rektor dan segenap Wakil Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengalokasikan dana penelitian dan memberi kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Dekan dan para Wakil Dekan FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang senantiasa memberi dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.
3. Rekan-rekan dosen dan karyawan di lingkungan FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
4. Para tenaga lapangan yang dengan kegigihan dan semangatnya untuk membantu peneliti dalam pencarian data di lapangan.
5. Pimpinan dan perangkat Pemda Kabupaten Bantul, Bapak Camat, Kepala Desa beserta staf, dan Bapak Dukuh di lokasi penelitian yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan juga banyak membantu dalam pengadaan data sekunder, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
6. Para informan dan responden yang telah sudi meluangkan waktu dan pikirannya, sehingga banyak memberikan informasi serta data yang sangat berguna bagi analisis penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak pula membantu sehingga terselesaikannya penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila ada saran dan kritik dari para pembaca yang bertujuan untuk memperbaiki tulisan ini, penulis akan menerima dengan senang hati demi penyempurnaan laporan penelitian.

Akhirnya ucapan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esalah penulis panjatkan, sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar dan tepat pada waktu. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir yang memanfaatkan kearifan lokal dan diarahkan dapat mendukung pengembangan wisata pantai yang sedang digalakkan.

Yogyakarta,      Januari 2014

Penulis

# ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi dan sumber perekonomian pesisir, mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan perekonomian pesisir, mengidentifikasi potensi kearifan lokal dan membuat rumusan strategis untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Adapun masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir berdasarkan kearifan lokal di Kawasan Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul yang mendukung pengembangan Sektor Pariwisata?

Lokasi penelitian di Pantai Baru Pandansimo (Dusun Ngentak) dan Pantai Kuwaru (Dusun Kuwaru), Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. Penelitian ini mengkombinasikan sejumlah metode, seperti *desk-study* dan *field-study* dengan menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang dijaring melalui kuesioner dan wawancara tak berstruktur. Sementara itu teknik analisis data dilakukan dengan "*frequency distribution*" atau persentase dan dengan menggunakan pendekatan *dialogical interpretation*, yaitu mendialogkan pemahaman *emic* dan *etic* untuk memperoleh *comprehensive understanding*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Program pemberdayaan masyarakat PEMP memiliki manfaat bagi masyarakat setempat. Responden lebih dari 60,00% setuju bahwa program PEMP adalah mempunyai manfaat bagi masyarakat setempat. Manfaat tersebut adalah : terjadi diversifikasi usaha ekonomi masyarakat pesisir, tingkat pendapatan masyarakat meningkat dan masyarakat memperoleh tempat pengembangan diri. Program PEMP di lokasi penelitian memiliki kelemahan, yakni : belum adanya infrastruktur ekonomi yang memadai, dinyatakan oleh 86,25% responden di Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru 80,00%. Responden yang menyatakan terdapat banyak kelemahan dari program PEMP untuk Pantai Pandansimo 16,25% dan Pantai Kuwaru 13,33%. Kelemahan lainnya tentang program kurang aksesibel di Pantai Baru Pandansimo 35,00% dan Pantai Kuwaru 30,00%. Program PEMP dirasakan berjalan dengan baik karena dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal, yaitu dengan menggunakan lembaga lokal dan budaya yang berkembang pada masyarakat setempat. Diantaranya memanfaatkan PKK sebagai kelembagaan sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (60,00%) responden di Pantai Baru Pandansimo dan 70,00% di Pantai Kuwaru. Penelitian ini juga menemukan lebih dari 80,00% di Pantai Pandansimo maupun Pantai Kuwaru menyatakan bahwa gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal yang mampu membantu sebagai nilai-nilai pemberdayaan perekonomian pada masyarakat pesisir.

Terdapat partisipasi masyarakat yang cukup baik di lokasi penelitian, partisipasi tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja tetapi juga kaum laki-laki. Lebih dari 90,00% perempuan di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru mau ikut tergabung dalam pokmas serta bersemangat mengikuti pemberdayaan dan mereka aktif dalam pokmas untuk pengembangan perekonomian di daerah mereka. Sedangkan partisipasi laki-laki di Pantai Pandansimo dalam aktivitasnya dalam pokmas ada 97,50% dan aktivitas laki-laki sangat besar memberikan kontribusi pada pengembangan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat pesisir masih bersifat *top down*, ditunjukkan keterlibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan program PEMP. Program PEMP menggunakan sumber daya lokal yang terdiri dari : a. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) setempat, b. Menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan c. Memanfaatkan lembaga lokal, seperti : koperasi, arisan dan lembaga lokal yang lainnya. Pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian dalam program PEMP masih berbasis pada gender.

**Kata Kunci** : *Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian, Masyarakat Pesisir dan Kearifan Lokal*

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Wilayah Pesisir .....	9
2.2. Potensi Sumber Daya Pesisir .....	10
2.3. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir .....	12
2.4. Konsep Pemberdayaan .....	14
2.5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) .....	15
2.6. Pendekatan Pemberdayaan .....	17
2.7. Makna Kearifan Lokal .....	20
2.8. Ruang Lingkup Kearifan Lokal .....	21
2.9. Kearifan Lokal/Tradisional .....	24
2.10. Sumber Daya Masyarakat dalam Pemberdayaan untuk Manajemen Komoditas Kearifan Lokal .....	26
2.11. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pendidikan Non Formal Untuk Pengembangan Ekonomi Produktif .....	27
2.12. Tinjauan Umum Karakteristik Sosial dan Sistem Pengetahuan Masyarakat Pesisir .....	30
<b>BAB III MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
3.1. Masalah .....	32
3.2. Tujuan Penelitian .....	32
3.3. Manfaat Penelitian .....	33

<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
4.1. Pendekatan Penelitian .....	34
4.2. Validitas Data .....	35
4.3. Responden dan Nara Sumber .....	35
4.4. Analisis Data .....	36
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Deskripsi Daerah Penelitian .....	37
5.1.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bantul .....	37
5.1.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	37
5.1.1.1.1. Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis .....	37
5.1.1.1.2. Topografi .....	39
5.1.1.1.3. Geologi .....	40
5.1.1.1.4. Hidrologi .....	41
5.1.1.1.5. Klimatologi .....	42
5.1.1.1.6. Penggunaan Lahan .....	43
5.1.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah .....	44
5.1.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana .....	45
5.1.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	48
5.1.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	48
5.1.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	48
5.1.1.2.1.2. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita .....	50
5.1.1.2.1.3. Laju inflasi .....	50
5.1.1.2.1.4. Koefisien Gini .....	51
5.1.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	52
5.1.1.2.2.1. Angka Melek Huruf .....	52
5.1.1.2.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM) .....	52
5.1.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	53
5.1.1.2.2.4. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu .....	54
5.1.1.2.2.5. Angka usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	55
5.1.1.2.2.6. Persentase Balita Gizi Buruk .....	55
5.1.1.2.2.7. Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan dan Prosentase kemis- Kinan .....	56
5.1.1.2.2.8. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja) .....	57
5.1.1.2.2.9. Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang Tertangani) .....	58

5.1.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga .....	59
5.1.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	62
5.1.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .....	72
5.1.1.3.1.1. Pendidikan .....	72
5.1.1.3.1.2. Kesehatan .....	73
5.1.1.3.1.3. Lingkungan Hidup .....	76
5.1.1.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum .....	78
5.1.1.3.1.5. Penataan Ruang .....	81
5.1.1.3.1.6. Perhubungan .....	82
5.1.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	84
5.1.1.3.2.1. Penanaman Modal .....	84
5.1.1.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) .....	85
5.1.1.3.2.3. Kependudukan .....	87
5.1.1.3.2.4. Ketenagakerjaan .....	88
5.1.1.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan dan Per- lindungan anak .....	91
5.1.1.3.2.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	92
5.1.1.3.2.7. Komunikasi dan Informasi .....	93
5.1.1.3.2.8. Pertanahan .....	94
5.1.1.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94
5.1.1.3.2.10. Perpustakaan .....	95
5.1.1.3.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .....	96
5.1.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	97
5.1.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	97
5.1.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita) .....	97
5.1.1.4.1.2. Produktifitas Total Daerah .....	98
5.1.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	98
5.1.1.4.2.1. Jumlah Orang/Barang yang Terang- kut Angkutan Umum .....	98
5.1.1.4.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran .....	98
5.1.1.4.2.3. Rasio Ketersediaan Daya Listrik .....	99
5.1.1.4.2.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik .....	99
5.1.1.4.2.5. Ketersediaan Penginapan .....	99
5.1.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .....	100
5.1.1.4.3.1. Angka Kriminalitas .....	101
5.1.1.4.3.2. Jumlah Demonstrasi .....	101

5.1.1.4.3.3. Kemudahan Perijinan .....	101
5.1.1.4.3.4. Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha .....	102
5.1.1.4.3.5. Status Desa (Persentase Desa Ber- status Swasembada terhadap Total Desa) .....	103
5.1.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .....	103
5.1.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulu- san S1/S2/S3) .....	104
5.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Srandakan .....	104
5.1.2.1. Kondisi Geografis .....	105
5.1.2.2. Penggunaan Lahan Kecamatan Srandakan .....	106
5.1.2.3. Pemerintahan Kecamatan Srandakan .....	106
5.1.2.4. Kependudukan .....	106
5.1.2.5. Pendidikan .....	108
5.1.2.6. Kesehatan .....	108
5.1.2.7. Sosial .....	109
5.1.2.8. Pertanian .....	110
5.1.2.9. Sarana Perekonomian .....	110
5.1.3. Gambaran Umum Desa Poncosari .....	111
5.1.3.1. Letak dan Luas Wilayah .....	111
5.1.3.2. Keadaan Demografi .....	111
5.1.3.2.1. Penduduk .....	111
5.1.3.2.2. Mata pencaharian .....	112
5.1.3.3. Kondisi Sosial Budaya .....	113
5.1.3.3.1. Pendidikan .....	113
5.1.3.3.2. Sarana dan Prasarana Desa .....	114
5.1.3.3.3. Struktur Masyarakat .....	115
5.1.3.3.4. Kehidupan Religius .....	116
5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	117
5.2.1. Karakteristik Responden .....	117
5.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Responden .....	121
5.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat .....	126
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1. Kesimpulan .....	143
6.2. Saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	146
<b>LAMPIRAN</b> .....	149

# DAFTAR TABEL

<b>TABEL 5.1.</b>	Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>38</b>
<b>TABEL 5.2.</b>	Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011 ...	<b>39</b>
<b>TABEL 5.3.</b>	Luas Wilayah Kabupaten Bantul Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>40</b>
<b>TABEL 5.4.</b>	Hubungan Formasi Geologi dengan luas penyebarannya di Kabupaten Bantul .....	<b>41</b>
<b>TABEL 5.5.</b>	Hubungan Jenis Tanah dengan Luas Penyebaran di Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>41</b>
<b>TABEL 5.6.</b>	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2010 .....	<b>42</b>
<b>TABEL 5.7.</b>	Pola curah Hujan Tahun 2007 – 2009 .....	<b>42</b>
<b>TABEL 5.8.</b>	Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 .....	<b>45</b>
<b>TABEL 5.9.</b>	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Bantul, 2011 .....	<b>46</b>
<b>TABEL 5.10.</b>	Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 201 .....	<b>47</b>
<b>TABEL 5.11.</b>	Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>48</b>
<b>TABEL 5.12.</b>	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul .....	<b>49</b>
<b>TABEL 5.13.</b>	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantul .....	<b>49</b>
<b>TABEL 5.14.</b>	Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2009 – 2011 (Juta Rp) .....	<b>49</b>
<b>TABEL 5.15.</b>	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Bantul .....	<b>50</b>
<b>TABEL 5.16.</b>	Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 .....	<b>50</b>
<b>TABEL 5.17.</b>	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 .....	<b>51</b>
<b>TABEL 5.18.</b>	Gini Rasio di Kabupaten Bantul Tahun 2007 – 2011 .....	<b>52</b>
<b>TABEL 5.19.</b>	Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2007 – 2011 .....	<b>52</b>
<b>TABEL 5.20.</b>	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>53</b>
<b>TABEL 5.21.</b>	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>53</b>
<b>TABEL 5.22.</b>	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>54</b>
<b>TABEL 5.23.</b>	Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>55</b>

<b>TABEL 5.24.</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2007 – 2010 Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, dan Nasional .....	<b>55</b>
<b>TABEL 5.25.</b>	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul ...	<b>56</b>
<b>TABEL 5.26.</b>	Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>56</b>
<b>TABEL 5.27.</b>	Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 .....	<b>57</b>
<b>TABEL 5.28.</b>	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011 .....	<b>58</b>
<b>TABEL 5.29.</b>	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>58</b>
<b>TABEL 5.30.</b>	Angka Kriminalitas Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>59</b>
<b>TABEL 5.31.</b>	Capaian Pembangunan Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2010 .....	<b>59</b>
<b>TABEL 5.32.</b>	Lembaga Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>60</b>
<b>TABEL 5.33.</b>	Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2011 .....	<b>63</b>
<b>TABEL 5.34.</b>	Ketersediaan Sekolah Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>72</b>
<b>TABEL 5.35.</b>	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul .....	<b>72</b>
<b>TABEL 5.36.</b>	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>73</b>
<b>TABEL 5.37.</b>	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul ...	<b>74</b>
<b>TABEL 5.38.</b>	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul .....	<b>74</b>
<b>TABEL 5.39.</b>	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>75</b>
<b>TABEL 5.40.</b>	Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2011 ....	<b>75</b>
<b>TABEL 5.41.</b>	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul .....	<b>76</b>
<b>TABEL 5.42.</b>	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>77</b>
<b>TABEL 5.43.</b>	Persentase penduduk berakses air bersih Tahun 2009 – 2010 di Kabupaten Bantul .....	<b>78</b>
<b>TABEL 5.44.</b>	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapat Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bantul .....	<b>78</b>
<b>TABEL 5.45.</b>	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>78</b>
<b>TABEL 5.46.</b>	Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik tahun 2007-2011 .....	<b>79</b>
<b>TABEL 5.47.</b>	Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2007-2011 ...	<b>79</b>
<b>TABEL 5.48.</b>	Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>80</b>
<b>TABEL 5.49.</b>	Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Tahun 2011 Kabupaten Bantul ....	<b>80</b>
<b>TABEL 5.50.</b>	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 Kabupaten Bantul	<b>81</b>
<b>TABEL 5.51.</b>	Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bantul .....	<b>81</b>
<b>TABEL 5.52.</b>	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>82</b>
<b>TABEL 5.53.</b>	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2010 Kabupaten Bantul .....	<b>82</b>
<b>TABEL 5.54.</b>	Jumlah Ijin Trayek Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Bantul .....	<b>83</b>
<b>TABEL 5.55.</b>	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>83</b>

<b>TABEL 5.56.</b>	Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>84</b>
<b>TABEL 5.57.</b>	Nilai Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>85</b>
<b>TABEL 5.58.</b>	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul ....	<b>85</b>
<b>TABEL 5.59.</b>	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul ....	<b>86</b>
<b>TABEL 5.60.</b>	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 .....	<b>87</b>
<b>TABEL 5.61.</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2011 .....	<b>87</b>
<b>TABEL 5.62.</b>	Penduduk Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 .....	<b>90</b>
<b>TABEL 5.63.</b>	Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 .....	<b>90</b>
<b>TABEL 5.64.</b>	Penduduk Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2011..	<b>90</b>
<b>TABEL 5.65.</b>	Penganggur Terbuka menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 .....	<b>91</b>
<b>TABEL 5.66.</b>	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>91</b>
<b>TABEL 5.67.</b>	Rasio KDRT Tahun 2010– 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>92</b>
<b>TABEL 5.68.</b>	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2011 .....	<b>92</b>
<b>TABEL 5.69.</b>	Rasio Akseptor KB Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>92</b>
<b>TABEL 5.70.</b>	Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bantul .....	<b>93</b>
<b>TABEL 5.71.</b>	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>93</b>
<b>TABEL 5.72.</b>	Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul ....	<b>93</b>
<b>TABEL 5.73.</b>	Luas Lahan Bersertifikat Tahun Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul	<b>94</b>
<b>TABEL 5.74.</b>	Kelompok Binaan LPM Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>94</b>
<b>TABEL 5.75.</b>	Kelompok Binaan PKK Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>95</b>
<b>TABEL 5.76.</b>	Jumlah LSM Aktif Tahun 2009 s.d 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>95</b>
<b>TABEL 5.77.</b>	Jumlah Perpustakaan Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>96</b>
<b>TABEL 5.78.</b>	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>96</b>
<b>TABEL 5.79.</b>	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>96</b>
<b>TABEL 5.80.</b>	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>97</b>
<b>TABEL 5.81.</b>	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>97</b>
<b>TABEL 5.82.</b>	Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bantul	<b>97</b>
<b>TABEL 5.83.</b>	Produktivitas per Sektor Kabupaten Bantul .....	<b>98</b>
<b>TABEL 5.84.</b>	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2009 s.d 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>98</b>
<b>TABEL 5.85.</b>	Data Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 .....	<b>99</b>
<b>TABEL 5.86.</b>	Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>99</b>
<b>TABEL 5.87.</b>	Perkiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Bantul .....	<b>99</b>
<b>TABEL 5.88.</b>	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bantul .....	<b>99</b>
<b>TABEL 5.89.</b>	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kabupaten Bantul .....	<b>100</b>
<b>TABEL 5.90.</b>	Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Bantul .....	<b>100</b>

<b>TABEL 5.91.</b>	Angka Kriminalitas Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>101</b>
<b>TABEL 5.92.</b>	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bantul .....	<b>101</b>
<b>TABEL 5.93.</b>	Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011 .....	<b>102</b>
<b>TABEL 5.94.</b>	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Bantul .....	<b>102</b>
<b>TABEL 5.95.</b>	Desa Tertinggal di Kabupaten Bantul .....	<b>103</b>
<b>TABEL 5.96.</b>	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bantul .....	<b>104</b>
<b>TABEL 5.97.</b>	Geografi dan Iklim .....	<b>106</b>
<b>TABEL 5.98.</b>	Kependudukan .....	<b>107</b>
<b>TABEL 5.99.</b>	Sex Ratio Penduduk .....	<b>107</b>
<b>TABEL 5.100.</b>	Sarana Pendidikan .....	<b>108</b>
<b>TABEL 5.101.</b>	Sarana Peribadatan .....	<b>109</b>
<b>TABEL 5.102.</b>	Produksi Pertanian .....	<b>110</b>
<b>TABEL 5.103.</b>	Produksi Ikan Tangkap .....	<b>110</b>
<b>TABEL 5.104.</b>	Produksi Ternak .....	<b>110</b>
<b>TABEL 5.105.</b>	Sarana Perekonomian .....	<b>111</b>
<b>TABEL 5.106.</b>	Perubahan Penduduk Desa Poncosari tahun 2004, 2006, 2008, 2010 dan 2012 .....	<b>112</b>
<b>TABEL 5.107.</b>	Mata Pencaharian Penduduk Desa Poncosari tahun 2012 .....	<b>113</b>
<b>TABEL 5.108.</b>	Jumlah penduduk Desa Poncosari Berdasarkan Pendidikan, Usia 15 Tahun Ke atas .....	<b>114</b>
<b>TABEL 5.109.</b>	Jumlah Penduduk Desa Poncosari Berdasarkan Agama yang Dianut ..	<b>116</b>
<b>TABEL 5.110.</b>	Jumlah Sarana Peribadatan Desa Poncosari Tahun 2012 .....	<b>117</b>
<b>TABEL 5.111.</b>	Kelompok Umur Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>117</b>
<b>TABEL 5.112.</b>	Jenis Pekerjaan Pokok Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru ...	<b>118</b>
<b>TABEL 5.113.</b>	Jenis Pekerjaan Sampingan Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>119</b>
<b>TABEL 5.114.</b>	Pendapatan Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>120</b>
<b>TABEL 5.115.</b>	Tingkat Pendidikan Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>120</b>
<b>TABEL 5.116.</b>	Kepemilikan Rumah Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>121</b>
<b>TABEL 5.117.</b>	Lantai Rumah Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>122</b>
<b>TABEL 5.118.</b>	Dinding Rumah Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>123</b>
<b>TABEL 5.119.</b>	Atap Rumah Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>123</b>
<b>TABEL 5.120.</b>	Sarana Air Bersih Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>124</b>
<b>TABEL 5.121.</b>	Penerangan Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>124</b>
<b>TABEL 5.122.</b>	Bahan Bakar Rumah Tangga Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>125</b>
<b>TABEL 5.123.</b>	Pendapatan Total Rumah Tangga Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru .....	<b>125</b>
<b>TABEL 5.124.</b>	Pengetahuan Responden Mengenai Partisipasinya dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ...	<b>127</b>
<b>TABEL 5.125.</b>	Sumber Informasi Responden Mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir .....	<b>128</b>

<b>TABEL 5.126.</b>	Pendapat Responden Mengenai Pihak yang Paling Berhak Mendapatkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ...	<b>128</b>
<b>TABEL 5.127.</b>	Ketepatan Sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Menurut Responden .....	<b>129</b>
<b>TABEL 5.128.</b>	Jenis Ketrampilan Yang Dimiliki Oleh Responden .....	<b>130</b>
<b>TABEL 5.129.</b>	Pelatihan Yang Pernah Diikuti Oleh Responden .....	<b>130</b>
<b>TABEL 5.130.</b>	Asal Lembaga Yang Pernah Memberikan Pelatihan .....	<b>131</b>
<b>TABEL 5.131.</b>	Manfaat Yang Dirasakan Dari Pelatihan Yang Diikuti .....	<b>131</b>
<b>TABEL 5.132.</b>	Bidang Usaha Yang Dimiliki .....	<b>132</b>
<b>TABEL 5.133.</b>	Sifat Usaha Yang Dimiliki .....	<b>132</b>
<b>TABEL 5.134.</b>	Partisipasi Laki-laki Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir .....	<b>133</b>
<b>TABEL 5.135.</b>	Manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir .....	<b>135</b>
<b>TABEL 5.136.</b>	Kelemahan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir .....	<b>135</b>
<b>TABEL 5.137.</b>	PKK Sebagai Kelembagaan Sosial Menjadi Media Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pesisir .....	<b>136</b>
<b>TABEL 5.138.</b>	Gotong Royong Sebagai Nilai-nilai Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pesisir .....	<b>137</b>
<b>TABEL 5.139.</b>	Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Yang Efektif Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pesisir .....	<b>138</b>
<b>TABEL 5.140.</b>	Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir .....	<b>139</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 5.1.</b>	Peta Batas Wilayah Kabupaten Bantul .....	<b>37</b>
<b>GAMBAR 5.2.</b>	Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011 .....	<b>48</b>
<b>GAMBAR 5.3.</b>	Laju Inflasi Tahun Kalender Triwulan IV Tahun 2011 Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional .....	<b>51</b>
<b>GAMBAR 5.4.</b>	Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011 .....	<b>86</b>
<b>GAMBAR 5.5.</b>	Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>88</b>
<b>GAMBAR 5.6.</b>	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Kabupaten Bantul .....	<b>89</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Sumberdaya alam pesisir dan laut, dewasa ini sudah semakin disadari banyak orang bahwa sumberdaya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open acces*) maka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin meningkat di hampir semua wilayah.

Seiring dengan meningkatnya usaha penangkapan dalam memenuhi kebutuhan pangan baik bagi masyarakat di sekitarnya maupun terhadap permintaan pasar antar pulau dalam negeri dan luar negeri. Ghofar (2004), mengatakan bahwa perkembangan eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dewasa ini (penangkapan, budidaya, dan ekstraksi bahan- bahan untuk keperluan medis) telah menjadi suatu bidang kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar (*market driven*) terutama jenis-jenis yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar.

Sebagai akibatnya pemanfaatannya cenderung melebihi daya dukung sumberdaya (*over exploitation*) dan bersifat destruktif. Kondisi ini semakin diperparah oleh peningkatan jumlah armada penangkapan, penggunaan alat dan teknik serta teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Disamping itu berbagai aktivitas manusia baik di wilayah pesisir dan laut serta kegiatan di daratan (*upland*) yang juga dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Kondisi ini menimbulkan tekanan lingkungan bahkan cenderung merusak sumberdaya alam pesisir dan laut yang cenderung meningkat intensitasnya dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya menimbulkan menurunnya daya dukung sumberdaya dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan suatu tragedi bersama (*open tragedy*).

Namun demikian, hingga saat ini tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir masih jauh dari tingkat optimal dan berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya yang secara terus menerus dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih optimal. Kondisi ini umumnya terjadi karena:

a. Kebijakan nasional cenderung bias pada sektor pertanian di luar perikanan laut, dimana program-program pengamanan penyediaan bahan pangan bagi masyarakat memberi bobot yang sangat kecil, bahkan dapat dikatakan mengabaikan sumberdaya pesisir dan perikanan. Prioritas kebijakan ekonomi pemerintah agaknya juga bias pada ekonomi daratan, dimana sektor-sektor yang terkait dengan pesisir belum menjadi prioritas utama untuk ditumbuh kembangkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional.

b. Faktor kedua adalah pembangunan produksi perikanan didominasi oleh penerapan usaha efisiensi penangkapan dan penerapan teknologi, dibanding pendekatan yang mempromosikan cara-cara pemanfaatan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Akibatnya kebijakan maupun program yang diselenggarakan kurang komprehensif menjangkau isu-isu seperti kemiskinan, pengamanan penyediaan pangan bagi masyarakat, berkelanjutan, dan kesesuaian usaha tersebut terhadap kemampuan lingkungan.

c. Ketiga, kerusakan ekosistem sumberdaya pesisir di Indonesia pada umumnya terjadi karena kesadaran publik yang masih rendah. Disatu sisi karena pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, belum banyak menyadari wewenang dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Selain itu, isu-isu pesisir belum menjadi prioritas pemerintah maupun masyarakat umum dibanding pengelolaan sektor daratan seperti pertanian dan kehutanan.

Kekurangan dalam mengintegrasikan kekayaan lokal (setempat) juga menyebabkan kegagalan dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam pesisir. Di banyak tempat/daerah di Indonesia terdapat kebiasaan adat istiadat yang selalu dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal/tradisional dan ternyata cocok dan efektif dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sumberdaya alam pesisir.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini sering bersifat parsial dan berpola "*top-down*", sehingga sering kali kurang atau bahkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, tidak berpola "*bottom-up*", sedang dalam implementasinya kurang mendayagunakan potensi yang ada secara optimal termasuk nilai-nilai atau kearifan lokal.

Sejalan dengan otonomi daerah yang diiringi dengan menguatnya tuntutan demokratisasi dan peningkatan peranan masyarakat (*stakeholders*), pemerataan dan keadilan serta perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah, maka proses

pengembangan kawasan pesisir dan laut hendaknya disusun dalam bingkai pendekatan integralistik yang sinergistik dan harmonis, dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat serta sejalan dengan pengembangan sumber-sumber potensi lokal.

Pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir yang berbasis pada sumber daya lokal akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan potensi sumberdaya. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan dan pelestarian sumberdayanya.

Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi pada kabupaten dan/atau kota sebagai basis penyelenggara otonomi daerah. Pertama, daerah kabupaten/kota dituntut untuk lebih mampu menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menggali potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Kedua, otonomi daerah harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam pendekatan yang terdahulu, partisipasi sering diartikan secara sempit yaitu sekedar mobilisasi sumberdaya masyarakat untuk kepentingan suatu program atau proyek yang didesain dari atas. Pada era otonomi seyogyanya partisipasi masyarakat (pemangku kepentingan) diartikan lebih luas yaitu mulai dari analisis permasalahan, perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan keberhasilan program. Dengan demikian masyarakat ikut serta dalam semua tahapan suatu program. Hal ini akan membawa banyak keuntungan baik dari pemerintah sendiri maupun bagi masyarakatnya.

Keikutsertaan masyarakat dari awal dalam menentukan permasalahan akan lebih memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan yang demikian juga membuat masyarakat ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab pada program tersebut sehingga lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk ikut mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Pada gilirannya metode pendekatan ini akan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

Masyarakat pesisir pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial, ekonomi, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Persepsi demikian didasarkan pada hasil pengamatan langsung terhadap realitas kehidupan masyarakat nelayan atau melalui pemahaman terhadap

hasil-hasil kajian akademis. Keterbelakangan sosial ekonomi pada masyarakat pesisir merupakan hambatan potensial bagi mereka untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya. Akibatnya sering terjadi kelemahan bargaining position dengan pihak-pihak lain di luar kawasan pesisir, sehingga mereka kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana aktualisasi dalam membangun wilayahnya (Kusnadi, 2007).

Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka masih tertinggal antara lain keadaan sumberdaya alam yang semakin menipis, kurangnya budaya menabung dan mengelola keuangan keluarga, serta struktur ekonomi atau tata niaga yang belum kondusif bagi kemajuan dan kemakmuran nelayan (Rokhmin Dahuri dan Rais Ginting, 2004).

Masyarakat pesisir (nelayan) dapat dikelompokkan menjadi: (1) nelayan penangkap ikan (anak buah kapal dan pemilik); (2) petambak/pembudidaya; (3) pengolah hasil laut; dan (4) pedagang hasil laut (Susilowati, dalam Hendratmoko, Christiawan dan Hidup Marsudi, 2010). Umumnya permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir di Indonesia tidak berbeda dengan persoalan yang dijumpai pada kegiatan ekonomi skala kecil lainnya. Mereka hidup dalam segala keterbatasan. Keterbatasan ekonomi tampak pada tingkat pendapatan nelayan yang rendah. Keterbatasan sosial di mana nelayan tidak mampu mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan kelembagaan sosial lainnya. Keterbatasan politik karena adanya sistem nilai yang dipaksakan dari luar dan tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi dalam peran pengambilan keputusan (Ary Wahyono, 2001). Di samping keterbatasan-keterbatasan lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, akses modal, jaringan informasi dan transportasi, dan lain sebagainya.

Karakteristik sosial masyarakat pesisir di atas menjadi penghambat untuk mengembangkan kemampuan partisipasi mereka dalam pembangunan wilayah. Seiring dengan belum berfungsinya atau belum adanya kelembagaan sosial masyarakat maka upaya kolektif untuk mengelola potensi sumberdaya wilayah juga menjadi terhambat. Keadaan ini berpengaruh besar terhadap lambannya arus perubahan sosial ekonomi yang terjadi di kawasan pesisir, sehingga dinamika pembangunan wilayah menjadi terganggu. Situasi *involutif* pembangunan wilayah yang demikian sangat terasa di desa-desa nelayan yang terpencil dan memiliki keterbatasan sarana-prasarana pembangunan.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam upaya membangun masyarakat pesisir agar potensi pembangunan dapat dikelola dengan baik adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan sosial yang dimiliki atau yang ada pada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM, dengan jalan memperluas wawasan pembangunan dan ketrampilan ekonomi masyarakat. Diharapkan melalui strategi ini masyarakat secara kolektif mempunyai kemampuan optimal dalam membangun wilayahnya.

Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat pada usia produktif yang menjadi bagian dari masyarakat pesisir, yang berdomisili di pesisir pantai kepulauan Indonesia atau di pulau-pulau terluar, dengan ciri desa-desa pantai yang relatif tradisional, serta memiliki kehidupan sosial ekonomi yang sangat tergantung pada sumberdaya kelautan. Kehidupan dan perekonomian yang diusahakan perempuan pesisir tidak terlepas dari tradisi komunitas yang melingkupinya. Masyarakat pesisir secara umum memiliki profesi, sebagai nelayan, pembudidaya ikan, udang galah, pengolah dan pedagang hasil laut, mengusahakan pertanian dan pengolahan hasil pertanian dengan jenis tanaman pantai.

Peluang kerja dan pengembangan di sektor perekonomian bagi masyarakat pesisir sesungguhnya terbuka luas. Terlebih-lebih kelebihan alam pesisir yang memiliki daya tarik wisata juga memberikan ruang yang lebar bagi perempuan untuk membuka usaha ekonomi produktif. Dengan adanya potensi kawasan wisata religius, alam pantai dan perikanan laut, produksi pertanian dan perikanan tinggi, nilai tambah industri tinggi, dilalui jalur jalan lintas selatan, sarana pendidikan cukup baik. Akan tetapi daya serap tenaga kerja masih sangat terbatas bagi masyarakat sekitar pesisir, khususnya perempuan selama ini masih belum dapat menempatkan perempuan pada posisi strategis.

Bahkan dengan beban masalah berupa tanah porous, kepemilikan tanah rendah, pantai kumuh, bangunan liar, infrastruktur kurang terencana, jalan kabupaten belum mantap, listrik dan informasi kurang, rasio rumah/KK rendah, sarana perdagangan sedang-rendah, pencemaran air tanah di pantai, kurang vegetasi pantai, eksploitasi galian golongan C kurang terkendali, menurunnya satwa langka, rawan banjir, nilai tambah dan jumlah unit usaha rendah yang terjadi di Kretek dan Sanden, penduduk miskin sedang, penganggur tinggi di Srandakan dan Kretek, Kondisi kesehatan rendah khususnya di Kretek, adanya penyandang masalah sosial. Hal ini semakin mempersempit peluang perempuan untuk berkembang.

Dilihat dari segi potensi alam, laut sesungguhnya menyediakan komoditas sangat besar, oleh karena itu memungkinkan bagi masyarakat pesisir dapat memperoleh peluang untuk mengusahakan perekonomian yang berskala sedang atau besar. Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan rendahnya hasil tangkapan nelayan, tingginya biaya operasional, rendahnya harga ikan, juga memperkecil aksesibilitas masyarakat pesisir dalam memperoleh ruang pengembangan diri. Kelemahan yang terjadi di lingkungan masyarakat pesisir, khususnya perempuan antara lain kurangnya pendidikan ketrampilan kerja. Mereka mengetahui eksistensi dirinya yang seharusnya mampu melibatkan diri pada pembangunan ekonomi, namun kenyataannya sangat susah untuk menentukan pilihan dalam memberikan kontribusi kepada perekonomian daerah. Masyarakat pesisir khususnya perempuannya secara umum hanya menjadi pedagang kecil, buruh, usaha warung kecil-kecilan, pengrajin hasil budidaya laut dan jasa yang kurang memiliki nilai jual tinggi. Fenomena ini menjadikan sebuah fakta kontradiktif yang perlu dicermati, karena kondisi tersebut sangat jauh dari tujuan pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di dalam area perdesaan yang modern;
- b. Meningkatkan pemerataan pembangunan;
- c. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lestari;
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- f. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Bertolak dari tujuan pembangunan tersebut di atas, maka rendahnya kinerja perekonomian, khususnya perempuan pesisir menjadi sasaran yang penting. Untuk itulah pemberdayaan masyarakat baik untuk laki-laki maupun perempuan pesisir menjadi agenda penting dalam konstelasi pembangunan perekonomian di Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Di samping itu pesisir merupakan bagian dari wilayah perdesaan yang menurut visi Kabupaten perlu ditingkatkan pertumbuhan perekonomian dalam rangka pencapaian pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, maka rumusan sasaran juga memiliki relevansi dengan upaya pemberdayaan perempuan pesisir, karena melalui pembangunan daerah periode tahun 2010-2014 diharapkan dapat : menurunkan kemiskinan dari 18,5% menjadi 13,5%

dan lapangan kerja tersedia, sehingga tingkat pengangguran turun dari 6,6% menjadi 4,1%; Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,53%.

## **1.2. Perumusan Permasalahan :**

Terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan pelaku ekonomi strategis yang perlu diintervensi dan ditingkatkan kemampuannya. Hal ini dapat memenuhi harapan dan cita-cita pembangunan, khususnya partisipasi masyarakat. Di bidang perekonomian peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan tidak dapat diabaikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Urgensi peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan pesisir menjadi bagian integral dari pemberdayaan masyarakat pesisir secara menyeluruh. Diversifikasi ekonomi di lingkungan pesisir dapat menjadi solusi menarik untuk meningkatkan aksesibilitas perekonomian laki-laki dan perempuan pesisir.

Pemberdayaan masyarakat pesisir tidak lepas dari konteks isu mengenai lingkungan hidup dan konservasi. Terlebih-lebih dewasa ini telah terjadi banyak perubahan morfologi pantai, akibat tergerus abrasi gelombang dan berkurangnya vegetasi tanaman pantai. Bibir pantai telah bergeser ke arah daratan, hilangnya gunung-gunung pasir, munculnya cekungan baru serta hilangnya beberapa vegetasi seperti yang terjadi di pantai Kuwaru dan Pandansimo dan sekitarnya. Pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir memberikan solusi bagi usaha pengamanan pantai serta usaha melakukan konservasi. Dalam hal ini pemerintah perlu menetapkan kawasan konservasi laut. Sampai tahun 1998, telah ditetapkan seluas lebih dari 4 juta ha, yang tersebar dilebih dari 25 lokasi diseluruh Indonesia, termasuk diantaranya 6 lokasi yang telah ditetapkan sebagai taman nasional laut. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir, konservasi laut menjadi sebuah urgensi yang bersifat komplementer. Perempuan memiliki sifat inheren "pemelihara" oleh karena itu menjadi sangat strategis permasalahan konservasi dengan pemberdayaan perempuan pesisir, sementara laki-laki sebagai "pengolah" kawasan pesisir, sehingga antara laki-laki dan perempuan pesisir akan dapat saling mengisi satu dengan lainnya.

Semakin kuat dalih pemerintah dan lembaga-lembaga donor serta LSM untuk menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat pesisir termasuk dalam hal ini perempuan pesisir. Menurut Badan Informasi Publik (2006) Sejak tahun 2001 pemerintah telah melakukan suatu program yang disebut Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini dirancang untuk mengatasi persoalan kemiskinan pada masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Selaras dengan program ini, maka pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir telah memberikan perhatian kepada salah satu komponen kelompok sasaran PEMP. Oleh karena itu penelitian ini dalam praktiknya dapat mempertajam gerakan pemberdayaan yang sebelumnya telah dilakukan. Kabupaten Bantul diketahui sebagai salah satu penerima program PEMP. Pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir juga memiliki nilai positif dalam mempercepat implementasi dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Wilayah Pantai dan Pulau-Pulau Kecil. Arah dari pemberdayaan secara umum adalah dengan mengembangkan potensi perikanan. Menurut Indrawadi (2006) Jumlah panen ikan, kerang dan kepiting dari terumbu karang secara lestari di seluruh dunia dapat mencapai 9 juta ton atau sedikitnya 12% dari jumlah tangkapan perikanan dunia. Indonesia memiliki terumbu karang terluas didunia (60.000 km<sup>2</sup>), tetapi hanya tinggal sedikit saja (6,20%) dalam kondisi yang masih sangat bagus. Dengan pemberdayaan perempuan pesisir diharapkan dapat menopang pemuliaan terumbu karang serta budidaya perikanan air laut. Menurut Indrawadi (2008) Secara umum kehidupan terumbu karang Indonesia, memang telah cidera berat, lebih dari 71% dari 65.000 km persegi habitat terumbu karang Indonesia dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, Indonesia kehilangan potensi laut Rp. 6,5 triliun pertahunnya gara-gara kehancuran habitat penghuni dasar laut ini.

Peran laki-laki dan perempuan pesisir sangat strategis, oleh karena itu sebuah pemberdayaan mempunyai nilai urgensi dalam pertumbuhan perekonomian, pemuliaan dan konservasi pantai, vegetasi tanaman serta terumbu karang, serta budidaya perikanan. Di samping itu pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir juga memiliki nilai penting dalam meningkatkan kualitas laki-laki perempuan dalam pengembangan komoditas kelautan dan sektor lain yang saling menunjang.

Bertolak dari kondisi pesisir serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam sektor perekonomian, maka penelitian ini akan menjawab tentang : Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir berdasarkan kearifan lokal di Kawasan Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul yang mendukung pengembangan Sektor Pariwisata?

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Wilayah Pesisir**

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Brahtz, 1972; Soegiarto, 1976; Beatly, 1994) dalam Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau Kecil (2003).

Dahuri, dkk. (1996) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas ke arah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah yurisdiksi wilayah propinsi atau state di suatu negara. Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut.

Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Ruang kawasan pesisir merupakan ruang wilayah diantara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya.

Dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir di batasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, ke arah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografis (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dan sebagainya) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, ke arah laut meliputi daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar

dsbnya). Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan masa air yang berasal dari daratan yang relatif tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan masa air laut yang relatif rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang demikian oleh Ghofar (2004), mengatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan nutrisi (*nutrient trap*). Akan tetapi, jika wilayah ini terjadi pengrusakan lingkungan secara massif karena pencemaran maka wilayah ini disebut juga sebagai wilayah jebakan cemaran (*pollutants trap*).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa berbagai sumberdaya hayati serta lingkungan di wilayah pesisir relatif lebih rentan terhadap kerusakan, dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau ekosistem-ekosistem lainnya. Dari seluruh tipe ekosistem yang ada, biasanya ekosistem pesisir merupakan wilayah yang mendapatkan tekanan lingkungan yang paling berat (Kay dan Alder, 1999) dalam Ghofar (2004).

## **2.2. Potensi Sumberdaya Alam Pesisir**

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.

Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir. Dahuri (1999), potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompok yakni (1) sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), (3) energi kelautan dan (4) jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*).

Sumberdaya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*marine culture*). Ketersediaan lahan pesisir merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan. Demikian juga dengan wilayah perairan pantainya dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan budidaya terutama budidaya laut.

Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sumberdaya energi terdiri dari OTEC (*Ocean Thermal Energy*

*Conservation*), pasang surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Wilayah pesisir dan laut sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan wilayah ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana. Secara biofisik wilayah pesisir memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Secara empiris terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas (*upland*) dengan laut lepas. Perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain) di lahan atas (*upland*) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara bijaksana akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.
- b. Dalam suatu kawasan pesisir, biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat keterkaitan langsung yang sangat kompleks antara proses-proses dan fungsi lingkungan dengan pengguna sumberdaya alam.
- c. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Pada hal sangat sukar atau hampir tidak mungkin untuk mengubah kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.
- d. Baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Misalnya suatu hamparan pesisir hanya digunakan untuk satu peruntukan, seperti tambak, maka akan lebih rentan, jika hamparan tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan.
- e. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Pada hal setiap sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran over eksploitasi sumberdaya alam dan konflik

pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini, yang pada gilirannya dapat menimbulkan suatu tragedi bersama (*open tragedy*).

### **2.3. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir**

Pengelolaan sumberdaya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat maksimal, dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumberdaya tersebut (Afiati, 1999).

Pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab terutama perikanan tangkap haruslah benar-benar memperhatikan daya dukung sumberdaya perikanan di wilayah perairan Indonesia, bahkan Purwanto (2003), secara eksplisit mengungkapkan bahwa apabila sumberdaya ikan laut yang hidup dalam wilayah perairan Indonesia dimanfaatkan secara benar dan bertanggungjawab yaitu tidak melebihi daya dukungnya, sumberdaya tersebut akan dapat menghasilkan produksi maksimum lestari sekitar 6,4 juta ton pertahun. Selain itu masyarakat Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (*high sea*). Sebaliknya bila sumberdaya ikan tersebut dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, kelestarian sumberdaya ikan akan terancam dan produksinya akan menurun.

Ketersediaan (stok) sumberdaya ikan pada beberapa daerah penangkapan (*fishing ground*) di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya sehingga kelestariannya terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan bahkan nyaris hilang dari perairan Indonesia (Purwanto, 2003). Lebih lanjut dikatakan pula bahwa ancaman ini diperkirakan akan meningkat pada dekade ini, karena terjadi pergeseran daerah penangkapan armada perikanan dunia ke daerah yang masih potensial, termasuk perairan Indonesia, baik secara legal maupun ilegal.

Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002).

Dalam pengelolaan lingkungan sumberdaya alam pesisir tidaklah bersifat serta merta atau latah, namun kita perlu mengkaji secara mendalam isu dan permasalahan mengenai sumberdaya yang hendak dilakukan pengelolaan. Penting atau tidaknya sumberdaya alam yang ada, potensi dan komponen sumberdaya mana yang perlu dilakukan pengelolaan dan apakah terdapat potensi dampak perusakan lingkungan,

serta untung atau tidaknya sumberdaya tersebut bagi masyarakat merupakan pertimbangan penting dalam pengelolaan.

Pengelolaan sumberdaya alam yang beranekaragam, baik di daratan maupun di lautan perlu dilakukan secara terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam pesisir dilakukan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan dan daya dukung lingkungan yang tersedia.

Secara ideal pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan menjamin eksistensi sumberdaya serta lingkungan hidup ikan (Anggoro, 2004).

Menurut Supriharyono (2002), beberapa pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam kawasan pesisir yakni meliputi (a) pertimbangan ekonomis, (b) pertimbangan dari aspek lingkungan dan (c) pertimbangan sosial budaya. Pertimbangan ekonomis menyangkut penting tidaknya untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, penghasil barang-barang yang dapat dipasarkan, merupakan aset lokal, nasional atau internasional serta merupakan aset pariwisata yang dapat mengahasil uang selain berupa barang.

Pertimbangan lingkungan menyangkut stabilitas fisik pantai, lingkungan masyarakat yang unik, penyediaan stok hewan dan tumbuhan termasuk yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan, pelestarian plasma nutfah, estetika dan identitas budaya, serta apakah terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sedimentasi, konstruksi, pertanian, penebangan, penambangan, penangkapan berlebihan (*overfishing*), yutrofikasi karena buangan limbah yang mengandung nutrien, dan kontaminasi oleh berbagai macam limbah. Sedangkan pertimbangan sosial budaya meliputi pengakuan tradisi, nilai sosial budaya, mempertahankan tradisi generasi yang akan datang, sasaran keagamaan.

Pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan secara berkelanjutan (*sustainable*) harus dilakukan secara bertanggung jawab (*responsible*), sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan yang sangat hati-hati (Ghofar, 2004). Dewasa ini, sayangnya, pengetahuan yang memadai mengenai proses-proses yang terjadi di kawasan pesisir dan lautan Indonesia belum tersedia secara memadai untuk suatu tujuan pemanfaatan yang rasional. Sebagai akibatnya adalah konsep dan teknik pengelolaan perikanan

kawasan pesisir dan lautan sebagian besar belum teruji. Selain degradasi lingkungan, beberapa isu penting lainnya adalah lemah atau masih rendahnya partisipasi masyarakat, sistem hukum dan penegakannya, keamanan di laut, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

#### 2.4. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*empowerment*” yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*selfreliant communities*), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moebyarto, 1996) dalam Wahyono, 2001.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community based management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*). Dalam kaitan ini, Moebyarto (1999), mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumberdaya lokal yang berbasis masyarakat, yang meliputi:

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam masyarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis.
- d. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.

e. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya setempat.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut *Community-Based Management*, menurut Nikijuluw (1994) dalam Latama (2002), merupakan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (*religion*). Carter (1996) dalam Latama (2002) memberikan definisi pengelolaan berbasis masyarakat sebagai : “*A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area*” atau sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya local (*community-based resource management*). Pentingnya memperhatikan aspek strategi adaptasi nelayan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut adalah karena strategi adaptasi yang dikembangkan memungkinkan nelayan mengatur daya tahan (*resilience*) terhadap persoalan-persoalan spesifik yang berhubungan pesisir dan nelayan seperti fluktuasi, ketidakpastian hasil tangkapan, musim, dan menurunnya sumberdaya perikanan.

## **2.5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)**

Dari hasil evaluasi terhadap program PEMP pada tahun 2005 yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan

adanya beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Dari program tersebut telah menghasilkan kelompok usaha ekonomi produktif di kalangan masyarakat pesisir, dan memunculkan kelembagaan usaha dan sistem manajemen. Studi evaluasi ini merekomendasikan perlunya pendampingan yang lebih intensif terhadap kelompok usaha produktif baik dalam pengembangan usaha maupun dalam sistem manajemen kelompok usaha, dan pengembangan kelembagaan. Beberapa usaha tampak belum dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Terjadi stagnasi kelembagaan pengelola usaha ekonomi produktif.

Perputaran modal mengalami hambatan, peran perempuan pesisir dalam usaha ekonomi produktif yang belum optimal, potensi kearifan lokal yang belum termanfaatkan secara proporsional termasuk dalam meningkatkan *Knowledge Management* (KM) di lingkungan masyarakat pesisir perlu direview (Ariana dkk, 2006). Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka program tersebut hanya akan menjadi monumen belaka. Untuk itulah berdasarkan hasil evaluasi program PEMP 2005, maka sangat diperlukan upaya untuk mengidentifikasi kembali potensi, sumber mata pencaharian, kearifan lokal dan peran perempuan agar dapat lebih dikembangkan. “ADB memberikan penguatan kapasitas terhadap pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Jenis kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan agar pihak pengelola mampu mengoptimalkan potensi yang ada,” Semakin kuat dalih pemerintah dan lembaga-lembaga donor serta LSM untuk menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Menurut Badan Informasi Publik Sejak tahun 2001 pemerintah telah melakukan suatu program yang disebut Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini dirancang untuk mengatasi persoalan kemiskinan pada masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Ada keunggulan pendekatan pemberdayaan jika dibanding dengan pendekatan pertumbuhan. Menurut Lyncolin (1999) pendekatan pembangunan pertumbuhan mengandalkan peningkatan agregat. Sedangkan sebuah pemberdayaan mempersoalkan intensitas peningkatan daya dan kemampuan masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan agar perempuan perdesaan pada umumnya dan perempuan pesisir pada khususnya dapat lebih mengoptimalkan kemampuan dan ketrampilannya dengan lebih baik, karena selama ini pengelolaan

ekonomi produktif yang dilakukan oleh perempuan belum maksimal dilakukan (Setyawati, 2006), padahal jika dilihat kontribusi perempuan dalam menambah pendapatan keluarga cukup signifikan. Hal ini dipertegas dari hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Setyawati (2007) terkait dengan aktivitas perempuan di sektor pariwisata pantai yang dirasakan juga masih perlu ditingkatkan lagi secara lebih terarah dan menyeluruh. Untuk itu usaha pemberdayaan bagi perempuan sangatlah diperlukan untuk memaksimalkan ketrampilan dan kemampuan yang mereka miliki, serta dalam rangka menciptakan peningkatan pendapatan bagi keluarga mereka pada khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya.

## 2.6. Pendekatan Pemberdayaan

Suatu pendekatan pembangunan yang partisipatif dan mengakar pada sasaran dari pembangunan, sehingga kelompok sasaran tidak sekedar menjadi obyek, melainkan sebagai subyek bahkan inisiator dari pembangunan itu sendiri adalah pendekatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat menurut Pranarka (1996) adalah *to give power or authority, atau to give ability to or enable*. Menurut Husodo (2000) bahwa berkembangnya pendekatan pemberdayaan merupakan sebuah sintesis dari pembangunan yang dikotomis pada masa industrialisasi (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Sedangkan inti pemberdayaan menurut Winarni (1998) adalah meliputi tiga hal yaitu *enabling, empowering* dan *independency*. Muara yang ingin dicapai oleh sebuah pemberdayaan menurut Sulistiyani (2003) adalah sebuah komunitas mampu melakukan identifikasi, meraih peluang, adanya skala prioritas yang tepat, kesesuaian cara dan alat mencapai sasaran serta mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka sebuah program pemberdayaan yang disusun

seharusnya mampu mengarahkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas diri dan kelompok. Adapun arah dari keberdayaan yang dimaksud sebagai kapasitas menurut Sulistiyani (2003) adalah kesadaran dan perilaku, terjadinya transformasi informasi dan kemampuan serta peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan sehingga mampu membentuk kemandirian.

Untuk menuju keberdayaan masyarakat yang dijumpai oleh pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan oleh sebuah program pemerintah maupun non pemerintah tidak secara *instant* akan memenuhi logika peningkatan kapasitas secara langsung. Kadang-kadang program akan terkendala oleh faktor *target group* di lokasi yang direncanakan di samping itu dihadapkan masalah yang pelik akibat suatu konflik sosial. Dengan demikian upaya mengintervensi masyarakat untuk diberdayakan akan mengalami kegagalan jika tanpa mengubah dan *mentreatment* faktor kondisional yang terjadi di lokasi. Integrasi sosial merupakan faktor kunci yang sebaiknya diakomodasi dalam sebuah program. Kemampuan program dalam memfasilitasi terjadinya integrasi sosial sangat penting. Jika sebuah program mampu mendekatkan segmen-segmen kepentingan dan rasial serta golongan dalam masyarakat serta mengurangi terjadinya konflik sosial akan memiliki nilai plus. Dengan demikian yang sebaiknya dijangkau oleh sebuah pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya hendaknya mengusahakan apakah dengan rencana pemberdayaan tersebut akan mampu menjadi magnet penggerak antar segmen dalam masyarakat untuk saling berkoheisi. Integrasi sosial merupakan proses penyatuan yang terjadi antar komponen masyarakat, antar golongan dan antar kepentingan maupun rasial atau faktor kewilayahan dengan adanya kepentingan terhadap program yang direncanakan oleh pemerintah, yang disebabkan oleh adanya persepsi, interpretasi dan pengharapan atas manfaat dari program. Program yang mampu menginformasikan nilai manfaat terhadap stakeholder dengan nilai manfaat yang besar baik untuk terjadinya perubahan signifikan terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan telah menjadi daya magnetik bagi masyarakat. Kondisi yang diharapkan adalah program yang direncanakan dapat :

- a. memberikan sugesti terhadap masyarakat akan nilai pentingnya program untuk perubahan kondisi lingkungan.
- b. memberikan sumber pengharapan yang besar bagi peningkatan aspek-aspek kehidupan.

Apabila kedua hal tersebut mampu diekspresikan oleh sebuah program pemberdayaan, maka akan dapat meminimalkan terjadinya konflik sosial. Masing-masing kelompok sosial bergerak mendekati program dengan mencoba menepiskan perbedaan-perbedaan struktural, kultural, rasial, *interest* dan konflik-konflik yang ada.

Pemberdayaan memiliki berbagai interpretasi, pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu proses dan program. Payne (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (*daya*) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia.

Pemberdayaan sebagai sebuah program mempunyai makna bahwa pemberdayaan merupakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks ini, pelaksanaan program pemberdayaan dibatasi waktu, sehingga tampak sebagai kegiatan keproyekan. Kondisi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi pelaksana program maupun komunitas target, karena sering terjadi kegiatan terputus di tengah jalan dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program.

Pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup dua dimensi yaitu budaya dan struktur sosial (Satria 2002). Selain itu, pemberdayaan dalam komunitas nelayan akan lebih berhasil jika menerapkan prinsip kejelasan tujuan, prinsip dihargainya pengetahuan dan penguatan nilai lokal, prinsip keberlanjutan, prinsip ketepatan kelompok sasaran atau tidak bias pada nelayan pada strata maupun golongan tertentu, dan prinsip kesetaraan *gender*, artinya baik pria maupun wanita memiliki secara aktif diakui hak-haknya dalam masyarakat, memiliki status dan peran sesuai budaya setempat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil penelitian Mubyarto dan Dove (1984) menyimpulkan bahwa modernisasi perikanan melalui introduksi kapal-kapal motor telah menimbulkan jurang yang bertambah lebar antara mereka yang mampu dan yang tidak mampu memanfaatkan teknologi tersebut, bahkan introduksi budidaya tambak udang yang padat modal hanya

berpihak pada kelompok kaya atau dengan perkataan lain pembangunan berakibat pada menguatnya marjinalisasi kelompok miskin. Dampak positif maupun negatif dari modernisasi perikanan, khususnya bagi masyarakat nelayan, petani petambak, maupun kelompok masyarakat pesisir yang lain (pengolah hasil laut, pemberi jasa wisata bahari dan lain-lain) perlu diantisipasi, yaitu melalui penerapan paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada aspek manusianya. Implikasinya adalah pembangunan akan berkelanjutan (*sustainability*), karena program-program pembangunan menciptakan manusia-manusia yang berdaya dan mandiri.

Soedijanto (1997) menyatakan bahwa pembangunan yang hanya menekankan pada produktivitas, justru hanya menimbulkan ketergantungan petani pada pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan di atas, peran komunikasi pembangunan sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam menghadapi modernisasi. Seperti telah dikemukakan oleh van Den Ban (1999) bahwa peranan berbagai program penyuluhan sebagai implementasi komunikasi pembangunan adalah dengan membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dan dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan tersebut. Upaya pemberdayaan nelayan kecil menurut Satria (2001) perlu memahami struktur sosial masyarakat nelayan, tidak hanya melihat aspek ekonomi atau teknologi saja, melainkan juga aspek sosial-budaya perlu diperhatikan, sehingga program tidak lagi hanya bersifat “ingin cepat selesai.”

## **2.7. Makna Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur.

Naritoom (Wagiran, 2010) merumuskan *local wisdom* dengan definisi, "*Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by lokal people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of*

*surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation."*

Definisi kearifan lokal tersebut, paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu: (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemilikinya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Konsep demikian juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya.

Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim global yang melanda kehidupan manusia. Kearifan adalah proses dan produk budaya manusia, dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup. Pengertian demikian, mirip pula dengan gagasan Geertz (1973): *"Local wisdom is part of culture. Local wisdom is traditional culture element that deeply rooted in human life and community that related with human resources, source of culture, economic, security and laws. lokal wisdom can be viewed as a tradition that related with farming activities, livestock, build house etc"*

Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Kearifan lokal Jawa tentu bagian dari budaya Jawa, yang memiliki pandangan hidup tertentu. Berbagai hal tentang hidup manusia, akan memancarkan ratusan dan bahkan ribuan kearifan lokal. Lebih lanjut dikemukakan beberapa karakteristik dari local wisdom, antara lain: (1) *local wisdom appears to be simple, but often is elaborate, comprehensive, diverse;* (2) *It is adapted to local, cultural, and environmental conditions;* (3) *It is dynamic and flexible;* (4) *It is tuned to needs of local people;* (5) *It corresponds with quality and quantity of available resources;* and (6) *It copes well with changes.*

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipertegas bahwa kearifan lokal merupakan sebuah budaya kontekstual. Kearifan selalu bersumber dari hidup manusia. Ketika hidup itu berubah, kearifan lokal pun akan berubah pula.

## **2.8. Ruang Lingkup Kearifan Lokal**

Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai

hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena dia dapat mencakup kearifan masa kini, dan karena itu pula bisa lebih luas maknanya daripada kearifan tradisional.

Untuk membedakan kearifan lokal yang baru saja muncul dengan kearifan lokal yang sudah lama dikenal komunitas tersebut, dapat digunakan istilah "kearifan kini", "kearifan baru", atau "kearifan kontemporer". Kearifan tradisional dapat disebut "kearifan dulu" atau "kearifan lama". Berdasarkan waktu pemunculan tersebut di atas, akan hadir kearifan dalam kategori yang beragam. Paling tidak, terdapat dua jenis kearifan lokal, yaitu: (a) kearifan lokal klasik, lama, tradisional, dan (b) kearifan lokal baru, masa kini, kontemporer. Kategori semacam ini mencakup berbagai hal dan amat cair bentuknya. Maksudnya, istilah lama dan baru itu seringkali berubah-ubah.

Dari sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu: (a) gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak; dan (b) kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, dapat dilihat. Kearifan lokal kategori (a) mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya dari komunitas tersebut maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, termasuk juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain. Kearifan lokal kategori (b) biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan bermakna simbolik.

Di Indonesia, 'kearifan lokal' jelas memunyai makna positif karena 'kearifan' selalu dimaknai secara 'baik' atau 'positif'. Pemilihan kata kearifan lokal disadari atau tidak merupakan sebuah strategi untuk membangun, menciptakan citra yang lebih baik mengenai 'pengetahuan lokal', yang memang tidak selalu dimaknai secara positif.

Dengan menggunakan istilah 'kearifan lokal', sadar atau tidak orang lantas bersedia menghargai 'pengetahuan tradisional', 'pengetahuan lokal' warisan nenek moyang dan kemudian bersedia bersusah payah memahaminya untuk bisa memperoleh berbagai kearifan yang ada dalam suatu komunitas, yang mungkin relevan untuk kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang.

Dalam setiap jengkal hidup manusia selalu ada kearifan lokal. Paling tidak, kearifan dapat muncul pada: (a) pemikiran, (b) sikap, dan (c) perilaku. Ketiganya hampir sulit dipisahkan. Jika ketiganya ada yang timpang, maka kearifan lokal tersebut semakin

pudar. Dalam pemikiran, sering terdapat akhlak mulia, berbudi luhur, tetapi kalau *mobah mosik, solah bawa*, tidak baik juga dianggap tidak arif, apalagi kalau tindakannya serba tidak terpuji.

Apa saja dapat tercakup dalam kearifan lokal. Paling tidak cakupan luas kearifan lokal dapat meliputi: (a) pemikiran, sikap, dan tindakan berbahasa, berolah seni, dan bersastra, misalnya karya-karya sastra yang bernuansa filsafat dan *niti (wulang)*; (b) pemikiran, sikap, dan tindakan dalam berbagai artefak budaya, misalnya keris, candi, dekorasi, lukisan, dan sebagainya; dan (c) pemikiran, sikap, dan tindakan sosial bermasyarakat, seperti *unggah-ungguh, sopan santun, dan udanegara*.

Secara garis besar, kearifan lokal terdiri dari hal-hal yang tidak kasat mata (*intangible*) dan hal-hal yang kasat mata (*tangible*). Kearifan yang tidak kasat mata berupa gagasan mulia untuk membangun diri, menyiapkan hidup lebih bijaksana, dan berkarakter mulia. Sebaliknya, kearifan yang berupa hal-hal fisik dan simbolik patut ditafsirkan kembali agar mudah diimplementasikan ke dalam kehidupan.

Dilihat dari jenisnya, *local wisdom* dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu makanan, pengobatan, teknik produksi, industri rumah tangga, dan pakaian. Klasifikasi ini tentu saja tidak tepat sebab masih banyak hal lain yang mungkin jauh lebih penting. Oleh sebab itu, kearifan lokal tidak dapat dibatasi atau dikotak-kotak.

Kategorisasi lebih kompleks dikemukakan Sungri (Wagiran, 2010) yang meliputi pertanian, kerajinan tangan, pengobatan herbal, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, perdagangan, seni budaya, bahasa daerah, filosofi, agama dan budaya serta makanan tradisional.

Suardiman (Wagiran, 2010) mengungkapkan bahwa kearifan lokal identik dengan perilaku manusia berhubungan dengan: (1) Tuhan, (2) tanda-tanda alam, (3) lingkungan hidup/pertanian, (4) membangun rumah, (5) pendidikan, (6) upacara perkawinan dan kelahiran, (7) makanan, (8) siklus kehidupan manusia dan watak, (9) kesehatan, (10) bencana alam.

Lingkup kearifan lokal dapat pula dibagi menjadi delapan, yaitu: (1) norma-norma lokal yang dikembangkan, seperti 'laku Jawa', pantangan dan kewajiban; (2) ritual dan tradisi masyarakat serta makna disebaliknya; (3) lagu-lagu rakyat, legenda, mitos dan ceritera rakyat yang biasanya mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh komunitas lokal; (4) informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, tetua adat, pemimpin spiritual; (5) manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat; (6) cara-cara

komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari; (7) alat-bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu; dan (8) kondisi sumberdaya alam/lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam penghidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam lingkup budaya, dimensi fisik dari kearifan lokal meliputi aspek: (1) upacara adat, (2) cagar budaya, (3) pariwisata alam, (4) transportasi tradisional, (5) permainan tradisional, (6) prasarana budaya, (7) pakaian adat, (8) warisan budaya, (9) museum, (10) lembaga budaya, (11) kesenian, (12) desa budaya, (13) kesenian dan kerajinan, (14) cerita rakyat, (15) dolanan anak, dan (16) wayang.

Sumber kearifan lokal yang lain dapat berupa lingkaran hidup orang Jawa yang meliputi: upacara tingkeban, upacara kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian. Kearifan lokal dapat digali dari suatu daerah tertentu. Dalam lingkup Yogyakarta misalnya, kajian tentang kearifan lokal dapat dikaji dari filosofi nilai budaya kraton yang meliputi: tata ruang, arsitektur bangunan, simbol vegetasi, simbol dan makna upacara serta regalia, sengkalan, pemerintahan, konsep kekuasaan dan kepemimpinan. Dari sisi budaya, secara komprehensif dapat dicermati dari tata nilai budaya Yogyakarta yang meliputi aspek: (1) religio-spiritual, (2) moral, (3) kemasyarakatan, (4) adat dan tradisi, (5) pendidikan dan pengetahuan, (6) teknologi, (7) penataan ruang dan arsitektur, (8) mata pencaharian, (9) kesenian, (10) bahasa, (11) benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, (12) kepemimpinan dan pemerintahan, (13) kejuangan dan kebangsaan, dan (14) semangat khas keyogyakartaan.

Keempat belas aspek tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan secara rinci kedalam butir-butir nilai. Berbagai macam *local wisdom* tersebut merupakan potensi pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal. Itulah sebabnya, dalam segala kegiatan yang ada di masyarakat perlu dilakukan dengan model yang dapat mewujudkan penyemaian kearifan lokal. Kearifan lokal dapat menjadi corong kegiatan masyarakat yang humanis.

## **2.9. Kearifan Lokal/Tradisional**

Kearifan lokal atau tradisional sesungguhnya merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya dibidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Bahasan ini sangat membantu kita dalam hal mengembangkan perilaku, baik secara individu maupun secara kelompok dalam kaitan dengan lingkungan dan upaya pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu membantu kita untuk

mengembangkan sistem sosial politik yang ramah terhadap lingkungan serta mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan atau sumberdaya alam termasuk sumberdaya alam pesisir dan laut.

Etika yang berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”, dalam arti kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau pada kelompok masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain (Keraf, 2002). Kebiasaan hidup yang baik ini kemudian dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan, norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami dan diajarkan dalam masyarakat. Oleh karena itu etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan juga etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari.

Pengertian kearifan lokal (tradisional) menurut Keraf (2002) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal/tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Pengertian di atas memberikan cara pandang bahwa manusia sebagai makhluk integral dan merupakan satu kesatuan dari alam semesta serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta serta mengubah cara pandang antroposentrisme ke cara pandang biosentrisme dan ekosentrisme.

Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu sistem sosial masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap alam maupun terhadap alam. Menurut Nababan (2003), mengatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun.

Sedangkan menurut Ataupah (2004), kearifan lokal bersifat histories tetapi positif. Nilai-nilai diambil oleh leluhur dan kemudian diwariskan secara lisan kepada

generasi berikutnya lalu oleh ahli warisnya tidak menerimanya secara pasif dapat menambah atau mengurangi dan diolah sehingga apa yang disebut kearifan itu berlaku secara situasional dan tidak dapat dilepaskan dari system lingkungan hidup atau sistem ekologi/ekosistem yang harus dihadapi orang-orang yang memahami dan melaksanakan kearifan itu. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kearifan tercermin pada keputusan yang bermutu prima. Tolak ukur suatu keputusan yang bermutu prima adalah keputusan yang diambil oleh seorang tokoh/sejumlah tokoh dengan cara menelusuri berbagai masalah yang berkembang dan dapat memahami masalah tersebut. Kemudian diambil keputusan sedemikian rupa sehingga yang terkait dengan keputusan itu akan berupaya melaksanakannya dengan kisaran dari yang menolak keputusan sampai yang benar-benar setuju dengan keputusan tersebut.

#### **2.10. Sumber Daya Masyarakat dalam Pemberdayaan untuk Manajemen Komoditas Kearifan Lokal**

Instrumen sumber daya masyarakat merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor lainnya. Masyarakat sebagaimana dimaksud mencakup masyarakat yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang hidup menyatu dalam sebuah komunitas sosial, terikat oleh tatanan sosial budaya yang terintegrasi. Segmentasi masyarakat yang ada dalam struktur sosial budaya sudah tidak menjadi penghalang atas gerakan pemberdayaan, melainkan dapat menjadi katalisator dalam mengalirkan energi pemberdayaan, baik yang berasal dari luar maupun dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya perbedaan tersebut menjadi tidak bermakna, karena ada faktor yang lebih penting yaitu kesamaan atas pengharapan pada program. Jika hal ini terjadi maka konflik akan menciut, bahkan menjadi tidak potensial lagi. Bertahap kelompok-kelompok menanggalkan atribut kepentingan yang menjadi identitasnya, dan bergerak untuk merespon program, sebagai bagian dari yang harus diperjuangkan bersama. Kondisi seperti ini mengarahkan masyarakat pada upaya melakukan intermediasi. Intermediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan bersama. Adapun kesepakatan bersama ini akan menuju sublimasi terciptanya konsensus, yaitu nilai kesepakatan mutlak yang dicapai melalui kerelaan/keihlasan setiap kelompok untuk menanggalkan kepentingan yang diakibatkan oleh daya magnetik sebuah program, sehingga dapat berdaya secara bersama-sama.

Terciptanya integrasi sosial dapat mengantarkan pada penguatan lembaga lokal. Lembaga lokal merupakan kekayaan masyarakat yang selama ini telah memberikan

kontribusi dalam sistem sosial secara luas, pencapaian tujuan masyarakat dan koordinasi warga. Jika masyarakat yang ada di lokasi program mampu melakukan integrasi, maka akan terjadi kedamaian dan keutuhan organisasi. Perbedaan kelembagaan lokal satu sama lain tidak bermakna, yang ada hanya "kita". Sebagai sama-sama warga masyarakat atau stakeholder sebuah program. Unsur kelembagaan lokal adalah seluruh institusi yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari prakarsa dan oleh serta untuk masyarakat, untuk mendukung dan menyalurkan aspirasi serta mengekspresikan identitas sosial masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Jika kelembagaan tersebut kuat baik status, pengorganisasian, manajemen, dan keanggotaannya, maka organisasi dapat menetralsisir keadaan yang kurang kondisional. Dengan demikian tercapai dukungan terhadap program.

Kelembagaan lokal sebagai potensi kearifan lokal, keberadaannya seringkali erat kaitannya dengan kebiasaan, budaya dan perilaku sosial. Ekspresi kebiasaan dan perilaku sosial tersebut hidup dan tumbuh serta melekat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan dan perilaku sosial tersebut memiliki nilai manfaat dan merupakan pertahanan serta taktik strategi untuk ke luar dari kesulitan dalam bentuk apapun, maka akan menjelma menjadi sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki standar budaya yang tertanam dan diakui eksistensinya sebagai modal sosial. Dan ini semua merupakan kekayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk membangun. Oleh karena program biasanya bersifat given, kadang-kadang kurang memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di lokasi. Proyek semacam ini kurang akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Sebuah program yang efektif adalah apabila mampu mengenali dan mengakomodasi kearifan lokal secara positif dan optimal.

#### **2.11. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pendidikan Non Formal untuk Pengembangan Ekonomi Produktif**

Pada umumnya tuntutan terhadap sebuah program adalah yang mampu memfasilitasi gender untuk dapat berkembang. Gender merupakan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Program atau kegiatan yang memberi nilai manfaat secara adil dan proporsional terhadap gender memiliki nilai tambah yang perlu dihargai. Artinya program atau kegiatan mampu memberikan dan memberi peluang untuk berperannya laki-laki dan perempuan secara adil dan seimbang.

Kelompok marginal merupakan faktor penting yang perlu mendapatkan prioritas atas manfaat program atau kegiatan tersebut. Kadang-kadang suatu program atau

kegiatan dipertanyakan segmen masyarakat mana yang akan menerima manfaat utama, dan masyarakat mana yang dirugikan. Kelompok marginal seperti : perempuan, anak-anak, difabel, kelompok minoritas dan orang-orang miskin seringkali dijadikan sebagai obyek suatu program semata, sehingga mereka lebih banyak menderita kerugian daripada memperoleh keuntungan yang diterima dari pembangunan program atau kegiatan yang dibangun. Sementara itu sebagai aktor pembangunan kelompok marginalpun turut andil dalam keberhasilan suatu program, sebab jika kelompok sasaran tidak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap program maka secara keseluruhan program dianggap gagal. Untuk itu program dianggap memiliki nilai tambah jika proyek mampu merekrut dan memfasilitasi kelompok-kelompok marginal yang dimaksud.

Kaum perempuan pesisir dalam hal ini menjadi fokus dari kelompok marginal yang perlu diberdayakan dalam bidang ekonomi produktif. Perempuan pesisir sebagai bagian dari sumber daya masyarakat yang tidak ternilai harganya, dan apabila dikembangkan akan memiliki nilai strategis yang semakin penting. Berdampingan dengan sumber daya alam pesisir dan kelautan yang belum dapat dioptimalkan manajemennya, maka antara sumber daya alam dan perempuan pesisir perlu dipadukan agar menghasilkan kinerja perekonomian yang lebih tinggi nilainya. Sumber daya yang dimiliki masyarakat pesisir perlu digali supaya memberikan kamanfaatan dalam peningkatan taraf hidup melalui pemberdayaan perempuan. Upaya mengeksikasikan perempuan pesisir dalam pengelolaan sumberdaya kelautan perlu dilakukan agar diperoleh kemanfaatan bagi hajat hidup masyarakat pesisir. Studi tentang pemberdayaan perempuan pesisir dalam peningkatan program aksi hendaknya segera dapat digulirkan. Kepedulian terhadap aspek penting memberdayakan perempuan pesisir melalui pengembangan pendidikan non formal, yakni dengan pelatihan-pelatihan tertetu, untuk penanganan masalah ketidakberdayaan sosial ekonomi merupakan bagian pembangunan yang strategis. Dengan pendidikan non formal perempuan pesisir mempunyai kamandirian untuk membangun komunitas, sosial ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.

Sumber daya dalam pembangunan yang tidak kalah pentingnya selain sumberdaya manusia yang dilengkapi dengan ketrampilan adalah sumber daya alam dan teknologi Kaum perempuan mempunyai potensi untuk melakukan akses dalam pembangunan. Sebagian besar perempuan pesisir tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menambah *income* keluarga sehingga perempuan lebih dapat meningkatkan taraf

hidupnya. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kaum perempuan dapat melakukan apapun (lebih fleksibel) ketika mempunyai ketrampilan untuk mamberdayakan dirinya. Pada gilirannya jumlah kaum perempuan yang relatif banyak, apabila diberdayakan, dibina melalui berbagai jenis ketrampilan merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam upaya membangun perekonomian didaerahnya. Pada dasarnya kaum perempuan merupakan sumber tenaga kerja, bisa menjadi tenaga ahli, pengusaha yang dapat meningkatkan roda perekonomian bagi lingkungan. Untuk itu adanya pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada kemampuan menggali potensi daerah/ kearifan lokal dan mengelola sumber daya.

Kaum perempuan pesisir sudah selayaknya mendapat pertolongan supaya dapat memberdayakan dirinya melalui pendidikan non formal. Untuk mengetahui jenis pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan maka perlu menggali potensi yang ada serta kebutuhan untuk meningkatkan potensi serta manajemen baik dalam memproduksi maupun pemasarannya. Melalui pendidikan non formal diharapkan ada kesadaran akan eksistensi dirinya, selanjutnya tahu harus bagaimana dan mencari solusi melalui berbagai upaya alternatif sebagai hasil dari proses pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulistiyani (2005) bahwa menghadapi orang yang tidak tahu akan dirinya melalui proses pemberdayaan, antara lain dengan beberapa tahap menintervensi kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik dan konatifnya. Melalui pendidikan nonformal perubahan kognitif, afektif, psikomotorik dan konatifnya diharapkan akan mengalami peningkatan dan termotivasi untuk mengembangkan usaha produktif secara lebih intens dan produktif. Langkah-langkah ini akan dicoba untuk memberdayakan kaum pesisir agar diperoleh keberdayaan dalam pengembangan kelompok usaha produktif, kelembagaan sosial dan manajemen usaha secara berkelanjutan dan kinerja perekonomian perempuan pesisir dapat meningkat.

Menurut Karl Marx, dalam Husodo (2000) pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Fiedmann (1992) pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah

memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

Menurut Husodo (2000) Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), Sen dan Grown (1987), dan Paul (1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dengan demikian pemberdayaan perempuan pesisir mencakup pemberdayaan melalui proses pendidikan non formal untuk mengubah perilaku psikologis dan psikomotorik, dengan dilengkapi oleh penguatan pemilikan faktor produksi dan aksesibilitas.

## **2.12. Tinjauan Umum Karakteristik Sosial dan Sistem Pengetahuan Masyarakat Pesisir**

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan sumberdaya yang mereka hadapi atau miliki. Masyarakat agraris menghadapi sumberdaya yang terkontrol yakni lahan untuk memproduksi suatu jenis komoditas dengan hasil yang dapat diprediksi. Dengan sifat yang demikian memungkinkan tetapnya lokasi produksi sehingga menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan faktor resiko pun relatif kecil.

Tohir (2001), mengemukakan bahwa terdapat fenomena yang menarik mengenai melimpahnya sumberdaya alam laut dengan masih rendahnya minat masyarakat pesisir untuk mengeksplorasi kekayaan laut. Lebih lanjut, Tohir (2001), mengatakan fenomena ini jika dicermati secara mendalam maka sebenarnya terdapat fakta bahwa masyarakat pesisir yang bermatapencarian sebagai nelayan maupun melakukan aktivitas hidup di laut jumlahnya relatif kecil dibanding dengan yang bekerja sebagai petani sawah, maupun jasa. Hal ini berarti jenis-jenis matapencarian masyarakat pesisir heterogen dan warga masyarakat yang memilih sebagai nelayan atau melakukan aktivitas di pesisir pada dasarnya masih merupakan kelompok kecil saja. Dari jumlah yang relatif

kecil itu, dilihat dari tingkat kesejahteraan hidupnya rata-rata masih belum menggembirakan karena sebagai nelayan kecil mereka menghadapi berbagai keterbatasan.

Dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat pesisir nelayan berbeda dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas social bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Satria, A, (2004), mengatakan bahwa secara teologis, masyarakat pesisir memiliki kepercayaan cukup kuat tentang laut yang memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan semakin terjamin. Tradisi ini masih tetap dipertahankan.

Juwono (1998) dalam Satria, A., (2004), mengatakan bahwa tradisi perawatan perahu juga terjadi di daerah sekitar pesisir dimana perahu dipersonifikasi seperti manusia yang bisa sakit dan harus diobati. Pengobatan perahu tersebut dilakukan melalui *kosokan* atau penggosokan.

Namaban (2003) mengatakan bahwa sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Aturan-aturan/tradisi masyarakat ini diwarisi secara turun temurun yang disebut juga sebagai hukum adat dan berlaku bagi masyarakat pesisir. Kenyataannya, nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat tersebut cukup efektif dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, dan menjaga pelestarian ekosistem laut dari berbagai aktivitas yang bersifat destruktif dan merusak.

## **BAB III**

### **MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Masalah :**

Bertolak dari kondisi pesisir serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam sektor perekonomian, maka penelitian ini akan menjawab tentang : Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir berdasarkan kearifan lokal di Kawasan Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul yang mendukung pengembangan Sektor Pariwisata?

#### **3.2. Tujuan Penelitian :**

Masyarakat pesisir memiliki tempat tinggal di sekitar pantai dan dicirikan oleh kinerja perekonomian yang bersifat khas. Dengan bertumpu pada pesisir sebagai lingkungan tempat tinggal, maka aktivitas perekonomian sehari-hari tidak bisa lepas dari pola dan kebiasaan kemaritiman. Keterikatan masyarakat dengan laut merupakan ciri tersendiri dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Laut sebagai sumber daya perekonomian, dengan ragam kekayaan ikan serta biota lain yang tidak terbatas, sebagai .potensi tak ternilai, akan tetapi belum dapat memberikan kesejahteraan yang diharapkan.

Pendidikan ketrampilan kerja, yang dikemas dalam pelatihan-pelatihan sangat diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan/ketrampilan khusus yang relevan dengan aktivitas perkonoman. Dengan demikian perempuan pesisir dapat mengaktualisasikan dirinya dalam melancarkan roda perekonomian sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Studi ini memiliki tujuan umum untuk menyusun model dan program aksi pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga mampu mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal dan dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi potensi dan sumber perekonomian pesisir
2. Mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan perekonomian pesisir
3. Membuat identifikasi terkait dengan potensi kearifan lokal
4. Menghasilkan output berupa rumusan solusi strategis untuk pemberdayaan masyarakat pesisir.

### 3.3. Manfaat Penelitian :

Manfaat penelitian ini meliputi dua jenis kemanfaatan yang ingin dicapai, yaitu manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis. Adapun untuk manfaat dari segi teoritis berguna sebagai pengembangan pada bidang ilmiah, sementara itu manfaat dari segi praktis berorientasi pada pemberian masukan bagi para pengambil kebijakan di dalam melakukan perencanaan dan pengimplementasian program ataupun kegiatan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Kedua manfaat penelitian ini dapat disebutkan seperti di bawah ini :

1. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah literatur dan bahan bacaan terkait dengan kajian tentang pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya terkait dengan peran perempuannya, sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pemberdayaan masyarakat pesisir yang dikaitkan dengan potensi kearifan lokal untuk menunjang sektor pariwisata. Di samping itu juga dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi penelitian yang telah ada terutama pada penelitian yang berbasis pada *gender pesisir*.
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional agar dapat mewujudkan kebijakan yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat pesisir, sehingga nantinya diharapkan dengan kebijakan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan di tingkat lokal, regional dan nasional dapat memberikan peluang untuk pengembangan peran perempuan di wilayah pesisir pada khususnya dan pengembangan peran perempuan Indonesia pada umumnya.

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

### **4.1. Pendekatan Penelitian**

Dalam ranah teoritis, penelitian ini akan mencoba untuk mengkombinasikan sejumlah metode, seperti *desk-study*, dan *field-study*. Metode *desk-study*, yang dikombinasikan dengan metode dokumenter di tingkatan operasional diarahkan untuk melakukan:

- a. Kajian dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan secara umum dan penelusuran hasil-hasil penelitian serta laporan-laporan hasil pemberdayaan perempuan pesisir.
- b. Kajian terhadap produk hukum (undang-undang, peraturan menteri, surat edaran, dan surat keputusan) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat secara umum dan pemberdayaan perempuan khususnya perempuan pesisir.

Sementara itu, metode *field-study*, pada ranah empiris akan digunakan sebuah pendekatan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) yaitu sebuah metode pendampingan yang digunakan secara langsung untuk memberikan panduan kepada para perempuan pesisir di kedua tempat yakni Kuwaru dan Pandansimo untuk melakukan identifikasi potensi, sumber mata pencaharian serta *treatment*. Adapun sebagai instrumen untuk melakukan pendampingan ini diawali dengan penggalan data melalui :

- a. Penyebaran Kuesioner kepada perempuan pesisir untuk mengenali kemampuan manajemen usaha, penguasaan dan aksesabilitas terhadap sumber ekonomi.
- b. Wawancara dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten khususnya Bappeda, Dopsos, Pemerintah kecamatan dan Desa terkait dengan penanganan serta pendampingan terhadap kelembagaan dalam proses pemberdayaan yang telah atau pernah dilakukan.
- c. Langkah-langkah RRA :

Tahap Pertama :

- i. Masyarakat pesisir didampingi dalam pengisian kuesioner.
- ii. Dilakukan diskusi terhadap hasil analisis kuesioner yang sudah terkumpul.

- iii. Pendampingan dalam identifikasi potensi, sumber ekonomi dan peranan.
- iv. Pendampingan dalam proses menemukan kebutuhan pengembangan dan manajemen usaha serta aksesabilitas terhadap komoditas ekonomi.
- v. Intervensi dan pembimbingan dalam menemukan solusi strategis.

Tahap Kedua :

- i. Pendampingan dalam perumusan prioritas solusi strategis.
- ii. Pendampingan dalam penyusunan model dan rencana tindak.
- iii. Pendampingan dalam pemilihan pilot project.
- iv. Pendampingan dalam pelaksanaan rencana tindak dalam pilot project.
- v. Penyempurnaan model pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pada penelitian kali ini seperti telah dikemukakan di muka, penekanan akan lebih diarahkan pada tahap yang pertama, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal dan umum untuk memperoleh data yang akan dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### **4.2. Validitas Data**

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya maka dalam penelitian ini perlu menguji validitas datanya, adapun validitas data dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan triangulasi metode, yaitu metode *field study* dengan *desk study*.
- b. Melakukan triangulasi jenis data antara jenis data dokumenter, jenis data wawancara dan jenis data kuesioner.
- c. Melakukan triangulasi sumber data antara lain dengan melakukan cross check terhadap nara sumber dari pihak perempuan pesisir, aparat pemerintah, pelaku pemberdayaan sebelumnya, pengurus lembaga-lembaga ekonomi lokal.

#### **4.3. Responden dan Nara Sumber**

- a. Responden merupakan masyarakat pesisir yang tinggal di Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul yang tergabung dalam kelompok usaha ekonomi produktif terkait dalam kemaritiman.

- b. Narasumber merupakan pejabat yang berkompeten Kepala Bappeda, Depsos, Pejabat Kecamatan, Pejabat Desa, Pengurus Kelembagaan Perekonomian Masyarakat Pesisir.

#### 4.4. Analisis Data

Analisis data aktual mengenai Jumlah, Jenis serta penguasaan dan aksesibilitas terhadap sumber ekonomi yang dapat diusahakan oleh masyarakat pesisir. Untuk keperluan analisis, hasil penelitian dicermati dengan menggunakan dua pendekatan yakni :

- a. Pendekatan Teori, yaitu berdasarkan teori dan konsep pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir. Analisis ini dikembangkan dengan pemanfaatan secara proporsional atas sumber-sumber data yang diperoleh dari penelitian *desk study* dan dokumenter. Langkah analisis ini sangat berguna dalam penyusunan modeling atas pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memperhatikan komparasi dari teori-teori.
- b. Pendekatan Lapangan, yaitu pengamatan kondisi pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Yaitu suatu analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengoptimalkan data-data yang berasal dari *field reseach*, sehingga dapat memberikan gambaran yang sepsifik dan kasuistik mengenai modeling pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul, DIY.

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Deskripsi Daerah Penelitian

#### 5.1.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bantul

##### 5.1.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

###### 5.1.1.1.1. Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan bagian integral wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah paling selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" LS dan 110°12'34" - 110°31'08" BT dengan luas 506,85 km<sup>2</sup> dan batas-batas wilayah sebagai berikut (Gambar 5.1):

- \_ Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- \_ Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- \_ Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman
- \_ Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan.

Secara administratif, Kabupaten Bantul dibagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam wilayah perdesaan sebanyak 34 desa (Tabel 2.1). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan 8 desa dan 72 pedukuhan.



**Gambar 5.1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Bantul**  
**Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2011**

**Tabel 5.1. Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Kecamatan	Desa		Luas (km <sup>2</sup> )	% Luas
		Perkotaan	Pardesaan		
1	Srandakan	Poncosari (24 dusun )	Trimurti (19 dusun)	18,32	3,61
2	Sanden	Sri Gading(20 dusun)	Gadingsari (18 dusun) Gadingharjo (6 dusun) Murtigading (19dusun)	23,16	4,57
3	Kretek	Tirtoharjo (6 dusun) Parangtritis (11 dusun) Tirtosari(7 dusun) Tirtomulyo (15 dusun)	Donotirto (13dusun)	26,77	5,28
4	Pundong	Selocharjo (16 dusun) Paniang Rejo(16 dusun)	Srihardono (17 dusun)	23,68	4,67
5	Bambanglipuro	Sumber Mulyo(16 dusun)	Sidomulyo (15 dusun) Mulyodadi (14dusun)	22,70	4,48
6	Pandak	Caturharjo (14dusun) Tirharjo (10dusun) Giangharjo (16dusun)	Wijirejo (10dusun)	24,30	4,79
7	Pajangan	Guwosari (15 dusun)	Triwidadi (22 dusun)	33,25	6,56
8	Bantul	Sabdodadi (5 dusun)	Sendangsari (18 dusun) Palbapang (10 dusun) Ringinharjo (6 dusun) Bantul (12 dusun) Trienggono (17 dusun)	21,95	4,33
9	Jetis	Patalan (20 dusun) Canden (15 dusun )	Trimulyo (12 dusun) Sumber Agung (17 dusun)	24,47	4,83
10	Imogiri	Selopamiro(18 dusun ) Sriharjo (13 dusun) Karangtengah (6 dusun )	Kebonagung (5) Karangtalan (5 dusun ) Imogiri (4 dusun) Wukirsari (16 dusun ) Girirejo (5 dusun )	54,49	10,75
11	Dlingo	Mangunan (6 dusun) Muntuk (11 dusun) Temuwuh (12 dusun) Jatimulyo (10 dusun ) Terong (9 dusun)	Dlingo (10 dusun )	55,87	11,02
12	Banguntapan	Tamanan (9 dusun) Jagalan (2 dusun) Singosaren (5 dusun) Wirokerten (8 dusun) Jambidan (7 dusun) Potorono (9 dusun) Bawuran (7 dusun) Wonolelo (9 dusun) Segroyoso (9 dusun)	Baturetno (8 dusun) Banguntapan 11 dusun)	28,48	5,62
13	Pleret	Bawuran (7 dusun) Wonolelo (9 dusun) Segroyoso (9 dusun)	Wonokromo (12 dusun) Pleret (11)	22,97	4,53
14	Piyungan	Sitimulyo (21 dusun)	Sitimulyo (22 dusun) Simartani (17 dusun)	32,54	6,42
15	Sewon	Pendowoharjo(16 dusun) Timbulharjo (16 dusun)	Bangunharjo(17 dusun) Panggunharjo(14 dusun)	27,16	5,36
16	Kasih	Tamanotirto (10 dusun) Ngestharjo (12 dusun) Bangunirwo (19 dusun)	Tirtomoyo (12 dusun)	32,38	6,39
17	Sedayu	Argodadi (14 dusun) Argomulyo (14 dusun)	Argosari (13 dusun) Argorejo (13 dusun)	34,36	6,78
	Jumlah	41	34	506,85	100,00

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Desember 2011

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia. Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama dan tiga sungai lainnya yaitu :

1. Sungai Oya (Kecamatan Dlingo, Imogiri) dengan panjang sungai 35,75 km;
2. Sungai Progo (Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak dan Srandakan) dengan panjang sungai 24 km;
3. Sungai Opak (Kecamatan Piyungan, Banguntapan, Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong, Kretek) dengan panjang sungai 19 km;
4. Sungai Winongo (Kecamatan Sewon, Bantul, Jetis, Pundong, Kretek) dengan panjang sungai 18,75 km;
5. Sungai Bedog (Kecamatan Kasihan, Pajangan, Bantul, Pandak) dengan panjang sungai 9,50 km;
6. Sungai Code (Kecamatan Banguntapan, Pleret, Sewon, Jetis) dengan panjang sungai 7 km.

### 5.1.1.1.2. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta daerah pantai. Secara garis besar, satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai.

Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari,
- Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (*fluviomarine*) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal,
- Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi,
- Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Apabila dilihat per wilayah kecamatan terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan Banguntapan.

**Tabel 5.2. Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Kelas Ketinggian (dpl) m	Luas (ha)	(%)
1	0 - 7	3.228	6,37
2	7 - 25	8.948	17,65
3	25 - 100	27.709	54,67
4	100 - 500	10.800	21,31
5	> 500	-	-
Jumlah		50.685	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011

Ketinggian tempat di Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat kelas. Hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3. Dari kedua tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelas ketinggian Kabupaten Bantul yang memiliki penyebaran paling luas terletak pada elevasi antara 25-100 meter (27.709 ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah, dan bagian Tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi kurang dari 7 meter) seluas 3.228 Ha

(6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kecamatan Srandakan dan Sanden merupakan daerah terendah di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar dari 0 sampai 25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 ha atau 8,2% dari seluruh luas Kabupaten Bantul.

**Tabel 5.3. Luas Wilayah Kabupaten Bantul Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl)					Jumlah
		0 – 7m	7 – 25m	25–100m	100-500m	>500m	
1.	Srandakan	1.058	776	-	-	-	1.834
2.	Sanden	1.246	1.081	-	-	-	2.327
3.	Kretek	924	1.335	190	101	-	2.550
4.	Pundong	-	1.938	239	199	-	2.376
5.	Bambanglipuro	-	1.494	788	-	-	2.282
6.	Pandak	-	1.312	1.117	-	-	2.429
7.	Pajangan	-	221	2.646	452	-	3.319
8.	Bantul	-	-	2.199	-	-	2.199
9.	Jetis	-	-	2.549	11	-	2.560
10.	Dlingo	-	-	815	4.819	-	5.634
11.	Banguntapan	-	-	2.154	475	-	2.629
12.	Pleret	-	-	1.783	345	-	2.128
13.	Piyungan	-	-	1.965	1.347	-	3.312
14.	Sewon	-	-	2.676	-	-	2.676
15.	Kasih	-	-	2.608	630	-	3.238
16.	Sedayu	-	-	3.262	149	-	3.411
17.	Imogiri	-	791	2.718	2.272	-	5.781
	<b>Total</b>	<b>3.228</b>	<b>8.948</b>	<b>27.709</b>	<b>10.800</b>	<b>-</b>	<b>50.685</b>

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011

#### 5.1.1.1.3. Geologi

Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau dibawah permukaan. Geologi menunjukkan kelompok-kelompok bantuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batumannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi (Tabel 5.4)

**Tabel 5.4. Hubungan Formasi Geologi dengan luas penyebarannya di Kabupaten Bantul**

No	Formasi Geologi	Jenis Batuan	Luas (Ha)	%
1.	F. Yogyakarta	Pasir vulkanik klastik, lanau, gravel	23.316	46
2.	F. Semilir-Nglanggran	Breksi, batupasir, tuff	12.164	24
3.	F. Sentolo	Batu gamping berlapis, napal, tuff	9.123	18
4.	F. Wonosari	Batugamping karang lagoon	4.055	8
5.	F. Sambipitu	Konglomerat, batupasir	1.520	3
6.	F. Gumuk Pasir	Pasir tersortasi	507	1
Jumlah			50.685	100

**Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul**

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah *Renzina*, *Alluvial*, *Grumusol*, *Latosol*, *Mediteran*, *Regosol*, dan *Lithosol* (Tabel 2.6). Jenis tanah *Regosol* merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah *Regosol* adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan *solum* tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah *Lithosol* berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah *Mediteran* berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah *Latosol* berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah *Grumusol* berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

**Tabel 5.5. Hubungan Jenis Tanah dengan Luas Penyebaran di Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Jenis Tanah	Luas	
		Ha	%
1	Renzina	787,80	1,55
2	Aluvial	1.188,50	2,34
3	Grumusol	7.607,70	15,01
4	Latosol	6.537,90	12,89
5	Mediteran	1.564,40	3,08
6	Regosol	25.930,00	51,16
7	Lithosol	7.067,80	13,97
Jumlah		50,685,00	100,00

**Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011**

#### 5.1.1.1.4. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Bantul terdapat tiga DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oya. DAS Oya mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Oya. Untuk DAS Opak mempunyai 12 sub-DAS yaitu sub-DAS Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Plihan. DAS Progo mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Bedog. Secara keseluruhan

DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 4.819,83 ha. DAS yang menempati areal paling luas adalah DAS Opak dengan luas 3.308,43 ha. DAS Progo menempati luas 1454,40 ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit.

Salah satu fungsi dari masing-masing DAS adalah untuk mengairi areal pertanian. Di samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada Tabel 5.6 disajikan data Daerah Aliran Sungai yang berada di Kabupaten Bantul.

**Tabel 5.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2010**

No	Nama Sub-DAS	Nama Sub-DAS	Luas (Ha)	Luas Lahan yang diairi
				(Ha)
1	Oya	Oya	57,00	15,00
2	Opak	Kali Gawe	178,00	178,00
		Kali Buntung	108,18	119,70
		Kali Tepus	68,14	74,10
		Kali Kuning	141,11	132,10
		Kali Mruwe	642,51	653,90
		Kali Kedung Semerengan	278,25	382,60
		Kali Code	277,96	865,40
		Kali Gajah Wong	287,00	246,80
		Kali Winongo	910,58	2.110,50
		Kali Bulus	185,30	96,30
		Kali Belik	133,82	117,40
		Kali Pilan	97,58	97,34
		3	Progo	Kali Bedog
<b>JUMLAH</b>	<b>14 Sub Das</b>			<b>4.819,83</b>

Sumber: Dinas SDA, Desember 2010

#### 5.1.1.1.5. Klimatologi

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen.

Pada musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian Barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di Tenggara. Data curah hujan disajikan sebagai perbandingan adalah data pada Tahun 2007-2009 (Tabel 5.7).

**Tabel 5.7 : Pola curah Hujan Tahun 2007 – 2009**

No.	Kecamatan	2007		2008		2009	
		HH	mm	HH	mm	HH	mm
1	Januari	20.0	274	31	64.93	17.50	188.00
2	Februari	14.0	253	29	365.59	12.60	194.80
3	Maret	14.0	256	31	350.54	10.17	109.50
4	April	0	0	21	163.54	10.38	129.25
5	Mei	6.0	69	7	20.25	0	0
6	Juni	0	0	1	4.41	1.67	45.67
7	Juli	0.2	1.6	0	0	2.00	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	19	162.97	0	0
11	November	2.9	53.71	27	372.15	8.00	196.20
12	Desember	13.0	380.4	27	276.33	10.43	225.71
	<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>1287.71</b>	<b>193</b>	<b>1780.71</b>	<b>72.74</b>	<b>1089.13</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>6</b>	<b>107.31</b>	<b>16.08</b>	<b>148.39</b>	<b>6.06</b>	<b>90.76</b>

Sumber : Dipertahut 2010

#### **5.1.1.1.6. Penggunaan Lahan**

Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030 rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas:

##### **1. Kawasan Lindung Kabupaten**

Rencana pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung. Penyebaran kawasan hutan lindung meliputi Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air.
- c. Kawasan perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten.
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
- e. Kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

##### **2. Kawasan budidaya Kabupaten**

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan rakyat. Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Hektar atau 16,86% dari luas wilayah Kabupaten Bantul.
- b. Kawasan peruntukan pertanian. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 13.324 Hektar atau 26,29%. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 5.247 Hektar atau 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:
  - 1) Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
  - 2) Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
  - 3) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;
  - 4) Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;
  - 5) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
  - 6) Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan; dan

7) Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden

c. Kawasan peruntukan perikanan

d. Kawasan peruntukan pertambangan

e. Kawasan peruntukan industri

f. Kawasan peruntukan pariwisata

g. Kawasan peruntukan permukiman

h. Kawasan peruntukan lainnya

#### **5.1.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah**

Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan, hal ini berdasarkan:

- a. Batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski terdapat *ring road* namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut,
- b. Topografi kawasan yang relatif datar,
- c. Tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air,
- d. Banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran.

Sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 , potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio - kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Kawasan strategis ekonomi kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
2. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
3. Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
4. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
5. Kawasan Strategis Industri Piyungan.

Sedangkan kawasan strategis sosio – kultural kabupaten meliputi Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) dan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem). Dan kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
2. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

#### 5.1.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan.

Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Bencana air pasang merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan.

Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong. Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

**Tabel 5.8. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030**

No	Jenis Bencana	Lokasi yang berpotensi
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh kecamatan
2.	Kawasan rawan longsor	Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong.
3.	Kawasan rawan banjir	Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret.
4.	Kawasan rawan gelombang pasang	Kretek, Srandakan, Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, sebagian Bambanglipuro.
5.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

Sumber : Bappeda, 2011

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya.

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana:

1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum,
2. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko,

3. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

#### 5.1.1.1.9. Demografi

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bantul tercatat sejumlah 911.503 jiwa. Berdasarkan data sensus penduduk Tahun 2010 dan laju pertumbuhan SP2000-SP2010(1,07%) maka estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 ini mencapai 921.263 jiwa (Tabel 2.10).

**Tabel 5.9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Bantul, 2011**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jumlah laki-laki dan perempuan
1	Srandakan	14.214	14.454	28.668	98,34
2	Sendan	14.616	15.128	29.744	96,62
3	Kretek	14.131	15.192	29.323	93,02
4	Pundong	15.543	16.236	31.779	95,73
5	Bambanglipuro	18.524	18.956	37.480	97,72
6	Pandak	23.926	23.982	47.908	99,77
7	Bantul	29.681	30.073	59.754	98,70
8	Jetis	25.887	26.426	52.313	97,96
9	Imogin	28.008	28.528	56.536	98,18
10	Dlingo	17.609	18.058	35.667	97,51
11	Pleret	21.926	21.805	43.731	100,55
12	Piyungan	24.604	24.823	49.427	99,12
13	Banguntapan	62.127	60.383	122.510	102,89
14	Sewon	53.486	52.215	105.701	102,43
15	Kasihan	56.487	56.221	112.708	100,47
16	Pajangan	16.493	16.723	33.216	98,62
17	Sedayu	22.197	22.601	44.798	98,21
Jumlah		459.459	461.804	921.263	99,49
Persentase		49,87	50,13	100	

Sumber: BPS, 2012 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah.

**Tabel 5.10. Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2011**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km <sup>2</sup>
1	Srandakan	18,32	29.868	1.585
2	Sanden	23,16	29.744	1.284
3	Kretek	26,77	29.323	1.085
4	Pundong	23,68	31.779	1.342
5	Bambanglipuro	22,70	37.480	1.651
6	Pandak	24,30	47.908	1.972
7	Bantul	21,95	59.754	2.722
8	Jefis	24,47	52.313	2.138
9	Imogiri	54,49	56.536	1.038
10	Dlingo	55,87	35.667	638
11	Pleret	22,97	43.731	1.904
12	Plyungan	32,54	49.427	1.519
13	Banguntapan	28,48	122.510	4.302
14	Sewon	27,16	105.701	3.892
15	Kasih	32,38	112.708	3.481
16	Pajangan	33,25	33.216	999
17	Sedayu	34,36	44.798	1.304
	Jumlah	606,85	921.263	1.818

Sumber: BPS, 2012

Pada tabel 5.10 terlihat bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul tidak merata, daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan Banguntapan (4.302 jiwa/km<sup>2</sup>), Sewon (3.892 jiwa/km<sup>2</sup>), dan Kasihan (3.481 jiwa/km<sup>2</sup>), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (638 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul Tahun 2011 mencapai 1.818 jiwa per km<sup>2</sup>.

Selain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk dapat pula ditinjau dari kepadatan penduduk agraris. Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat dilihat pada Tabel 5.11. Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia.

Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian.

Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya.

Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta.

**Tabel 5.11. Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011**

	Kecamatan	Luas Areal Pertanian (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan/Ha
1	Srandakan	419	29.668	60
2	Sanden	988	29.744	26
3	Kretek	892	29.323	12
4	Pundong	864	31.779	24
5	Bambanglipuro	1.164	37.480	24
6	Pandak	827	47.908	29
7	Bantul	1.132	69.754	68
8	Jetis	1.177	62.313	39
9	Imogiri	1.109	66.536	18
10	Dlingo	512	35.867	9
11	Plebet	860	43.731	26
12	Piyungan	1.385	49.427	23
13	Banguntapan	1.409	122.510	100
14	Sewon	1.305	105.701	83
15	Kasihan	673	112.709	150
16	Palangan	262	33.216	23
17	Sedayu	960	44.798	16
	Jumlah (Rata-rata)	16.036	921.263	31

Sumber: BPS, 2012 (angka sementara)

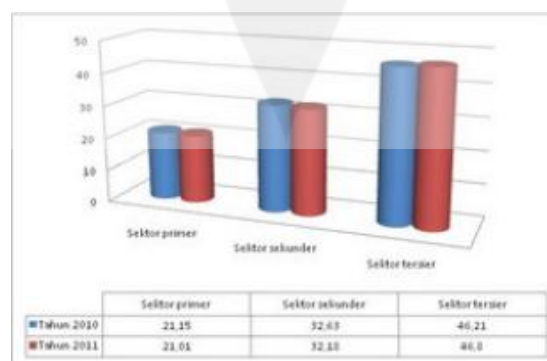
### 5.1.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 5.1.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 5.1.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yg dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PRDB Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sebesar Rp. 10.025.775 juta atas dasar harga berlaku dan mencapai Rp. 4.176.868 juta atas dasar harga konstan Tahun 2000. Sedangkan struktur ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2011 mengalami pergeseran dari sektor primer menuju ke sektor sekunder dan tersier (Gambar 5.2). Adapun nilai dan kontribusi sektor-sektor dalam PDRB secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.12.

**Gambar 5.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011**



**Tabel 5.12. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul**

No	Sektor	2007		2008		2009		2010*		2011**	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian	838.545	24,31	880.148	24,33	919.417	24,32	933.260	23,52	950.491	22,76
2	Pertambangan & Penggalian	35.023	1,02	35.829	0,99	35.783	0,95	36.525	0,92	36.576	0,88
3	Industri Pengolahan	582.328	16,88	596.187	16,48	610.781	16,16	647.939	16,33	680.271	16,29
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	29.294	0,85	31.675	0,88	34.448	0,91	36.289	0,91	37.969	0,91
5	Konstruksi	413.694	11,99	437.151	12,08	434.409	11,49	454.480	11,45	482.930	11,56
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	659.401	19,12	702.353	19,41	746.833	19,76	789.789	19,90	844.427	20,22
7	Pengangkutan & Komunikasi	234.814	6,81	248.779	6,88	268.145	7,09	287.236	7,24	308.199	7,38
8	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	202.511	5,87	212.888	5,88	230.768	6,11	252.015	6,35	271.556	6,50
9	Jasa-jasa	453.340	13,14	473.049	13,07	499.364	13,21	530.397	13,37	564.448	13,51
	<b>PDRB</b>	<b>3.448.949</b>	<b>100</b>	<b>3.618.060</b>	<b>100</b>	<b>3.779.948</b>	<b>100</b>	<b>3.967.928</b>	<b>100</b>	<b>4.176.868</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS 2012

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat sementara

**Tabel 5.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantul**

No	Sektor	2007		2008		2009		2010*		2011**	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian	1.348.018	21,03	1.587.482	21,40	1.705.935	20,94	1.834.746	20,21	2.019.432	20,14
2	Pertambangan & Penggalian	64.077	1,00	71.679	0,97	75.592	0,93	85.446	0,94	87.174	0,87
3	Industri Pengolahan	1.228.352	19,16	1.391.054	18,75	1.527.505	18,75	1.750.151	19,28	1.904.919	19,00
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	67.967	1,06	83.561	1,13	98.549	1,21	108.148	1,19	114.736	1,14
5	Konstruksi	814.190	12,70	951.861	12,83	988.181	12,13	1.104.073	12,16	1.208.859	12,04
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.100.094	17,16	1.289.407	17,38	1.454.135	17,85	1.602.662	17,66	1.799.008	17,94
7	Pengangkutan & Komunikasi	440.421	6,87	509.703	6,87	560.368	6,88	623.940	6,87	697.451	6,96
8	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	398.161	6,21	459.309	6,19	527.028	6,47	615.172	6,78	699.893	6,98
9	Jasa-jasa	948.369	14,80	1.073.924	14,48	1.210.568	14,86	1.352.064	14,90	1.496.304	14,92
	<b>PDRB</b>	<b>6.409.648</b>	<b>100</b>	<b>7.417.980</b>	<b>100</b>	<b>8.147.860</b>	<b>100</b>	<b>9.076.401</b>	<b>100</b>	<b>10.025.775</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS 2012

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 mengalami peningkatan dari 4,97% pada Tahun 2010 menjadi 5,27% pada Tahun 2011 (Tabel 5.14).

**Tabel 5.14. Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2009 – 2011 (Juta Rp)**

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan tahun 2000	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2009	8.147.860	9,84	3.779.948	4,47
2	2010	9.076.401*	11,4	3.967.928*	4,97
2	2011	10.025.775**	10,46	4.176.868**	5,27

Sumber : BPS, 2012

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 berdasarkan harga konstan sebesar 5,27% sedangkan Tahun 2010 sebesar 4,97%. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.15. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Bantul**

No	Sektor	2007		2008		2009		2010*		2011**	
		Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %
1	Pertanian	21,03	24,31	21,40	24,33	20,94	24,32	20,21	23,52	20,14	22,76
2	Pertambangan & Penggalian	1,00	1,02	0,97	0,99	0,93	0,95	0,94	0,92	0,87	0,88
3	Industri Pengolahan	19,16	16,88	18,75	16,48	18,75	16,16	19,28	16,33	19,00	16,29
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,06	0,85	1,13	0,88	1,21	0,91	1,19	0,91	1,14	0,91
5	Konstruksi	12,70	11,99	12,83	12,08	12,13	11,49	12,16	11,45	12,04	11,56
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	17,16	19,12	17,38	19,41	17,85	19,76	17,66	19,90	17,94	20,22
7	Pengangkutan & Komunikasi	6,87	6,81	6,87	6,88	6,88	7,09	6,87	7,24	6,96	7,38
8	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	6,21	5,87	6,19	5,88	6,47	6,11	6,78	6,35	6,96	6,50
9	Jasa-jasa	14,80	13,14	14,48	13,07	14,86	13,21	14,90	13,37	14,92	13,51
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, 2012

\*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

#### 5.1.1.2.1.2. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (Tabel 5.16).

**Tabel 5.16. Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011**

No	Tahun	Penduduk pertengahan tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan Tahun 2000	
			Nilai (Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Rp)	Pertumbuhan
1	2007	872.866	7.343.221	10,32	3.951.293	2,95
2	2008	886.061	8.371.861	14	4.083.309	3,34
3	2009	899.312	9.060.104	8,22	4.203.156	2,93
4	2010*	911.503	9.957.620	9,9	4.353.170	3,56
5	2011**	921.263	10.882.642	9,28	4.533.849	4,15

Sumber: BPS, 2011

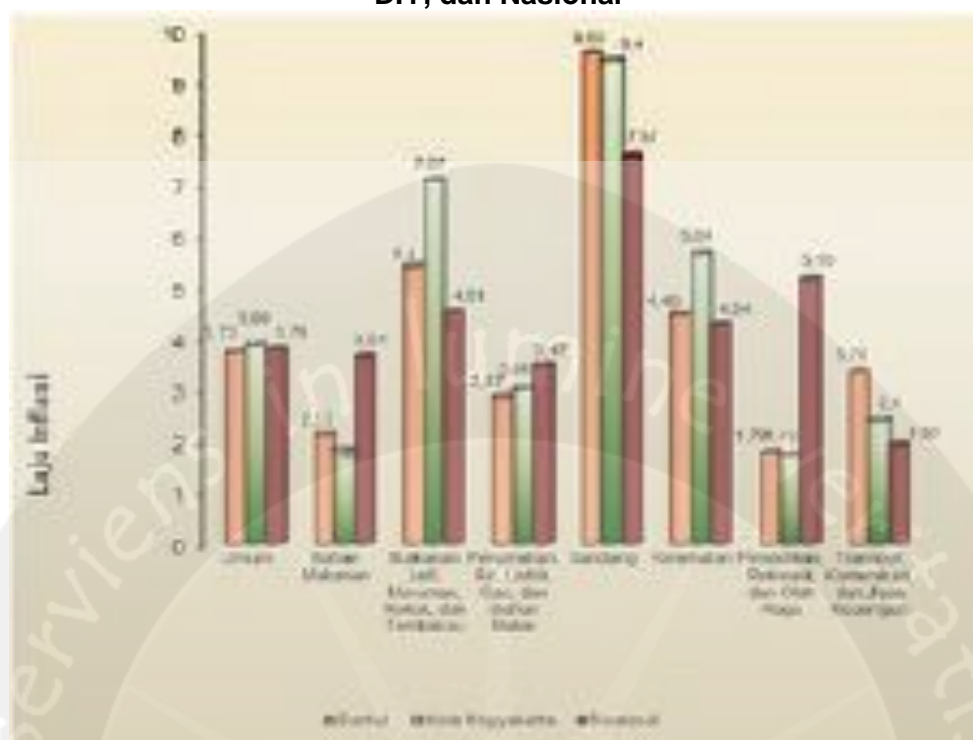
\* = angka sementara

\*\* = angka sangat sementara

#### 5.1.1.2.1.3. Laju inflasi

Laju inflasi tahun kalender di Kabupaten Bantul pada bulan Desember berada pada angka 3,73 persen, lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 3,88 persen dan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,79 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran yang dipantau harganya, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memiliki laju inflasi tahun kalender lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional, sedangkan kelompok sandang dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memiliki laju inflasi tahun kalender lebih tinggi dibandingkan dengan kota Yogyakarta dan nasional. Secara grafis, perbandingan laju inflasi triwulan IV Tahun 2011 antar Kabupaten Bantul dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 5.3 sebagai berikut :

**Gambar 5.3 Laju Inflasi Tahun Kalender Triwulan IV Tahun 2011 Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional**



Inflasi Tahun 2011 sebesar 3,73 persen termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun). Inflasi ringan mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik antara lain meningkatkan pendapatan dan investasi. Perkembangan Inflasi Kabupaten Bantul dari Tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.17. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011**

No	Tahun	Inflasi Kab. Bantul	Provinsi DIY	Inflasi Nasional
1	2007	7,1	7,99	6,59
2	2008	10,26	10,80	11,06
3	2009	2,99	2,93	2,78
4	2010	6,58	7,38	6,98
5	2011	3,73	3,88	3,79

Sumber: BPS, 2012

#### 5.1.1.2.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien Gini pada Tahun 2010 sebesar 0,2469 dan pada Tahun 2011 diprediksikan sebesar 0,2445, mengingat bahwa faktor perkalian baru dapat ditentukan oleh BPS Pusat pada Tahun 2011. Koefisien Gini Tahun 2011 merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase angka kemiskinan pada Tahun 2011,

peningkatan laju pertumbuhan PDRB Tahun 2011, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil.

Pemerintah menyadari bahwa hasil pembangunan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga telah memberikan penekanan dengan bobot yang sama kepada aspek peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan.

Alternatif pilihan kebijakan penanggulangan ketimpangan dan kemiskinan antara lain program Jamkesmas, jamkesda, PNPM mandiri. Pelaku bisnis dan masyarakat juga perlu ikut berperan aktif, agar kaum miskin tidak semakin terpinggirkan dengan memberikan lapangan kerja.

**Tabel 5.18. Gini Rasio di Kabupaten Bantul Tahun 2007 – 2011**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011*
Gini Ratio	0,2474	0,2536	0,2473	0,2469	0,2445
Kriteria	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2007-2010

\* Prediksi Bappeda

#### 5.1.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

##### 5.1.1.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf di Kabupaten Bantul tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.19. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2007 – 2011**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Melek Huruf (orang)	670.368	690.526	720.624	750.540	760.000
Persentase Melek Huruf (%)	82,073	84,09	87,44	89,82	90,91

Sumber: Dinas Pendidikan dan Non Formal, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 91,03%. Namun angka tersebut melebihi dari target RPJMD 2011-2015 yaitu sebesar 89,94%. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar masyarakat cukup tinggi.

##### 5.1.1.2.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada usia sekolah.

**Tabel 5.20: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)  
Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	APM SD/MI	90,71	91,27	92,12	89,03	81,76
2.	APM SMP/MTs	73,03	74,55	73,94	74,63	62,09
3.	APM SMA/MA/SMK	57,11	58,3	59,98	43,80	50,27

**Sumber: Dinas Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2011**

Realisasi APM SD/MI pada Tahun 2011 adalah 81,76%, adapun APM SMP/MTs Tahun 2011 adalah 62,09%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut ada yang bersekolah di luar Kabupaten Bantul atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK mencapai 50,27%. Angka ini lebih tinggi daripada Tahun 2010 yang mencapai 43,80%.

#### **5.1.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.21. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)  
Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	APK SD/MI	104,44	104,64	104,99	91,48	92,39
2.	APK SMP/MTs	95,25	96,22	96,41	91,68	87,97
3.	APK SMA/MA/SMK	76,3	78,13	80,53	65	69,88

**Sumber : Dikdas dan Dikmenof, 2011**

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai APK baik SD, SMP maupun SMA dari Tahun 2007– 2009 mengalami kenaikan namun pada Tahun 2010 nilai APK tersebut mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/MA/SMK pada Tahun 2010 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah), sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyaknya siswa yang bersekolah tidak pada usia sekolah. Pada Tahun 2011 ini nilai APK kembali naik untuk SD/MI dan SMA/MA/SMK. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah penduduk antara proyeksi dan hasil sensus.

#### 5.1.1.2.2.4. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu

Peningkatan kesehatan bayi mengalami tren meningkat yang ditandai dengan Angka Kematian Bayi (AKB) sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 secara umum cenderung mengalami penurunan yang disebabkan karena kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan cukup baik.

Dengan angka kematian bayi yang semakin menurun ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi semakin tinggi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat melalui Program Desa bebas 4 masalah Kesehatan (DB4MK) sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa menurunkan angka kematian bayi.

Dalam mempercepat penurunan kematian bayi, memerlukan keterpaduan lintas program antara lain yaitu Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI bagi keluarga miskin (Gakin), serta kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang memotivasi ibu hamil untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat melahirkan sehingga mendorong peningkatan pemberian ASI Eksklusif.

**Tabel 5.22 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

Uraian	2009	2010	2011
Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 th	142	120	114
Jumlah kelahiran hidup	11984	12185	13448
AKB	11,8	9,8	8,5
AKHB	988,2	990,2	991,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (\*AKHB = 1000 – AKB)

Program peningkatan dan Keselamatan Ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu pada Tahun 2011 ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2010.

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi karena kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara pencegahan selama kehamilan, bersalin dan nifas serta perawatan kesehatan dan cara pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam penanganan kegawatdaruratan. Untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan serta sumber daya manusia sangat diperlukan. Peningkatan partisipasi *stakeholders* terkait dan masyarakat dalam rangka menurunkan AKI melalui kegiatankegiatan, yaitu Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang sudah di integrasikan dengan Kelas Ibu, membentuk jejaring

Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) dan peningkatan Puskesmas mampu Penanganan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED) sehingga nantinya diharapkan semakin mendukung peningkatan status kesehatan ibu sehingga memberikan kontribusi dalam penurunan AKI.

Upaya mempercepat penurunan AKI memerlukan keterpaduan lintas program antara lain Program Perbaikan Gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Desa Siaga, *Ambulance* Desa dan Donor Darah.

**Tabel 5.23. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Bantul	47,14	140,13	158,29	82,07	111,2
DIY	105	104	104	99,8	
Nasional	228	214	201		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

#### 5.1.1.2.2.5. Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Pada Tahun 2010 usia harapan hidup Kabupaten Bantul mencapai 71,31 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Bantul sudah meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, kondisi di Kabupaten Bantul dari tahun 2009-2010 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 sebesar 73,75 dan pada Tahun 2010 sebesar 74,53. Angka IPM Tahun 2011 belum diterbitkan oleh BPS (Tabel 5.24).

**Tabel 5.24. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2007 – 2010 Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, dan Nasional**

Uraian	2007	2008	2009	2010
Kabupaten Bantul	72,78	73,38	73,75	74,53
Propinsi DIY	78,14	78,95	79,29	79,52
Nasional	70,58	71,17	71,76	72,27

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

#### 5.1.1.2.2.6. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara

berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Dari Tabel 5.25 dapat dilihat bahwa prosentase balita gizi buruk Kabupaten Bantul mengalami kenaikan pada Tahun 2010.

Hal ini dikarenakan penggantian definisi operasional dengan pembagi yaitu balita yang ditimbang saja, sedang definisi operasional lama dengan pembagi seluruh balita.

**Tabel 5.25. Prosentase Balita Gizi Buruk Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

Uraian	2009	2010	2011
Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	203	196	178
Jumlah balita (jiwa)	57785	63321	74275
Prosentase balita gizi buruk	0,35	0,31	0,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

#### 5.1.1.2.2.7. Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan dan Prosentase kemiskinan

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula  $(100 - \text{angka kemiskinan})$ . Angka kemiskinan adalah prosentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhankebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dari Tabel 5.26 dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 adalah 15,02% sehingga prosentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 84,98%. Angka ini lebih baik daripada Tahun 2010 dimana prosentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar 15,37%. Namun prosentase kemiskinan pada Tahun 2011 ini masih belum memenuhi target dalam RKPD Tahun 2011 yaitu sebesar 14,5%. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem dan mekanisme baku tentang sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan, lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ) secara operasional baru berada di tingkat kabupaten sedangkan ditingkat kecamatan belum terbentuk, kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan.

**Tabel 5.26 Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul**

Tahun	Jumlah KK Total	Jumlah KK Miskin	%	Jumlah Jiwa Total	Jumlah Jiwa Miskin	%
2010	258.463	41.480	16,17	842.928	129.614	15,37
2011	258.294	40.321	15,61	848.608	127.479	15,02

Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2012

Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin.

**Tabel 5.27. Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011**

No,	Kecamatan	Σ KKM					Jwa Miskin 2011
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Krotek	1.940	1.842	1.600	1.482	1.479	4.065
2	Sanden	1.474	1.454	1.337	1.238	1.296	3.991
3	Srandakan	2.326	2.026	1.790	1.305	1.312	4.262
4	Pandak	4.810	3.376	3.234	2.791	2.646	8.320
5	Bambanglipuro	3.269	2.685	2.168	1.611	1.551	4.835
6	Pundong	3.778	2.834	1.725	2.199	1.972	6.062
7	Imogiri	6.521	4.734	3.408	3.302	3.117	9.543
8	Dlingo	3.418	3.411	2.595	2.560	2.477	7.367
9	Jetis	4.599	3.654	2.982	2.629	2.951	8.811
10	Bantul	3.920	3.747	3.132	2.019	1.949	5.630
11	Palangan	2.312	2.183	1.886	1.672	1.537	4.713
12	Sedayu	3.780	2.984	2.604	2.596	2.545	9.573
13	Kasihan	5.333	4.845	4.427	3.948	3.842	12.738
14	Sewon	6.531	6.061	4.548	3.980	3.771	12.291
15	Plyungan	3.634	3.583	2.366	2.217	2.257	6.921
16	Pleret	4.449	2.838	2.270	1.817	1.817	5.382
17	Banguntapan	5.495	5.273	4.963	3.814	3.802	12.965
Jumlah		67.589	57.539	47.015	41.490	40.321	127.479

Sumber: BKK PP dan KB Bantul 2012

#### 5.1.1.2.2.8. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 mencapai 0,94 (Tabel 5.29). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 94% dari angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bantul memperoleh kesempatan kerja sedangkan 6% nya bekerja dan setengah menganggur.

**Tabel 5.28. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011**

No	Kecamatan	Angkatan Kerja 2010			Angkatan Kerja 2011		
		Bekerja	Manganggur	Satengah Manganggur	Bekerja	Manganggur	Satengah Manganggur
1	Kasihan	37.018	2.728	4.612	41.067	2.801	6.642
2	Sawon	38.508	4.088	6.915	37.509	2.645	6.220
3	Banguntapan	45.412	2.022	3.423	48.617	1.432	3.375
4	Bantul	22.338	4.230	7.170	22.301	4.288	10.095
5	Pejangan	17.417	982	1.626	19.159	701	1.650
6	Sedayu	24.451	1.315	2.225	24.614	1.121	2.643
7	Pandak	26.641	1.324	2.241	24.792	1.984	4.679
8	Srandakan	16.550	333	563	17.037	267	629
9	Sandan	9.509	2.747	4.647	10.312	2.437	5.880
10	Bambanglipuro	19.774	2.921	4.942	19.121	2.361	5.564
11	Pundong	14.406	481	815	14.838	366	910
12	Kotak	16.763	766	1.208	17.231	615	1.449
13	Jatis	23.314	1.579	2.669	20.338	2.007	4.726
14	Imogiri	32.904	1.668	2.802	32.745	1.468	3.453
15	Dlingo	18.713	1.181	2.000	20.177	1.176	2.771
16	Planis	17.516	792	1.344	18.614	2.888	6.796
17	Plyungan	19.047	1.005	1.700	19.129	588	1.385
	<b>JUMLAH</b>	<b>400.289</b>	<b>30.139</b>	<b>50.992</b>	<b>407.691</b>	<b>29.219</b>	<b>68.876</b>

Sumber : Disnakertrans

**Tabel 5.29. Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah penduduk yang bekerja	427.431	430.771	440.258	451.281	476.467
Jumlah angkatan kerja	461.593	466.136	471.112	481.420	505.786
Rasio Penduduk yang bekerja	0,93	0,92	0,93	0,94	0,94

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Secara kewilayahan pengangguran banyak dijumpai di wilayah sub-urban dan wilayah tengah Kabupaten Bantul. Dilihat dari komposisi penguasaan keterampilan penganggur terlihat bahwa sebagian terbesar penganggur belum memiliki ketrampilan spesifik yang siap untuk membuka usaha atau mencari kerja.

#### 5.1.1.2.2.9. Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang Tertangani)

Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas Kabupaten Bantul Tahun 2011 menurun menjadi 4,71 (data per Mei 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban semakin tercipta sehingga akan

menjadi salah satu pendukung dalam perencanaan pengembangan investasi di Kabupaten Bantul.

**Tabel 5.30 Angka Kriminalitas Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

Uraian	2009	2010	2011*
Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 th (kasus)	1.011	1.560	434
Jumlah penduduk	889312	911503	921263
Angka kriminalitas	11,24	17,11	4,71

Sumber: Polres Bantul (\*Data per Mei 2011)

#### 5.1.1.2.3. Fokus Seni budaya dan olah raga

Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Capaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2010 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.31. Capaian Pembangunan Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2010**

NO	Capaian Pembangunan	2010
1	Jumlah grup kesenian	1.193
2	Jumlah gedung kesenian	3
3	Jumlah klub olahraga	372
4	Jumlah gedung olahraga	52

Sumber : Kantor PORA dan Disbudpar, 2011

Kebudayaan merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata di Kabupaten Bantul bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan adanya sejumlah lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian. Lembaga budaya yang ada di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.32. Lembaga Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
1	Bintang Mataram	Jl. Ringin putih 500 B Perum Dapag Kotagede tlp. 378630	Org. Informal	Teater kontemporer
2	Badan Seni Mahasiswa Indonesia (BSMI)	Pusk III ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PD BOX 1210	Org. Informal	Musik tradisional, musik kontemporer, teater, tari, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra
3	Dagelan Mataram Baru (DMB)	Desa Korojnan Keramik Kasongan	Org. Informal	Teater tradisional
4	Forum Kesenian Indonesia	Jatawang, Bangunharjo Telp. 385137	Yayasan	Teater kontemporer, pendamping dan pelatihan sastra
5	Institut Seni Indonesia	ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PD BOX 1210	Org. Informal	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra, tradisi lisan, etnomuskologi, etnologi tari, sejarah seni, antropologi
6	Kelompok Jendela	Karsan No. 211 RT 08 / 05 Tirtonimolo Telp.08122965526	Org. Informal	Seni lukis kontemporer, seni patung kontemporer, instalasi, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropologi, lingkungan, hukum, politik dan sosial
7	Keroncong Sirtan Ramon	Desa Karsa, Tirtonimolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376654, 375039 Fax. 520105	Org. Informal	musik tradisional dan kontemporer
8	Komunitas Angkungan	Jl. Nirprayan 50 Ngastiharjo RT 01/RW 01 Kedi pos 55182	Org. Informal	Musik kontemporer, teater kontemporer, tari kontemporer, sastra, tradisi lisan, etnomuskologi, etnologi tari, sejarah seni, antropologi
9	Gantong Potans	Sobolman Gg. Kemuning no. 232 RT 06/ 29 Ngastiharjo 55182 Telp. 418261 Fax. 381217	Org. Informal	Keramik
11	Komunitas Kathoprak Lesung Yogyakarta	Perum Sowon Indah C-17 Kodi Pos 55188	Org. Informal	Teater tradisional
12	KUA Etnika Komunitas Seni	Desa Karsa, Tirtonimolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376654, 375039 Fax. 520105	Org. Informal	Musik tradisional dan kontemporer
13	Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Jl. Parangtritis km 6.5 Telp. 379935 Fax. 371233	Lembaga	musik tradisional dan kontemporer, teater tradisional dan kontemporer, pedalangan, seni grafiti dan seni kriya
14	Lembaga Rumah Dongang Indonesia	Saman RT 4 RW 15, Bangunharjo Telp. 387292	Yayasan	Musik kontemporer, teater kontemporer, teater boneka kontemporer, teater anak (wayang kardus kontemporer), seni lukis kontemporer, fotografi, sastra, tradisi lisan, permainan dan malanan anak

No	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
15	Lembaga Studi Kajian Desain	Jl. Sonopakis Lor No. 15 Telp. 378276	Lembaga	Desain
16	Lembaga Studi Pengembangan Musik	Perumahan Sawon Indah A-15 Kode Pos 55188 Telp. 380522	Yayasan	musik klasik barat, musikologi
17	Ngudya Wirama Paguyuban	Gadongkuning RT 04/ 03 Kode Pos 55198	Org. Informal	musik tradisional
18	Orkes Mahasiswa ISI Yogyakarta	ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 Jl. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Org. Informal	musik kontemporer dan klasik
19	Paguyuban Seni Kasanggit	Perum Pandowo Harjo Indah Jl. Makuta 14 Sawon	Org. Informal	musik tradisional, teater boneka tradisional, teater kontemporer, tari tradisional
20	PAKRIYO (Paguyuban Kriyawan Indonesia)	Tirta Bangunjwo Telp. 370542	Org. Informal	seni kriya
21	Pardiman Acapella	Dasa Karsa, Tirtomolo surut d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. Informal	musik tradisional dan kontemporer
22	Patak Umpet Rancang Grafis	Sorowajan 316 RT 12/ 29 Panggunharjo	Org. Informal	Desain, ilustrasi, animasi
23	Prababan RI Pudjo	Gandong RT 04/ 02 Bangunjwo Kode Pos 55181	Org. Informal	musik tradisional, teater boneka tradisional, wayang kulit puna
24	Sanggar Karota	Jablog Rt 01/ 08 Da. III Tirtomolo Kode Pos 55181	Lembaga	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, sastra, tradisi lisan
25	Sanggar/Balai Tari Wasana Nugraha	Dagaran, Jurug Bangunharjo RT 06/ 45 Sawon	Org. Informal	musik tradisional, tari tradisional dan kontemporer, tradisi lisan etnomuskologi, etno tari
26	Sekolah Mengengah Musik Negeri 2 (SMKN 2 Kasihan)	Jl. PG Medukismo Bugisan Telp. 374627, 380720	Instansi Pemerintah	musik universal
27	SENI : Jurnal Pengetahuan dan Pencapaian Seni	Jl. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Instansi Pemerintah	sastra, tradisi lisan, etnomuskologi, etnologi tari, sejarah seni, estika kritik seni
28	SMK Negeri 3 Kasihan (SMSR Yogyakarta)	Jl. PG Medukismo Bugisan Telp. 374647	Lembaga	Seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi kriya kayu dan keramik.
29	SMKNI Kasihan (SMKN YK)	Jl. PG Medukismo Bugisan Telp. 374667	Instansi Pemerintah	Musik tradisional, teater tradisional, teater kontemporer, teater boneka tradisional, sastra, etnologi tari dan sejarah seni
30	Studio ISI	Jurusan Teater FSP ISI Yogyakarta Jl. Parangtritis km 6.5 Perum Puspa Indah Sita. 18 - 20 Kasongan Kode Pos 375380	Yayasan	teater tradisional dan kontemporer
31	Study Saster dan Teater Sila	Jatawang, Bangunharjo Sawon Kode Pos 55187	Lembaga	teater tradisional, kontemporer dan sastra

No	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
		Telp. 387534		
32	Teater Alam	Jl. Sawo No. 6 Forum Winkerten Indah Telp. 377881	Org. Informal	teater kontemporer
33	Teater Gandik	Desa Karsa, Tirtonimolosari d.a. Yayasan Galang Jl. Bekung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 378654, 375030 Fax. 520105	Org. Informal	teater kontemporer
34	Teater Garasi Yogyakarta	Jl. Bugisan Selatan Tegal Kanongo RT 01/08 No. 36A Telp. 415844	Lembaga	teater kontemporer, fotografi, film, video, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropologi, gagasan teater
35	Teater Gema	STIE Karjasama Jl. Parangtritis km 3.5	Lembaga	musik kontemporer, teater kontemporer, musik klasik, puisi, seni lukis kontemporer
36	Teater Pelopor	Panggung, Argomulyo Kode Pos 55752	Org. Informal	Teater kontemporer, sastra, sejarah seni, teater dan biografi
38	Yayasan Pedepokan Seni Bagong Kusudharjo	Kamabaran RT 04/21 No. 148 Tamanrto 55183 Telp. 378384	Yayasan	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, sejarah seni
39	Yayasan Paduli Teksil Tradisional Indonesia (PETTRII)	Karangnongko RT 10/42 Panggunharjo Telp/fax 415177	Yayasan	seni kerajinan tekstil, seni kriya tekstil, sastra, tradisi lisan, etnologi tari, sejarah seni, antropologi, sejarah tekstil tradisional

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2011

Keberhasilan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari banyaknya prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat propinsi maupun nasional. Hal ini didukung dengan adanya klub olahraga dan pembangunan gedung olah raga di Kabupaten Bantul.

### 5.1.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Bantul sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat dibutuhkan standar baik jenis dan mutu yaitu Standar pelayanan Minimal. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah ada 13 bidang, meliputi:

1. bidang perumahan rakyat,
2. bidang pemerintahan dalam negeri,
3. bidang sosial,
4. bidang kesehatan,
5. SPM terpadu bagi sanksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja, bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan,
6. bidang lingkungan hidup,
7. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
8. bidang pendidikan dasar,

9. bidang ketenagakerjaan,
10. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
11. bidang ketahanan pangan,
12. bidang kesenian, dan
13. bidang kominfo.

Adapun capain Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2011 disajikan pada table berikut:

**Tabel 5. 33. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2011**

No	Indikator	2010		Pencapaian (%)	2011		TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011	
		Angka Absolut	Angka Absolut		Angka Absolut	Pencapaian (%)	Tahun	Nilai			
		Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Tahun	Nilai	Tahun	Nilai		
<b>BIDANG KESEHATAN</b>											
<b>A PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b>											
1	Cakupan kunjungan ibu hamil KIA	11.178	13.377	84%	13.783	14.508	95%	2015	95%	88	100
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	2.454	2.675	92%	2.321	2.000	80%	2015	80%	115	100
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	12.212	12.226	100%	13.846	13.846	100%	2015	90%	111	111
4	Cakupan pelayanan ibu Nifas	10.117	12.262	83%	12.475	13.846	90%	2015	90%	92	100
5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	1.260	1.828	69%	1.582	1.978	80%	2010	80%	87	100
6	Cakupan kunjungan bayi.	11.131	12.341	90%	11.868	13.166	90%	2010	90%	100	100
7	Cakupan Dosa/Kalurahan Universal Child Immunization (UCI).	75	75	100%	75	75	100%	2010	100%	100	100
8	Cakupan pelayanan anak balita.	43.845	63.321	69%	59.337	65.030	90%	2010	90%	77	100
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	3.714	3.714	100%	3.956	3.956	100%	2010	100%	100	100
10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.	48	48	100%	53	53	100%	2010	100%	100	100
11	Cakupan penjurangan kesehatan slow SD dan singkat.	12.313	12.748	97%	12.748	2.748	464%	2010	70%	138	663
12	Cakupan peserta KB Aktif.	116.507	147.940	79%	112.350	160.500	70%	2010	70%	113	100
13	Cakupan Perawatan dan penanganan penderita penyakit.										
	a. AFP rata per 100.000 penduduk < 15 th	9	4	225%	4	4	100%	2010	100%	225	100
	b. Peranan penderita pneumonia balita	434	1.307	33%	131	1.307	10%	2010	100%	33	10
	c. Perawatan pasien baru TB BTA +	285	563	51%	364	606	60%	2010	100%	51	60
	d. Penderita DB yg ditangani	1.557	1.557	100%	550	550	100%	2010	100%	100	100
	e. Perawatan penderita diare	1.325	72.454	2%	725	72.454	1%	2010	100%	2	1
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	200.713	222.087	94%	222.087	222.087	100%	2015	100%	94	100
<b>B Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>											

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	34.943	222.087	16%	33.450	222.087	15%	2015	100%	16	15
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	12	12	100%	12	12	100%	2015	100%	100	100
<b>C Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB</b>											
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	75	75	100%	75	75	100%	2015	100%	100	100
<b>D. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat</b>											
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	75	75	100%	60	75	80%	2015	80%	125	100
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>											
<b>A Pencegahan pencemaran air</b>											
1	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mematuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	4	7	57%	5	8	60%	2013	100%	57	63
<b>B Pencegahan pencemaran udara dan sumber</b>											
2	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mematuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	3	8	38%	5	8	60%	2013	100%	38	63
<b>C Pelayanan penyediaan informasi status</b>											
3	Prosentase (%) luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	340,6	1.328,1	26%	2.464	15.004	50%	2013	100%	26	50
<b>D Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat</b>											
4	Prosentase (%) jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindak lanjut	22	22	100%	12	17	71%	2013	100%	100	71

**BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
<b>A Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>											
1	Cakupan penastitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	760.958	760.958	100%	860.958	860.958	100%	2011	100%	100	100
2	Cakupan penastitan akta kelahiran	10.727	11.240	96%	8.000	8.000	100%	2011	100%	96	100
<b>B Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban</b>											
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kab/Kota	5.467	1.681	325%	5.467	1.681	325%	2015	50%	650	650
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran KB (Ketertarikan, ketertarikan, keindahan) di Kab/kab	486	710	68%	575	800	72%	2015	80%	86	90
<b>C Penanggulangan Bencana Kebakaran</b>											
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota	176,26	508,85	35%	176,26	508,85	35%	2015	25%	139	139
6	Tingkat waktu tanggap (response time rata) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMM)	12	12	100%	12	12	100%	2015	75%	133	133
<b>BIDANG SOSIAL</b>											
<b>I Pelaksanaan program/ kegiatan Bidang Sosial</b>											
<b>bidang sosial</b>											
<b>a pemberian bantuan sosial bagi penyandang</b>											
1	Prosentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan dasar	9.512	75.553	13%	7.300	75.553	10%	2015	80%	16	12
<b>b Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial</b>											
2	Prosentase (%) jumlah PMKS dalam 1 satu skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya	1.400	20.646	7%	1.300	20.646	6%	2015	80%	8	8
<b>II Penyediaan sarana dan prasarana sosial</b>											
<b>c penyediaan sarana prasarana penti sosial skala</b>											
3	Prosentase (%) penti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan keajahteraan sosial	15	26	58%	17	26	65%	2015	80%	72	82

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
<b>d</b> penyediaan sarana prasarana pelayanan luar											
4	Partisipasi (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSEM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan ke kesejahteraan sosial	7	8	88%	7	8	88%	2015	80%	148	148
<b>III</b> Penanggulangan korban bencana											
<b>c</b> bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/kota											
5	Partisipasi (%) Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	19.287	20.820	93%	25	291	9%	2015	80%	116	11
		19.137	20.670	93%							
<b>d</b> evakuasi korban bencana skala kab/kota											
6	Partisipasi (%) Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	2.176	2.176	100%	467	467	100%	2015	80%	125	125
<b>IV</b> Pelaksanaan dan pengembangan jaminan											
<b>e</b> penyelenggaraan jaminan sosial skala kab/kota											
7	Partisipasi (%) Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	398	7.130	6%	398	7.913	5%	2015	40%	14	13
<b>BIDANG KETAHANAN PANGAN</b>											
<b>A</b> Ketersediaan dan Cadangan Pangan											
1	Ketersediaan Energi Per Kapita (90%-2015)	1.750	2.200	80%	1.800	2.200	82%	2015	80%	99	102
	Ketersediaan Protein Per Kapita (90%-2015)	50	57	88%	52	57	91%	2015	80%	110	114
2	Penguatan Cadangan Pangan (60%-2015) cadangan pangan pemerintah	5	100	5%	20	100	20%	2015	60%	8	33
<b>B</b> Distribusi dan Akses Pangan											
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (90%-2015)	20	52	58%	40	52	77%	2015	60%	93	128
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (90%-2015)	9	29	31%	16	40	40%	2015	60%	52	67
<b>C</b> Panganoketegaman dan Keamanan Pangan											

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (90%-2015)	80,5	95	94%	83,5	95	88%	2015	95%	90	93
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (80%-2015)	16	20	80%	38	45	84%	2015	80%	100	106
<b>D</b> Penanganan kerawanan pangan											
7	Penanganan daerah rawan Pangan (60%-2015)	2	8	25%	3.521	3.214	110%	2015	80%	31	137
<b>BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK</b>											
<b>KORBAN KEKERASAN</b>											
<b>A</b> Penanganan Pengaduan/Laporan Korban											
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	47	64	73%	60	75	80%	2014	100%	73	80
<b>B</b> Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan											
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIPA dan PPT/PKT di Rumah Sakit.	24	47	51%	45	75	60%	2014	100%	51	60
<b>C</b> Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak											
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	21	47	45%	24	60	40%	2014	75%	45	53
4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	22	47	47%	24	60	40%	2014	75%	47	53
<b>D</b> Penegakan dan bantuan Hukum Bagi											

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	25	47	53%	30	60	50%	2014	80%	53	63
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	9	47	19%	12	60	20%	2014	50%	19	40
<b>E. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi</b>											
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	11	47	23%	12	60	20%	2014	50%	23	40
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	11	47	23%	60	60	100%	2014	100%	23	100
<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>											
<b>A. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)</b>											
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isirinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	921	150.988	1%	800	151.680	1%	2014	3,5%	574	664
2	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	120.583	151.654	80%	122.666	154.618	70%	2014	65%	122	122
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (5%)	13.174	151.654	9%	12.376	154.618	8%	2014	5%	174	58
4	Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	9.500	10.867	88%	9.666	10.948	88%	2014	70%	126	126
5	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	19.807	22.324	88%	19.657	22.324	88%	2014	87%	101	101
6	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKE) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	70	37	189%	62	37	168%	2014	90%	210	186
7	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	981	75	13	988	75	13	2014	100%	1308	1317
<b>B. Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi</b>											

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
8	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap Tahun.	33.650	43.238	78%	33.583	43.164	78%	2014	100%	78	78
<b>C. Penyediaan Informasi Data Mikro</b>											
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa 100% setiap tahun.	75	75	100%	75	75	100%	2014	100%	100	100
<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>											
<b>A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kab/Kota</b>											
1	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yg terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimum 3 km untuk D/M/dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.										
	IP-1.1	3	3	100%	3	3	100%	2015	80%	125	125
	IP-1.2	1	1	100%	1	1	100%	2015	80%	125	125
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang di lengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.										
	IP-2.1	361	376	96%	376	376	100%	2015	80%	120	125
	IP-2.2	374	376	99%	376	376	100%	2015	80%	124	125
	IP-2.3	101	107	94%	107	107	100%	2015	80%	118	125
	IP-2.4	105	107	98%	107	107	100%	2015	80%	123	125

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang di lengkapi dengan meja kursi yg cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen serta didik.										
	IP-3.1	79	107	74%	95	107	88%	2015	80%	92	111
	IP-3.2	60	107	56%	90	107	84%	2015	80%	70	105
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf pendidikan lainnya; di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.										
	IP-4.1	367	374	98%	374	374	100%	2015	80%	123	125
	IP-4.2	106	107	99%	107	107	100%	2015	80%	124	125
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.										
	IP-5.1	354	376	94%	376	376	100%	2015	80%	118	125
	IP-5.2	20	376	5%	24	376	6%	2015	80%	7	8
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran										
	IP-6.1	92	107	86%	107	107	100%	2015	80%	107	125
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memahului Kualifikasi S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan.										
	IP-7.1	376	376	100%	376	376	100%	2015	80%	125	125
	IP-7.2	376	376	100%	376	376	100%	2015	80%	125	125

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
8	Di setiap SD/MI tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuhnya diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.										
	IP-8.1	100	107	93%	107	107	100%	2015	80%	117	125
	IP-8.2	92	107	86%	107	107	100%	2015	80%	107	125
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.										
	IP-9.1	97	107	91%	107	107	100%	2015	80%	113	125
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolah SD/MI ber kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.										
	IP-10.1	264	376	70%	317	376	84%	2015	80%	88	105
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolah SMP/MTs ber kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.										
	IP-11.1	102	107	95%	105	107	98%	2015	80%	119	123
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pegawai sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.										
	IP-12.1	73	73	100%	73	73	100%	2015	80%	125	125
13	Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana dan melaksanakan log untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif										
	IP-13.1	55	107	51%	66	107	62%	2015	80%	64	77

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan										
	IP-14.1	355	367	97%	360	367	98%	2015	80%	121	123
	IP-14.2	105	107	98%	107	107	100%	2015	80%	123	125
<b>B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan</b>											
15	Setiap SDMI menyediakan buku teks yg sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.										
	IP-15.1	45.676	74.010	62%	46.500	74.010	62%	2015	80%	77	79
	IP-15.2	219	376	58%	245	376	65%	2015	80%	73	81
16	Setiap SMPMTs menyediakan buku teks yg sdh ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.										
	IP-16.1	29.510	34.661	85%	31.250	34.661	90%	2015	80%	106	113
	IP-16.2	88	107	82%	92	107	86%	2015	80%	103	107
17	Setiap SDMI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yg terdiri dari modul kerangka manusia, modul tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	30	376	8%	45	376	12%	2015	80%	10	15
18	Setiap SDMI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMPMTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi										
	IP-18.1	82	376	22%	115	376	31%	2015	80%	27	38

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
	IP-18.2	105	107	98%	107	107	100%	2015	80%	123	125
	IP-18.3	44	376	12%	54	376	14%	2015	80%	15	18
	IP-18.4	101	107	94%	104	107	97%	2015	80%	118	121
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.										
	IP-19.1	3.821	10.863	33%	7.242	10.863	67%	2015	80%	42	83
	IP-19.2	175	376	47%	350	376	93%	2015	80%	58	116
	IP-19.3	85	107	79%	102	107	95%	2015	80%	99	110
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tetap muka sebagai berikut: (a) Kelas I-III 18 jam/minggu (b) Kelas III 24 jam/minggu (c) Kelas IV-VI 27 jam/minggu (d) Kelas VII-IX 27 jam/minggu)										
	IP-20.1	376	376	100%	376	376	100%	2015	80%	125	125
	IP-20.2	107	107	100%	107	107	100%	2015	80%	125	125
21	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai kelantuyang berlaku.										
	IP-21.1	338	376	90%	355	376	94%	2015	80%	112	118
	IP-21.2	99	107	93%	104	107	97%	2015	80%	116	121
22	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus unik setiap mata pelajaran yang dimilikinya.										
	IP-22.1	5.088	5.107	98%	5.110	5.197	98%	2015	80%	122	123
	IP-22.2	355	376	94%	365	376	97%	2015	80%	118	121
	IP-22.3	103	107	96%	104	107	97%	2015	80%	120	121

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.										
	IP-23.1	4.435	5.107	85%	4.935	5.107	95%	2015	80%	107	119
	IP-23.2	280	376	77%	325	376	86%	2015	80%	96	108
	IP-23.3	80	107	83%	102	107	95%	2015	80%	104	119
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester										
	IP-24.1	335	376	89%	365	376	97%	2015	80%	111	121
	IP-24.2	103	107	96%	105	107	98%	2015	80%	120	123
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.										
	IP-25.1	5.197	5.197	100%	5.197	5.197	100%	2015	80%	125	125
	IP-25.2	376	376	100%	376	376	100%	2015	80%	125	125
	IP-25.3	107	107	100%	107	107	100%	2015	80%	125	125
26	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rakapulasinya kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kab/kota pada setiap akhir semester.										
	IP-26.1	376	376	100%	376	376	100%	2015	80%	125	125
	IP-26.2	434	434	100%	434	434	100%	2015	80%	125	125
	IP-26.3	49	49	100%	49	49	100%	2015	80%	125	125

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).										
	IP-27.1	376	376	100%	376	376	100%	2015	80%	125	125
	IP-27.2	376	376	100%	376	376	100%	2015	80%	125	125
	IP-27.3	376	376	100%	376	376	100%	2015	80%	125	125
<b>BIDANG KETENAGAKERJAAN</b>											
<b>A. Pelayanan Pelatihan Kerja</b>											
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	144	270	53%	192	360	53%	2016	100%	53	53
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	332	500	66%	272	400	68%	2016	100%	66	68
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	15	60	25%	15	60	25%	2016	100%	25	25
<b>B. Pelayanan Pelatihan Kerja</b>											
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang dilampirkan	1.829	13.229	14%	1.050	7.000	15%	2016	70%	20	21
<b>C. Pelayanan Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial</b>											
5	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	26	26	100%	26	26	100%	2016	60%	167	167
<b>D. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek</b>											
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	18.956	32.415	58%	19.156	32.179	60%	2016	50%	117	119
<b>E. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>											
7	Besaran Pemantauan Perusahaan	181	570	32%	181	570	32%	2016	45%	71	71
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	36	368	10%	38	368	11%	2016	50%	20	21
<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
<b>I Sumber Daya Air</b>											
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	3.521	3.214	110%	3.521	3.214	110%	2014	100%	110	110
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	44.829,84	57.109,50	78%	44.829	57.109	78%	2014	70%	111	112
<b>II Jalan</b>											

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
3	(Aksesibilitas) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	895.725	895.725	100%	895.725	895.725	100%	2014	100%	100	100
4	(Mobilitas) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan.	9,837	3	3,28	9,837	3	328%	2014	100%	328	328
5	(Keselamatan) Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkehadapan dengan selamat.	618.075	895.725	69%	626.075	895.725	70%	2014	60%	115	116
6	(Kondisi jalan) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	618.075	895.725	69%	626.075	895.725	70%	2014	60%	115	116
7	(Kecepatan) Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	618.075	895.725	69%	626.075	895.725	70%	2015	60%	115	116
<b>III Air Minum</b>											
8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdistribusi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	65.400.750	865.206	76	67.485.244	876.172	77	2014	65,34%	11.586	11.785
<b>IV Air Limbah Permukiman</b>											
9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. (60%-2014)	470.913	856.206	55%	9.520	15.868	60%	2014	60%	92	100
10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (5%-2014)	8.000	856.206	1%	12.300	876.172	1%	2014	5%	19	28
<b>IV Persampahan</b>											
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (20%-2014)	9.125	272.965	3%	9.125	276.965	3%	2014	20%	17	16
12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. (70%-2014)	148.920	2.345.400	6%	164.250	2.402.960	7%	2014	70%	9	9

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
<b>IV Drainase</b>											
13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lobi dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.	332.642	665.284	50%	332.642	665.284	50%	2014	50%	100	100
<b>V. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan</b>											
14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	3	88	3,4%	4	88	4,5%	2014	10%	34	45
<b>VI. Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>											
15	(IMB) Tersedianya masyarakat dalam (Harga Satuan Bangunan) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	1.702	1.922	89%	1.562	2.410	65%	2014	50%	177	130
16		1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%	2014	100%	100	100
<b>VII. Jasa Konstruksi</b>											
17	Penerbitan IJUK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	46	48	96%	86	149	58%	2014	100%	96	58
18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	3,00	6,00	50%	3,00	6,00	50%	2015	100%	50	50
<b>VIII. Penataan Ruang</b>											
19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (kab/koc ; kelurahan)	96,00	123,00	78%	115,20	123,00	94%	2014	90%	87	104
20	Tertindakannya peninjauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang.	1,00	2,00	50%	1,00	1,00	100%	2014	80%	63	63

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
21	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rancane rincinya.	986	3.452	29%	1.183,20	3.452	34%	2014	100%	29	34
22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	21	21	100%	15,00	15	100%	2015	100%	100	100
23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	5.243	19.500	26,0%	5.234	19.500	26,8%	2015	25%	26,0%	26,0%
note: 1) Anggaran 2010 dan 2011 terkait IMB (IK 15) dan penerbitan IUK (IK 16) menjadi satu ke satuan anggaran pada Sekretariat Dinas dan bidang-bidang di Dinas Perumahan											
<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>											
<b>A. Rumah Layak Huni dan Terjangkau</b>											
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	178	357	50%	214	357	60%	2015	80%	62,32493	74,782016
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	209	357	59%	251	357	70%	2015	80%	73,179272	87,8151261
<b>B. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang</b>											
3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	27	39	69%	32	39	82%	2015	80%	86,538482	103,846154
<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
<b>A. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional</b>											
1	Polaksanaan,Diseminasi dan Pendistribusian informasi nasional melalui:										
a	media massa seperti majalah, radio, dan televisi (12x/th)	106	106	100%	-	-	#DW/ol	2014	12,kali/Th	883	#DW/ol
b	media baru seperti website (media online) setiap tahun	306,kali/Th	288,kali/Th	106%	70,kali/Th	250,kali/Th	28%	2015	setiap hari	100	#VALUE!
c	media tradisional seperti poturjukan rakyat (12x/th)	17	17	100%	17	17	100%	2015	12,kali/Th	8	8

No	Indikator	2010			2011			TARGET		Capaian SPM Tahun 2010	Capaian SPM Tahun 2011
		Angka Absolut		Pencapaian (%)	Angka Absolut		Pencapaian (%)	Tahun	Nilai		
		Pembilang	Penyebut		Pembilang	Penyebut					
d	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya. (12x/th) per kecamatan	17	17	100%	17	17	100%	2015	12,kali/Th	8	8
e	Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan balho. (12x/th)	32	32	100%	25	25	100%	2010	12,kali/Th	267	8
<b>2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat</b>											
a	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1	1	100%	1	1	100%	2015	100%	100	100
<b>BIDANG KESENIAN</b>											
<b>A. Perlindungan, Pengembangan, dan</b>											
1	Cakupan Kajian Seni	15	15	100%	8	15	53%	2014	50%	200	107
2	Cakupan Fasilitas Seni	7	7	100%	2	7	29%	2014	30%	333	95
3	Cakupan Galeri Seni	4	4	100%	3	4	75%	2014	75%	133	100
4	Misi Kesenian	1	1	100%	3	4	75%	2014	80%	125	94
<b>B. Sarana dan Prasana</b>											
1	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	4	8	50%	2	8	25%	2014	25%	200	100
2	Cakupan Tempat	6	8	75%	1	2	50%	2014	100%	75	50
3	Cakupan Organisasi	2	3	67%	1	3	33%	2014	34%	196	98

Sumber : RKPD Kabupaten Bantul, 2012

Aspek pelayanan umum juga ditinjau dari fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, lingkungan

hidup, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan UKM, kependudukan, ketenagakerjaan, dan keluarga berencana.

### 5.1.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 5.1.1.3.1.1. Pendidikan

##### A. Rasio Ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Peningkatan jumlah sarana sekolah dari Tahun 2007 – 2011 menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas telah cukup memadai. Pada jenjang sekolah menengah telah dilakukan inovasi berupa dua SMA mencapai RSBI sekaligus ISO yaitu SMA Negeri 1 Kasihan dan SMA 1 Bantul sedangkan SMK RSBI yaitu SMK Negeri 1 Bantul dan SMK 2 Kasihan. Dari seluruh jumlah SMK ada lima SMK yang telah memiliki standar ISO yaitu SMKN 1 Bantul, SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, SMKN 1 Sedayu, dan SMKN 1 Sewon.

**Tabel 5.34 Ketersediaan Sekolah Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah gedung sekolah SD/MI	372	372	372	376	380
2.	Jumlah gedung sekolah SMP/MTs	106	106	107	107	107
3.	Jumlah gedung sekolah SMA/MA/SMK	76	79	79	79	86

Sumber: Dikdas & Dikmenof Kabupaten Bantul

**Tabel 5.35 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 16-18 th	Rasio
1	Kec. Sewon	28	8.429	301	9	4.317	480	8	5.340	669
2	Kec. Pandak	24	4.595	191	7	2.353	336	2	2.186	1093
3	Kec. Pandang	20	2.883	144	4	1.476	369	2	1.409	704,5
4	Kec. Bantul	25	4.998	200	12	2.580	213	16	2.700	169
5	Kec. Sandan	16	2.773	173	6	1.420	237	3	1.283	428
6	Kec. Krotak	14	2.585	185	3	1.324	441	3	1.270	423
7	Kec. Sedayu	23	3.815	166	3	1.954	651	7	2.038	291
8	Kec. Dlingo	27	3.716	138	9	1.903	211	3	1.540	516
9	Kec. Jatis	22	4.943	225	5	2.532	506	1	2.343	2343
10	Kec. Pejangan	16	3.289	206	3	1.684	561	2	1.473	736
11	Kec. Bambanglipuro	17	3.380	199	7	1.731	247	5	1.500	320
12	Kec. Piyungan	20	4.769	238	7	2.442	340	8	2.415	302
13	Kec. Srandakan	16	2.608	163	3	1.336	445	3	1.321	440
14	Kec. Banguntapan	30	9.795	327	9	5.017	557	7	6.106	872
15	Kec. Imogiri	25	5.293	212	7	2.711	387	5	2.465	493
16	Kec. Kasihan	35	9.472	271	9	4.851	539	7	5.755	822
17	Kec. Plomat	20	4.365	218	6	2.235	373	4	2.145	536
	Jumlah	378	81.708	109	109	41.840	66	86	43.413	505

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Non Formal Kabupaten Bantul

##### B. Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar /menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

**Tabel 5.36. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul**

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	5.553	5.439	5.221	5.426	6.226
1.2.	Jumlah Murid	70.326	70.264	70.808	74.010	74.324
1.3.	Rasio	78,96	77,41	73,73	73,31	83,76
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	3.223	3.224	3.169	3.072	3.727
2.2.	Jumlah Murid	29.132	29.155	29.050	34.661	33.041
2.3.	Rasio	110,63	110,58	109,09	88,63	11,28
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah Guru	2.940	3.062	3.215	3.189	3334
3.2.	Jumlah Murid	23.031	24.081	24.769	27.778	29.478
3.3.	Rasio	127,65	127,15	129,80	114,80	113,1.

Sumber : Dikdas,Dikmenof NF 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari pada Tahun 2011 dalam 1000 murid terdapat 83,76 orang guru di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 11,28 orang guru dalam 1000 murid. Tahun 2007 hingga Tahun 2011 jumlah guru dan murid semakin bertambah, namun rasio guru murid pendidikan dasar semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru di tingkat pendidikan dasar semakin kecil (adanya pensiun). Namun secara kualitas dengan tingginya guru yang lulus sertifikasi (SD sebesar 37,55%, SMP sebesar 40,81%, SMA/MA dan 42,86% SMK) menunjukkan peningkatan mutu guru yang semakin baik. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah besarnya rasio guru murid juga semakin kecil, namun jumlah ketersediaan guru masih mencukupi. Peningkatan mutu guru lebih diarahkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi.

#### 5.1.1.3.1.2. Kesehatan

##### A. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita (Permendagri 54 Tahun 2010).

**Tabel 5.37. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul**

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah posyandu	1101	1113	1113	1123	1123
2.	Jumlah balita	61.029	59.097	57.785	63321	74275
3.	Rasio (per 1000 balita)	18,04	18,83	19,26	17,73	15,12

Sumber : Dinkes 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2011 rasio posyandu per 1000 balita sebesar 15,12 berarti dalam 1000 balita terdapat 17,72 posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 posyandu melayani 66,14 balita. Rasio tersebut menunjukkan bahwa dari segi kuantitas jumlah posyandu di Kabupaten Bantul sudah mencukupi. Sesuai dengan tingkat penyebarannya jumlah posyandu hampir merata di 17 kecamatan. Ada 2 kecamatan dimana pelayanan posyandunya melebihi 100 balita yaitu kecamatan Piyungan dan Kecamatan Pleret (Tabel 5.38)

**Tabel 5.38 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio (jumlah posyandu/ jumlah balita)	1 posyandu melayani x balita
1	Kec. Sewon	117	8482	13,79	72,49
2	Kec. Pandak	62	3669	14,57	68,63
3	Kec. Pundong	66	2386	23,05	43,38
4	Kec. Bantul	89	4682	18,97	52,72
5	Kec. Sanden	63	2236	28,17	35,49
6	Kec. Kretek	53	3013	17,59	56,95
7	Kec. Sedayu	67	3573	18,75	53,33
8	Kec. Dlingo	74	2726	27,15	36,84
9	Kec. Jetis	72	4238	16,99	58,86
10	Kec. Pajangan	36	2727	13,20	75,75
11	Kec. Bambanglipuro	46	2904	15,49	64,53
12	Kec. Piyungan	38	4159	9,14	109,45
13	Kec. Srandakan	44	2137	20,59	48,57
14	Kec. Banguntapan	120	10629	11,29	88,57
15	Kec. Imogiri	69	4593	15,02	66,56
16	Kec. Kasihan	95	9173	10,36	96,56
17	Kec. Pleret	34	4059	8,38	119,38
	Jumlah	1123	74275	15,12	66,14

Sumber: Dinas Kesehatan 2012 Kabupaten Bantul

#### B. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Hasil Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus (KIA, Bedah), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Sarana Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan Balai Pengobatan-Rumah Bersalin. Selain fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, fasilitas

pelayanan kesehatan milik swasta juga mengalami perkembangan yang cukup pesat pada Tahun 2011.

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin banyak sudah pasti diikuti dengan semakin banyak pula tenaga kerja di sektor kesehatan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki Surat Ijin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya (lihat Tabel 5.39 dan Tabel 5.40)

**Tabel 5.39 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2009 (unit)	2010 (unit)	2011 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	5	9	9
2	Rumah Sakit Bersalin	3	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (Bedah) KIA)	2	3	23
4	Balai Pengobatan	66	78	70
5	Rumah Bersalin	27	32	33
6	Apotek	72	100	108
7	Toko Obat	-	4	3
8	Industri Peracik Batra	9	13	13
9	Laboratorium	-	4	4
10	Optik	-	8	11
11	Posyandu	1123	1123	1123
12	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16
13	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11
14	Puskesmas Pembantu	67	67	67
15	Puskesmas Keliling	27	27	27

Sumber: Dinas Kesehatan, 2012

Sarana kesehatan milik Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2011 meliputi Puskesmas sebanyak 27 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 67 unit, Poliklinik sebanyak 70 unit dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul

**Tabel 5.40 Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2011**

No	Jenis	2009	2010	2011
2	Dokter Umum	94	282	286
3	Dokter Gigi	61	82	74
4	Apoteker	9	146	191
5	Bidan	256	339	392
6	Perawat	319	679	1001
7	Farmasi	36	54	98
8	Gizi	39	61	76
9	Teknis Medis	75	46	233
10	Sanitasi	54	51	96
11	Kesmas	33	44	78

Sumber: Dinas Kesehatan, 2012

\*) data berdasarkan sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit)

Adapun persebaran puskesmas, poliklinik dan pustu di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.41. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Puskesmas	Poliklinik	Pustu
1	Kec. Sewon	2	6	4
2	Kec. Pandak	2	2	3
3	Kec. Pundong	1	1	3
4	Kec. Bantul	2	8	5
5	Kec. Sanden	1	4	3
6	Kec. Kretek	1	4	4
7	Kec. Sedayu	2	3	5
8	Kec. Dlingo	2	3	5
9	Kec. Jatis	2	6	3
10	Kec. Pejangan	1	5	4
11	Kec. Bambanglipuro	1	4	3
12	Kec. Piyungan	1	4	3
13	Kec. Srandakan	1	4	2
14	Kec. Banguntapan	3	3	7
15	Kec. Imogiri	2	4	7
16	Kec. Kasihan	2	7	2
17	Kec. Pleret	1	2	4
	Jumlah	27	70	67

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

#### 5.1.1.3.1.3. Lingkungan Hidup

##### A. Persentase penanganan sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Sitimulyo kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan *sanitary landfill* untuk sampah residu akhir.

Jumlah volume produksi sampah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sebesar 2.142,04 m<sup>3</sup>/hari dengan jumlah sampah yang ditangani sebesar 113,33 m<sup>3</sup>/hari (UPTD KP3 DPU, 2011). Jadi persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah hanya sedikit (5,29/6%), diantaranya karena kurangnya armada pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah di Kabupaten Bantul masih harus ditangani dengan lebih baik agar tidak menyebabkan penumpukan volume sampah dan pencemaran lingkungan. Sebagian sampah yang tidak terlayani dilakukan pengelolaan oleh masyarakat, antara lain dimanfaatkan untuk pupuk tanaman.

Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal

atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon, IPAL Pleret dan IPAL Bambanglipuro.

**Tabel 5. 42 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011  
Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2011
1	Jumlah sampah yang ditangani (m <sup>3</sup> /hari)	113,33
2	Jumlah volume produksi sampah (m <sup>3</sup> /hari)	2142,04
3	Persentase	5,2916

Sumber: DPU, 2011

Pada Tahun 2011 ini jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R adalah 30% (dari 75 desa). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, namun diharapkan dengan semakin meningkatnya jumlah jejaring sampah dan bank sampah menjadi icon nasional dan program-program penanganan persampahan diharapkan pada tahun mendatang volume persampahan akan semakin tertangani dengan baik.

#### B. Penduduk berakses air minum

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 80% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 17%). Sumur gali merupakan sarana yang paling mudah untuk mendapatkan air karena muka air tanah relatif dangkal, sedangkan sumber air dari PDAM membutuhkan unit pengolah dengan energi listrik cukup besar, sehingga berdampak pada harga satuan air yang relative mahal.

Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipa-an Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan.

Dari kegiatan pengadaan air bersih ini banyak wilayah yang sudah terlayani air bersih. Adapun jumlah penduduk yang mendapatkan air bersih pada Tahun 2010 sebesar 688.449 jiwa dengan persentase penduduk berakses air bersih sebesar 75,31% yang bersumber dari air sumur dan 19,94% yang bersumber dari jaringan PDAM. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air minum disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.43. Persentase penduduk berakses air bersih Tahun 2009 – 2010 di Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	667.209	686.449
2.	Jumlah penduduk	899.312	911.503
3.	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	74,19	75,31

Sumber : DPU 2011

**Tabel 5.44 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapat Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010
1	Jumlah penduduk yg mendapatkan akses air minum	143.678	181.754
2	Jumlah penduduk	899.312	911.503
3	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	15,97	19,94

Sumber: PDAM Bantul 2011

#### 5.1.1.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

##### A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Pada Tahun 2011 panjang jaringan jalan beraspal dengan kondisi mantap sepanjang 636,875 km atau 95,71%. Hal ini menunjukkan peningkatan pelayanan infrastruktur jalan yang semakin baik.

Namun demikian pada Tahun 2011 masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi sedang rusak, rusak, ataupun rusak berat dimana proporsinya menurun dari tahun ke tahun.

Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 5.45 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul**

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kondisi Baik	322,61	328,61	365,56	386,25	407,25
2.	Kondisi Sedang Rusak	311,27	316,87	295,07	285,58	285,58
3.	Kondisi Rusak	217,95	209,65	195,20	180,90	159,9
4.	Kondisi Rusak Berat	48,00	44,70	44,00	43,00	43,00
5.	Jalan Kabupaten	899,83	899,83	899,83	895,73	895,725
	Jalan Propinsi	154,05	146,00	146,00	136,05	136,05
	Jalan Nasional	42,24	42,24	42,24	30,58	30,58
	Jumlah Jalan secara keseluruhan	1.096,12	1.088,07	1.088,07	1.062,36	1.062,36

Sumber : DPU 2011

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status, dan kelas.

Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 lebih kurang 1.062,36 km. Di Kabupaten Bantul terdapat 11 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi, dengan panjang lebih kurang 136,05 km (Tahun 2011). Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap, sehingga sangat mendukung peningkatan perekonomian dan akses hubungan antar wilayah. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, dan lainnya.

#### B. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi di Kabupaten Bantul terdiri dari jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Pada Tahun 2011, kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik, meningkat dari 339.345,53 meter (82,50%) pada Tahun 2010 menjadi 341.402,17 meter (83,00%) atau terdapat peningkatan 2.056,64 meter (0,61%) (lihat Tabel 5.46)

**Tabel 5.46 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik tahun 2007-2011**

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kondisi Baik	322,61	328,61	365,56	386,25	407,25
2.	Kondisi Sedang Rusak	311,27	316,87	295,07	285,58	285,58
3.	Kondisi Rusak	217,95	209,65	195,20	180,90	159,9
4.	Kondisi Rusak Berat	48,00	44,70	44,00	43,00	43,00
5.	Jalan Kabupaten	899,83	899,83	899,83	895,73	895,725

Sumber: Dinas SDA, 2012

\*) Target adalah target lima tahunan

Panjang total saluran primer-sekunder kewenangan pemerintah adalah 371.634 m. Berdasarkan data Bulan Desember 2011 terdapat 159 Daerah Irigasi (DI) dengan luas oncoran sebesar 16.133,05 hektar, terdiri dari irigasi teknis pada sembilan DI dengan luas oncoran 4.979,32 hektar, irigasi semi teknis pada 98 DI dengan luas oncoran 9.159,75 hektar, dan irigasi sederhana pada 52 DI dengan luas oncoran 1.993,98 hektar.

Pemenuhan air irigasi pada lahan daerah irigasi (lihat Tabel 5.47) meningkat dari 12.727,50 ha (78%) pada Tahun 2010 menjadi 13.380,19 ha (82%) pada Tahun 2011 atau lebih luas 489,52 ha (3,8%) dari target 12.890,67 ha (79%).

**Tabel 5.47 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2007-2011**

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Rencana (m)	%	Realisasi (m)	%
2007	11.911,64	73	12.074,81	74
2008	12.074,81	74	12.074,81	74
2009	12.237,98	75	12.401,16	76
2010	12.645,92	77,5	12.727,50	78
2011	12.890,67	79	13.380,19	82

Sumber: Dinas SDA, 2012

### C. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Sarana tempat ibadah di Kabupaten Bantul meliputi: Masjid, Gereja, dan Pura. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2010 dan 2011 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.48. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Bantul**

NO	Bangunan tempat ibadah	2010			2011		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Masjid	1715	846.850	1 : 493	1.719	846.850	1:493
2.	Gereja	44	37.462	1 : 851	46	37.999	1:826
3.	Pura	2	667	1 : 333	2	677	1:339
4.	Vihara	-	-	-	-	370	-
5.	Kelenteng	-	-	-	-	-	-
6.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian Agama Kab. Bantul, 2011

Mayoritas penduduk Bantul beragama Islam, karena itu persebaran tempat ibadah Masjid di masing-masing kecamatan hampir merata (tabel 5.48) Tempat ibadah gereja juga tersebar di masing-masing kecamatan, hanya di kecamatan Sanden dengan pemeluk sebanyak 393 dan kecamatan Piyungan dengan pemeluk sebanyak 1618 yang belum mempunyai gereja. Disamping itu sudah terdapat pura 2 unit namun untuk fasilitas vihara masih belum ada.

**Tabel 5.49. Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Tahun 2011 Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Masjid		Gereja		Pura		Vihara	
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk
1	Kec. Sewon	105	80,655	1	2,910	1	75	-	32
2	Kec. Pandak	74	49,884	3	1,493	-	11	-	2
3	Kec. Pundong	78	32,337	2	866	-	-	-	-
4	Kec. Bantul	94	59,253	3	3,407	-	22	-	-
5	Kec. Sanden	109	36,246	-	393	-	5	-	3
6	Kec. Krotek	62	30,734	2	1,790	-	33	-	-
7	Kec. Sedayu	87	43,611	4	4,669	-	2	-	2
8	Kec. Dlingo	97	42,490	1	53	-	-	-	-
9	Kec. Jetis	103	51,075	3	1,728	-	3	-	3
10	Kec. Pajangan	41	32,712	2	932	-	-	-	-
11	Kec. Bambanglipuro	56	42,064	4	2,608	-	5	-	-
12	Kec. Piyungan	144	41,320	-	1,618	-	-	-	-
13	Kec. Srandakan	57	34,232	2	321	-	-	-	-
14	Kec. Banguntapan	220	86,420	9	4,794	1	234	-	81
15	Kec. Imogiri	111	61,547	3	927	-	-	-	-
16	Kec. Kasihan	245	79,722	7	9,418	-	267	-	247
17	Kec. Pleiët	36	42,548	-	72	-	20	-	-
	Jumlah	1,719	846,850	46	37,999	2	677	0	370

Sumber: Kementerian Agama Bantul, 2012

D. Persentase rumah tinggal bersanitasi

**Tabel 5.50. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2011
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	168.949
2	Jumlah rumah tinggal	213.532
3	Persentase	79,1

Sumber: DPU 2011

E. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

**Tabel 5.51. Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Tempat Pemakaman Umum (TPU)		Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)		Tempat Pemakaman Khusus (TPK)		Lain-lain		Jumlah Total	
		Jmh	Luas(m <sup>2</sup> )	Jmh	Luas(m <sup>2</sup> )	Jmh	Luas(m <sup>2</sup> )	Jmh	Luas(m <sup>2</sup> )	Tempat Pemakaman	Luas(m <sup>2</sup> )
1	Kec. Sewon	189	255.270	-	-	1	210	-	-	190	255.480
2	Kec. Pandak	144	170.815	-	-	-	-	-	-	144	170.815
3	Kec. Pundong	112	64.665	7	700	1	100	-	-	120	65.465
4	Kec. Bantul	180	184.180	14	7.325	-	-	2	250	196	191.755
5	Kec. Sanden	81	28.931	-	-	-	-	-	-	81	28.931
6	Kec. Krotek	120	288.000	-	-	6	1.500	-	-	126	289.500
7	Kec. Sedayu	119	340.650	7	4.500	-	-	-	-	126	345.150
8	Kec. Dlingo	27	143.530	-	-	-	-	-	-	27	143.530
9	Kec. Jetis	169	129.812	1	1.000	2	450	1	40	173	131.302
10	Kec. Pajangan	83	898.460	-	-	-	-	5	7.650	88	907.110
11	Kec. Bambangpuro	140	178.500	-	-	1	1.500	-	-	141	180.000
12	Kec. Piyungan	60	980.550	2	15.000	-	-	-	-	62	995.550
13	Kec. Strandakan	81	75.200	-	-	1	950	-	-	82	76.150
14	Kec. Banguntapan	163	148.037	6	1.620	1	2.500	-	-	170	152.157
15	Kec. Imogiri	121	179.450	6	54.800	3	4.700	-	-	130	238.950
16	Kec. Kasihan	115	362.460	13	17.135	3	1.200	-	-	131	380.795
17	Kec. Plei	53	141.371	9	1.917	3	835	-	-	65	144.123
	Jumlah	1.957	4.570.881	65	103.997	22	13.945	8	7.940	2.052	4.696.763

Sumber : Kecamatan 2011

F. Tempat pembuangan sampah (TPS)

Jumlah tempat pembuangan sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebanyak 115 unit dengan daya tampung 380 ton dengan jumlah penduduk sebesar 921.263 jiwa.

**5.1.1.3.1.5. Penataan Ruang**

A. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul meliputi daerah sekitar sungai, taman kota, lapangan olahraga dan makam, jalan, serta *hinterland*. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan taman hijau seluas 120 m<sup>2</sup> di Komplek Perkantoran Baru Pemerintah Kabupaten Bantul. Pembuatan taman hijau

bertujuan untuk menambah luasan RTH, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktivitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan.

#### B. Jumlah Bangunan Ber-IMB

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Di Kabupaten Bantul, jumlah bangunan ber-IMB dari Tahun 2009 sampai Tahun 2011 berturut-turut adalah 50.000, 26.015, dan 16.000 (DPU, 2011). Jumlah IMB dari tahun 2009 sampai Tahun 2011 cenderung mengalami penurunan, hal ini terkait dengan telah selesainya proses rekonstruksi gempa.

#### 5.1.1.3.1.6. Perhubungan

##### A. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis. Angkutan umum yang lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul. Adapun jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Bantul dari Tahun 2007 – 2010 cenderung mengalami penurunan (Tabel 5.52).

**Tabel 5.52 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah penumpang Bis	4.229.232	3.150.908	3.054.892	2.963.296
2.	Jumlah penumpang Kereta api	-	-	-	-
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	-	-	-	-
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	-	-	-	-
5.	Total Jumlah Penumpang	4.229.232	3.150.908	3.054.892	2.963.296

Sumber : Dinas Perhubungan, 2011

**Tabel 5.53 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2010 Kabupaten Bantul**

No	Angkutan Umum	2010		
		Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum		27	
2	Mobil bus		736	
3	Mobil barang	Pick up	6,769	
		Truck	3,589	
4	Kereta gandengan		14	
5	Mobil 8 Ton		152	
6	Taksi		146	
7	Khusus		9	
	Jumlah		11,442	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2011

Penurunan penggunaan angkutan umum di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kemudahan memperoleh kendaraan pribadi (terutama sepeda motor), keterbatasan jalur angkutan umum yang ada, ketidaknyamanan menggunakan angkutan umum. Hal ini terbukti dengan kenaikan jumlah kendaraan pribadi terutama roda dua.

#### B. Jumlah Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Jumlah izin trayek di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.54. Jumlah Ijin Trayek Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	Izin Trayek perkotaan	13	13	13	13
2.	Izin Trayek pedesaan	8	8	8	8
3.	Jumlah Ijin Trayek	21	21	21	21

Sumber : Dinas Perhubungan, 2011

#### C. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai. Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Adapun jumlah terminal bus sampai Tahun 2011 sebanyak 4 terminal (Tabel 5.55).

**Tabel 5.55 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	4	4	4
	Jumlah	3	3	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan, 2011

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan local maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

- a. terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
- b. terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;
- c. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; dan
- d. terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

### 5.1.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 5.1.1.3.2.1. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Bantul difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Pada Tahun 2011 investasi di Kabupaten Bantul lebih didominasi oleh investor asing yang mencapai jumlah 53 investor (aktif 30) dibandingkan dengan investor dalam negeri yang hanya berjumlah 15 (aktif 6). Dihitung berdasarkan nilai investasinya, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 10.863.379.840,- dan US\$ 17.719.988 sedangkan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 200.172.644.150,71,-. Selain itu, penanaman modal asing juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.969 orang yang terdiri dari 56 tenaga kerja asing dan 6.913 orang WNI. Adapun investor dalam negeri hanya mempekerjakan tenaga kerja sejumlah 3.260 orang. Perlu diketahui bahwa data investasi mengalami perubahan yang signifikan karena sebelum Tahun 2011, pencatatan hanya berdasarkan legal formal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berupa surat persetujuan, izin prinsip, dan izin usaha. Sedangkan mulai Tahun 2011, pengumpulan data juga berdasarkan verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk mengetahui realisasi penanaman modal dan perkembangan usaha sehingga dapat diketahui aktif tidaknya kegiatan penanaman modal tersebut. Pada Tahun 2011 tercatat lima PMA yang mengajukan izin penanaman modal di Kabupaten Bantul dan dua di antaranya telah memperoleh izin serta melaporkan kegiatan usahanya (Tabel 5.56).

**Tabel 5.56 Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Tahun	Jenis	Jumlah Investor		Tenaga Kerja		Nilai Investasi		Ket.
			Aktif	Pasif	WNA	WNI	US\$	Rp	
1	2010	PMA	51		117	9.513	29.730.328	266.278.885.773	Data termasuk rencana
		PMDN	13		13	3.510	-	173.438.101.000	
2	2011	PMA	30	23	56	6.913	17.719.988	10.863.379.840	Seluruhnya data realisasi
		PMDN	6	9	-	3.260	-	200.172.644.150,71	

Sumber: Disperindagkop, 2012

Adapun capaian nilai investasi Tahun 2011 baik investasi pemerintah, masyarakat maupun investasi dalam negeri melebihi dari target RKPD Tahun 2011. Namun untuk investasi PMA masih jauh dibawah target RKPD Tahun 2011, hal ini merupakan dampak adanya krisis global.

**Tabel 5.57 Nilai Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2011**

Investasi	Tahun 2011
Pemerintah	334.808.689.124,00
Masyarakat	211.036.023.990,71
PMDN	200.172.644.150,71
PMA	170.343.271.840,00
Total Investasi	916.360.629.105,42

Sumber : Disperindakop, AP, DPKAD Tahun 2012

#### 5.1.1.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

##### A. Prosentase koperasi aktif

Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan focus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi dan UKM. Di Kabupaten Bantul sampai saat ini terdapat 458 koperasi yang didominasi koperasi primer sejumlah 438. Dilihat dari kondisi koperasi, terdapat 380 koperasi aktif (83%) dan 78 koperasi tidak aktif (17%) (lihat Tabel 5.58)

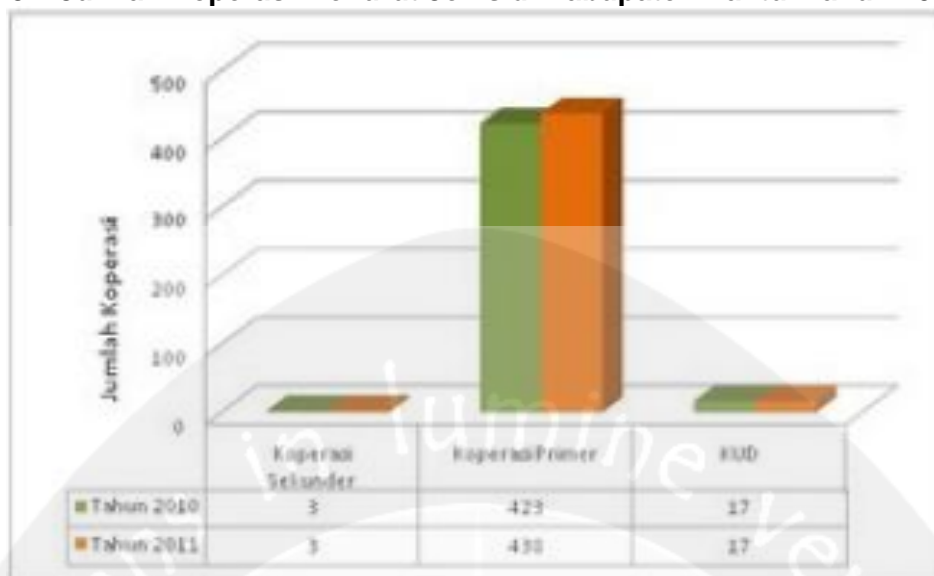
**Tabel 5.58. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Koperasi aktif	246	278	322	358	380
2	Koperasi kurang aktif	74	100	85	85	78
3	Jumlah koperasi	320	378	407	443	458
4	Persentase koperasi aktif	76%	73%	79%	81%	83%

Sumber : Disperindakop,2012

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bidang koperasi diantaranya karena belum optimalnya penataan manajemen dan organisasi koperasi, terbatasnya permodalan koperasi dan belum optimalnya kemitraan pengusaha besar dengan koperasi. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dengan lebih intensif, penguatan permodalan koperasi baik melalui perbankan maupun non perbankan serta keterpaduan program melalui bantuan permodalan baik dari APBD Kabupaten ,Propinsi maupun dari pemerintah pusat serta memfasilitasi pertemuan antara pengusaha besar dan koperasi. Adapun jumlah koperasi menurut jenisnya di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 5.4 Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011**



Sumber : Disperindakop, 2012

#### B. Jumlah UKM dan BPR/LKM

Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing, sehingga secara makro mampu mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada. Perkembangan jumlah UKM dan BPR di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.59. Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011*)
1	Jumlah seluruh UKM	44,778	44,778	44,778
2	Jumlah BPR/LKM	15	15	15
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	44,763	44,763	44,763

Sumber: Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul  
Ket :LKM yang menjadi binaan

Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM; pelatihan manajemen ekspor, impor, pelatihan TI; kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, serta mengadakan pendataan secara langsung ke eksportir maupun importer.

### 5.1.1.3.2.3. Kependudukan

#### A. Pertumbuhan penduduk

Data jumlah penduduk Kabupaten Bantul dari Tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 5.60. Angka laju pertumbuhan penduduk menurun dari tahun ke tahun sehingga kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

**Tabel 5.60. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
1	2007	872.866	1,52
2	2008	886.061	1,51
3	2009	899.312	1,50
4	2010	911.503	1,36
5	2011	921.263	1,07

Sumber: BPS, 2012

#### B. Pengelompokan penduduk

Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.

Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur menunjukkan proporsi umur berdasarkan kelompok umur terbesar pada umur 40 tahun ke atas (37,16%), kedua pada kelompok umur 25-39 tahun (24,13%), sedangkan proporsi terendah pada kelompok umur 10-14 tahun (7,46%).

Berdasarkan data pada tabel berikut dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang kesehatan pada kelompok umur 40 tahun ke atas harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih.

Pada usia 25-39 tahun yang proporsinya juga cukup besar dan merupakan kelompok umur produktif maka kebijakan ekonomi menjadi lebih dominan.

**Tabel 5.61. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2011**

Kecamatan	Kelompok Umur					Jumlah	
	0-9	10-14	15-19	20-24	25-39		40+
1 Srandakan	4.160	2.066	2.177	1.834	6.237	12.194	28.668
2 Sanden	4.184	2.248	2.288	1.638	6.170	13.216	29.744
3 Kretek	3.928	2.133	2.188	1.699	6.084	13.291	29.323
4 Pundong	4.546	2.355	2.418	2.039	6.880	13.541	31.779
5 Bambanglipuro	5.598	2.675	2.699	2.268	8.212	16.028	37.480
6 Pandak	7.016	3.562	3.628	3.190	10.824	19.688	47.908
7 Bantul	9.034	4.299	4.532	4.372	13.872	23.645	59.754
8 Jetis	8.155	3.749	3.917	3.619	12.506	20.367	52.313
9 Imogiri	8.613	4.034	4.163	3.908	13.395	22.423	56.536
10 Dlingo	5.257	2.920	2.782	2.294	7.898	14.516	35.667
11 Pleret	7.621	3.452	3.626	3.308	11.279	14.445	43.731
12 Piyungan	8.153	4.324	4.155	3.459	11.980	17.376	49.427
13 Banguntapan	20.062	8.844	9.626	12.724	32.430	38.824	122.510
14 Sewon	16.341	7.768	8.510	10.009	27.150	35.923	105.701
15 Kasihan	17.573	8.318	9.108	11.476	28.809	37.424	112.708
16 Pajangan	5.268	2.511	2.511	2.447	8.105	12.244	33.216
17 Sedayu	7.151	3.400	3.400	3.078	10.554	17.254	44.798
Jumlah	142.660	68.749	71.728	73.362	222.365	342.399	921.263
Persentase	15,48	7,46	7,78	7,96	24,13	37,16	100,00

Sumber: BPS, 2012 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)

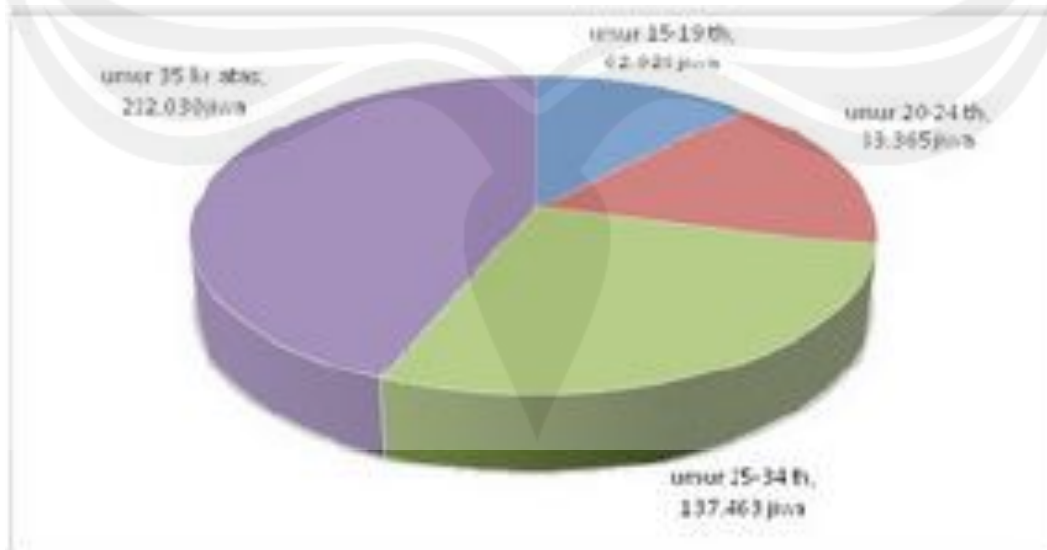
#### 5.1.1.3.2.4. Ketenagakerjaan

##### A. Angkatan Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja.

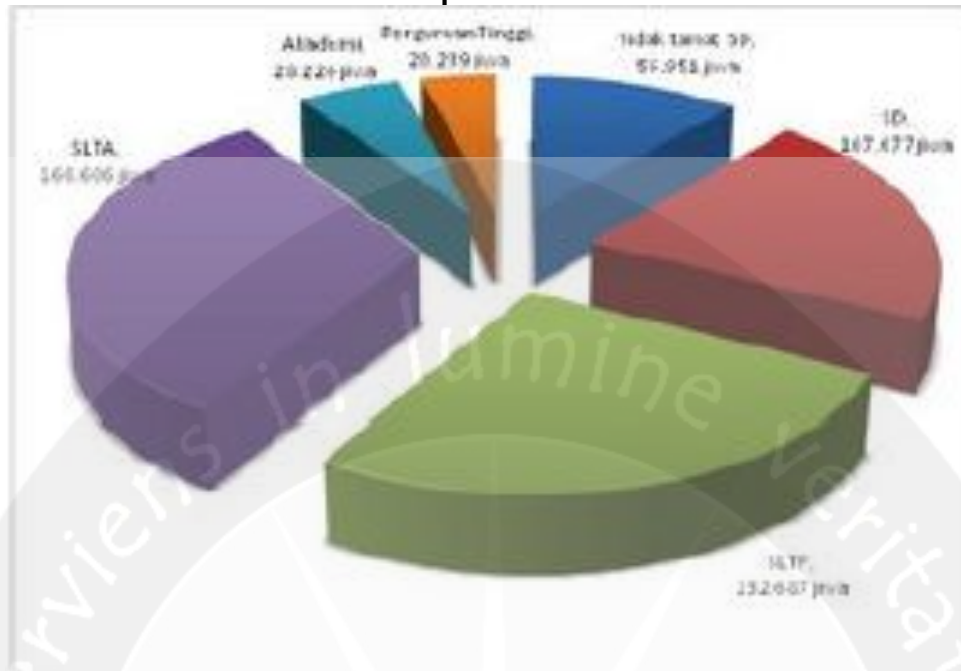
Untuk mengatasi permasalahan angkatan kerja ini diantaranya melalui program untuk persediaan tenaga kerja (menambah jenis pelatihan sesuai kondisi pasar, meningkatkan bantuan pendidikan bagi tenaga kerja, meningkatkan program keluarga berencana untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja), program untuk kebutuhan tenaga kerja (meningkatkan kapasitas dan peralatan serta kemampuan pengajar di sekolah sekolah kejuruan, melaksanakan pelatihan wirausaha bantuan permodalan dan fasilitas, memberikan insentif dan kemudahan dalam bidang investasi) dan program untuk pengangguran (pembangunan informasi pasar kerja yang mudah diakses, peningkatan penempatan tenaga kerja luar negeri melalui pemasaran, pelatihan, bantuan permodalan). Pada Tahun 2010 angkatan kerja di Bantul sebanyak 481.420 orang menjadi 505.786 orang pada Tahun 2011 atau naik sekitar 4,8%. Jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 ini hampir sama, yaitu laki-laki sebesar 262.020 jiwa dan perempuan sejumlah 243.766 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan Tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 5.5 Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 Kabupaten Bantul**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011

**Gambar 5.6 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Kabupaten Bantul**



**Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011**

#### B. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan. Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Jika dilihat menurut jenis kelamin, komposisi penduduk yang bekerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar daripada perempuan yang masing-masing sebesar 215.894 jiwa (53%) dan 191.797 jiwa (47%).

Komposisi penduduk yang bekerja Tahun 2011 secara umum didominasi oleh kelompok umur 25-34 tahun dan > 35 tahun. Dari struktur data tersebut terlihat bahwa penduduk yang bekerja pada kelompok umur > 35 tahun jumlahnya sangat tinggi. Kondisi seperti ini sangat dimungkinkan sebagai akibat adanya kecenderungan bahwa mereka yang sudah habis masa kerjanya, setelah beberapa tahun kemudian tetap menjalankan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi baik dalam hubungan kerja (kegiatan ekonomi formal) maupun di luar hubungan kerja (kegiatan ekonomi informal).

**Tabel 5.62. Penduduk Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011**

Kelompok umur	Tahun 2011
15-19 th	44.388
20-24 th	69.873
25-34 th	117.747
35 th +	175.683
Jumlah	407.691

Sumber : Disnakertrans 2011

Penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTA jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan strata pendidikan yang lainnya. Disusul penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP. Kondisi ini sejalan dengan banyaknya jumlah pencari kerja lulusan SLTA dan SLTP sementara lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya tersebut dengan kualifikasi yang dibutuhkan sangat terbatas, sementara saingan pencari kerja dengan tingkat pendidikan yang sama jumlahnya banyak.

**Tabel 5.63. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011**

Pendidikan	Tahun 2011
Tidak tamat SD	41.120
SD	84.140
SLTP	109.311
SLTA	131.317
Akademi	23.896
Perguruan Tinggi	17.907
Jumlah	407.691

Sumber : Disnakertrans 2011

Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya, meskipun jumlahnya cenderung menurun sekitar 6,6%. Menurunnya proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian diduga karena para pencari kerja lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian.

**Tabel 5.64. Penduduk Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2011**

Lapangan Usaha	Tahun 2010	Tahun 2011
1. Pertanian	179.040	167.192
2. Pertambangan dan Penggalian	7.419	5.213
3. Industri Pengolahan	35.979	38.232
4. Listrik, Gas dan Air	5.526	5.771
5. Bangunan	50.446	55.021
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	52.398	58.600
7. Angkutan dan Komunikasi	11.504	15.540
8. Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan	16.781	16.986
9. Jasa Lainnya	41.215	45.135
Jumlah	400.289	407.691

Sumber : Disnakertrans 2011

### C. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sebesar 29.219 orang atau sebesar 5,8% dari jumlah penduduk angkatan kerja (505.786 orang). Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran ini diantaranya melalui program kerja sama penempatan tenaga kerja di Malaysia, inkubasi bisnis, uji coba wirausaha, subsidi program, padat karya produktif dan infrastruktur serta perluasan lapangan kerja.

Jika dilihat menurut jenis kelamin jumlah penganggur laki-laki dibanding penganggur perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok.

**Tabel 5.65. Penganggur Terbuka menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2011**

Jenis kelamin	Tahun 2010	Tahun 2011
Laki-laki	14.048	13.745
Perempuan	16.091	15.474
Jumlah	30.139	29.219

Sumber : Disnakertrans 2011

#### 5.1.1.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

##### A. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

**Tabel 5.66. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	2	2
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	36	43	42
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	161	189	212
4	Pekerja perempuan di pemerintah	6161	6330	6196
5	Jumlah pekerja perempuan	6360	6564	6452
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	50	52	52,60

Sumber:Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul 2012

##### B. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Indeks Gender

Kasus KDRT di Kabupaten Bantul belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat.

**Tabel 5. 67. Rasio KDRT Tahun 2010– 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2010	2011
1	Jumlah KDRT	47	59
2	Jumlah Rumah Tangga	256.463	258.294
3	Rasio KDRT	0,018	0,022

Sumber: BKKPP & KB kabupaten Bantul 2012

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Bantul serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi *stakeholder*.

**Tabel 5.68. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2011**

Tahun	Perempuan Di Parlemen (%)	Perempuan Pekerja Profesional (%)	Perempuan Dalam Angkatan Kerja (%)	Perempuan Upah Pekerja Non Pertanian	IDG
2010	15,6	6,46	43,08	800,0	63,83
2011	15,6	7,62	34,82	800,0	64,03

Sumber: SP 2010 dan Disnakertrans, 2012

#### 5.1.1.3.2.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

##### A. Rasio akseptor KB

Program Keluarga Berencana yang telah berhasil dilaksanakan meliputi penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan Keluarga Berencana, pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling, pendampingan kegiatan Harganas dan mengikuti Jambore PKB/PLKB tingkat nasional.

Tujuan program Keluarga berencana adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan tujuan kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan.

Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.69. Rasio Akseptor KB Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah akseptor KB (PA)	116.781	120.583	120.697
2	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	149.766	151.654	151.998
3	Rasio akseptor KB (PA/PUS)	0,780	0,795	0,794

Sumber: BKK PP dan KB, 2011

**Tabel 5.70. Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jumlah akseptor KB (PA)	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	Rasio Akseptor KB (PA/PUS)
1	Kec. Sewon	11.977	15.376	0,779
2	Kec. Pandak	8.821	8.233	0,804
3	Kec. Pundong	4.681	5.721	0,802
4	Kec. Bantul	8.128	9.956	0,816
5	Kec. Sanden	3.986	5.101	0,781
6	Kec. Kretek	3.970	4.951	0,802
7	Kec. Sedayu	6.124	7.725	0,793
8	Kec. Dlingo	6.424	7.783	0,825
9	Kec. Jetis	7.861	9.639	0,795
10	Kec. Pajangan	4.452	5.548	0,803
11	Kec. Bambangpuro	4.801	6.185	0,776
12	Kec. Piyungan	6.890	8.552	0,806
13	Kec. Srandakan	3.750	4.671	0,803
14	Kec. Banguntapan	14.245	17.536	0,812
15	Kec. Imogiri	8.344	10.614	0,786
16	Kec. Kasihan	12.268	16.214	0,757
17	Kec. Pleret	6.261	7.849	0,798
	Jumlah	120.583	151.654	0,795

Sumber: BKK PP & KB Kabupaten Bantul, 2011

### 5.1.1.3.2.7. Komunikasi dan Informasi

#### A. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah.

**Tabel 5.71. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	5	4	3
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	6	7	7
3	Total jenis surat kabar	11	11	10

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul 2012

#### B. Penyiaran radio/TV

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.72. Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah penyiaran radio lokal	4	3	3
2	Jumlah penyiaran radio nasional	-	-	-
3	Jumlah penyiaran TV lokal	3	1	2
4	Jumlah penyiaran TV nasional	-	-	-
5	Total penyiaran radio/TV lokal	7	4	5

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul 2012

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

### 5.1.1.3.2.8. Pertanian

#### a. Persentase luas lahan bersertifikat

Urusan wajib pertanahan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sampai saat ini belum diserahkan untuk menjadi kewenangan daerah, sehingga program dan kegiatan anggaran masih bersumber dari APBN dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Sedangkan fungsi kabupaten dalam urusan pertanahan bersifat koordinasi.

**Tabel 5.73. Luas Lahan Bersertifikat Tahun Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2010	2011
1	Luas wilayah daratan	506,85	506,85
2	Luas tanah bersertifikat HGB	41,26	0,984
3	Luas tanah bersertifikat HM	17.965,04	17.830,1
4	Total luas tanah bersertifikat	18.006,3	18.935,7
5	Prosentase HGB dibanding luas daratan	8%	2%
6	Prosentase HM dibanding luas daratan	35,44%	35%
7	Prosentase total luas lahan bersertifikat	35,53%	37,40%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011

### 5.1.1.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

**Tabel 5.74. Kelompok Binaan LPM Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	2009		2010		2011	
		Jmlh LPM	Jmlh Kelompok Binaan	Jmlh LPM	Jmlh Kelompok Binaan	Jmlh LPM	Jmlh Kelompok Binaan
1	Kec. Sewon	4	17	4	17	4	17
2	Kec. Pandak	4	17	4	17	4	17
3	Kec. Pundong	3	13	3	13	3	13
4	Kec. Bantul	5	21	5	21	5	21
5	Kec. Sanden	4	17	4	17	4	17
6	Kec. Kretek	5	21	5	21	5	21
7	Kec. Sedayu	4	17	4	17	4	17
8	Kec. Dlingo	6	21	6	21	6	21
9	Kec. Jetis	4	17	4	17	4	17
10	Kec. Pajangan	3	13	3	13	3	13
11	Kec. Bambanglipuro	3	13	3	13	3	13
12	Kec. Piyungan	3	13	3	13	3	13
13	Kec. Srandakan	2	9	2	9	2	9
14	Kec. Banguntapan	8	33	8	33	8	33
15	Kec. Imogiri	8	33	8	33	8	33
16	Kec. Kasihan	4	17	4	17	4	17
17	Kec. Pleret	5	21	5	21	5	21
	Jumlah	75	313	75	313	75	313

Sumber: kantor PMD Kabupaten Bantul, 2011

#### B. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti

kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2009 – 2011 meningkat, hal ini membuktikan bahwa keaktifan masyarakat Bantul dalam pembangunan daerah semakin besar melalui PKK (Tabel 5.75).

**Tabel 5.75. Kelompok Binaan PKK Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	2009		2010		2011	
		Jmlh PKK	Jmlh Kelompok Binaan	Jmlh PKK	Jmlh Kelompok Binaan	Jmlh PKK	Jmlh Kelompok Binaan
1	Kec. Sewon	1	83	1	103	1	103
2	Kec. Pandak	1	54	1	142	1	142
3	Kec. Pundong	1	50	1	86	1	86
4	Kec. Bantul	1	48	1	88	1	88
5	Kec. Sanden	1	60	1	101	1	101
6	Kec. Krotek	1	86	1	78	1	78
7	Kec. Sedayu	1	66	1	102	1	102
8	Kec. Dlingo	1	121	1	99	1	99
9	Kec. Jetis	1	77	1	127	1	127
10	Kec. Pajangan	1	98	1	112	1	112
11	Kec. Bangliwipuro	1	98	1	116	1	116
12	Kec. Pyungan	1	131	1	166	1	166
13	Kec. Srandakan	1	67	1	124	1	124
14	Kec. Banguntapan	1	70	1	133	1	133
15	Kec. Imogiri	1	159	1	160	1	160
16	Kec. Kasihan	1	87	1	94	1	94
17	Kec. Pleret	1	47	1	95	1	95
	Jumlah	17	1402	17	1926	17	1926

Sumber: kantor PMD Kabupaten Bantul, 2011

#### C. Jumlah LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM yang terdaftar di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sejumlah 129 LSM.

**Tabel 5.76. Jumlah LSM Aktif Tahun 2009 s.d 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah LSM terdaftar	-	-	129
2	Jumlah LSM tidak aktif	-	-	-
3	Jumlah LSM aktif	-	-	-

Sumber: Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul. 2011

#### 5.1.1.3.2.10. Perpustakaan

Pelayanan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul di layani di kantor perpustakaan dan didukung dengan perpustakaan keliling yang berjumlah 12 armada mobil pintar, dengan roda empat sebanyak 7 armada dan roda tiga sebanyak 5 armada. Koleksi buku yang ada saat ini sebanyak 30.231 buku dengan judul buku sebanyak 18.000 judul. Pada Tahun 2011 jumlah pengunjung perpustakaan daerah sebanyak 30.119 pengunjung.

Adapun pengunjung tersebut terdiri dari pelajar/mahasiswa, pegawai negeri sipil/karyawan, maupun masyarakat umum.

**Tabel 5.77. Jumlah Perpustakaan Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	611	611	611
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	48	48	90
3	Total Perpustakaan	659	659	701

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, 2011

**Tabel 5.78. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	32,639	38,374	30,119
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik non pemda			
3	Total Pengunjung Perpustakaan	32,639	38,374	30,119

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, 2011

#### 5.1.1.3.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.79. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah polisi pamong praja	75	81	79
2	Jumlah penduduk	899312	911503	921263
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk			

Sumber: Satuan Pol PP Kabupaten Bantul, 2011

Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.80. Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Jumlah Linmas	TPS	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah
1	2009	4276	750	527	100	5653
2	2010	4260	750	527	100	5637
3	2011	4233	750	527	100	5610

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul, 2011

**A. Jumlah kegiatan Kepemudaan**

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang kepemudaan.

**Tabel 5.81. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011 Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	2011
1	Kec. Sewon	16
2	Kec. Pandak	15
3	Kec. Pundong	16
4	Kec. Bantul	20
5	Kec. Sanden	15
6	Kec. Klatik	15
7	Kec. Sedayu	14
8	Kec. Dlingo	14
9	Kec. Jetis	17
10	Kec. Pajangan	16
11	Kec. Bambanglipuro	15
12	Kec. Piyungan	16
13	Kec. Srandakan	16
14	Kec. Banguntapan	15
15	Kec. Imogiri	17
16	Kec. Kasihan	17
17	Kec. Pleret	16
	Jumlah	270

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul, 2011

**5.1.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

**5.1.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

**5.1.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka konsumsi RT Per Kapita)**

**Tabel 5.82. Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010
1	Total Pengeluaran RT	4,802.89	5,158.79
2	Jumlah RT	250,232	264,729

Sumber: BPS Bantul, 2011

#### 5.1.1.4.1.2. Produktifitas Total Daerah

Produktifitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

**Tabel 5.83. Produktivitas per Sektor Kabupaten Bantul**

No	Sektor	2009		2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	PDRB	3.779.948	100,00	3.967.928	100,00	4.176.868	100,00
1.1	Pertanian	919.417	24,32	933.260	23,52	950.491	22,76
1.2	Pertambangan & Penggalian	35.783	0,95	36.525	0,92	36.576	0,88
1.3	Industri Pengolahan	610.781	16,16	647.939	16,33	680.271	16,29
1.4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	34.448	0,91	36.289	0,91	37.969	0,91
1.5	Konstruksi	434.409	11,49	454.480	11,45	482.930	11,56
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran	746.833	19,76	789.789	19,90	844.427	20,22
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	268.145	7,09	287.236	7,24	308.199	7,38
1.8	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	230.768	6,11	252.015	6,35	271.556	6,50
1.9	Jasa-jasa	499.364	13,21	530.397	13,37	564.448	13,51
2	Jumlah Angkatan Kerja	471.112		481.420		505.786	

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bantul, 2011

Produktifitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktifitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

#### 5.1.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

##### 5.1.1.4.2.1. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

**Tabel 5.84. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2009 s.d 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011 *)
1	Jumlah Orang	orang	3,054,892	2,963,296	987,764
2	Jumlah Barang	ton	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2012

##### 5.1.1.4.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Program pengendalian banjir mencakup

upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Program ini meliputi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan bantaran sungai dan tanggul sungai. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan banjir khususnya untuk menurunkan luasan genangan akibat curah hujan tinggi. Pada Tahun 2010, daerah yang tergenang air seluas 1.071,66 hektar, sedangkan pada Tahun 2011 berkurang menjadi 1.025,99 hektar atau turun 45,67 hektar (4,45%). Data banjir genangan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 5.85. dan Tabel 5.86.

**Tabel 5.85. Data Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011**

No.	Tahun	Potensi Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi (Ha)
1.	2007	3.731,36
2.	2008	3.093,33
3.	2009	2.685,42
4.	2010	1.071,66
5.	2011	1.025,99

Sumber: Dinas SDA, 2012

**Tabel 5.86. Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2010	2011
1	Banjir genangan (ha)	1.071,66	1.025,99
2	Banjir luapan (ha)	2.701,62	3.857,41

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2012

#### 5.1.1.4.2.3. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

**Tabel 5.87. Perkiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Bantul**

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011*
1	Kebutuhan	GWH	164,73	177,8	92,06
	- rumah tangga	GWH	12,7	130,45	67,27
	- Komersial	GWH	16,19	17,54	9,39
	- Public	GWH	13	14,97	7,91
	- Industri	GWH	14,84	14,84	7,5

Sumber: PLN Bantul (\*Data sampai dengan bulan Juni 2011)

#### 5.1.1.4.2.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

**Tabel 5.88. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011 *)
1	RT dengan daya 450 watt	92,686	92,331	92,405
2	RT dengan daya 900 watt	30,422	33,493	34,878
3	RT dengan daya 1.300 watt	5,265	5,656	6,100
4	RT dengan daya 2.200 watt	1,305	1,497	1,673
5	RT dengan daya > 2.200 watt	276	365	399
6	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	129,954	133,342	135,455

Sumber: PLN Bantul (\*Data sampai dengan bulan Juni 2011)

#### 5.1.1.4.2.5. Ketersediaan Penginapan

Kunjungan Wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor

keamanan (baik dalam hal keamanan fisik-pribadi, maupun keamanan sosial politik). Kondisi pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu keamanan, seperti isu wabah penyakit, demo anarkis, bencana alam dan sebagainya.

Namun demikian, dua tahun pasca gempa telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan (kenaikan jumlah pengunjung). Kunjungan Wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun asing mengalami peningkatan pada Tahun 2011 seharusnya juga didukung dengan peningkatan jumlah perkembangan prasarana wisata di Kabupaten Bantul. Namun perkembangan prasarana wisata di Kabupaten Bantul relatif stagnan, ini menunjukkan masih perlunya upaya-upaya yang bisa mendorong peningkatan sarana prasarana wisata di Kabupaten Bantul.

**Tabel 5.89. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009		2010		2011	
		Jmlh usaha	Jmlh kursi	Jmlh usaha	Jmlh kursi	Jmlh usaha	Jmlh kursi
1	Usaha restoran golongan tertinggi	-	-	-	-	-	-
2	Usaha restoran golongan menengah	-	-	-	-	-	-
3	Usaha restoran golongan terendah	-	-	-	-	-	-
4	Usaha rumah makan kelas A	3	950	5	820	-	-
5	Usaha rumah makan kelas B	4	170	8	312	5	108
6	Usaha rumah makan kelas C	7	130	7	181	1	16
7	Usaha rumah makan kelas D	3	34	1	12	2	23
8	Usaha rumah makan kelas	-	-	-	-	-	-
9	Jenis Usaha Restoran	-	-	-	-	-	-
10	Jenis Usaha Rumah Makan	-	-	-	-	-	-
		17	1284	21	1325	8	147

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabuapten Bantul, 2012

**Tabel 5.90. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Bantul**

No	Jenis Penginapan/ Hotel	2009			2010			2011*)		
		Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur
1	Hotel Bintang 3	-	-	-	1	60	120	1	83	166
2	Hotel Bintang 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hotel Bintang 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	180	-	-	184	-	-	184	-	-
5	Total jumlah penginapan/ hotel	180	-	-	184	-	-	185	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabuapten Bantul, 2012

#### 5.1.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka

perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Perkembangan investasi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan /pengembangan infrastruktur pasca gempa, system informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu.

#### 5.1.1.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kabupaten Bantul dari pada Tahun 2011 ini menurun dibandingkan pada Tahun 2010.

**Tabel 5. 91. Angka Kriminalitas Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul**

No	Jenis Kriminal	2009	2010	2011
1	Jumlah kasus Narkoba	24	29	14
2	Jumlah kasus Pembunuhan	7	5	1
3	Jumlah Kejahatan Seksual	9	18	11
4	Jumlah kasus Penganiayaan	99	110	33
5	Jumlah kasus Pencurian	386	641	153
6	Jumlah kasus Penipuan	133	201	50
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	1	1
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	1011	1560	434
9	Jumlah Penduduk	842056	909812	910572
10	Angka Kriminalitas (B)/[9]	0.001201	0.001715	0.000477

Sumber: Polres Bantul, 2012

#### 5.1.1.4.3.2. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

**Tabel 5.92. Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Bidang Politik	3	2	-
2	Ekonomi	3	5	2
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	6	7	2

Sumber: Kantor Pol PP Kabupaten Bantul, 2012

#### 5.1.1.4.3.3. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan

perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi Kabupaten Bantul upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk lembaga perijinan pada Tahun 2008 setingkat eselon II berbentuk dinas. Dengan adanya instansi tersendiri ini maka telah dilakukan efisiensi waktu pengurusan dari 30 hari menjadi 12 hari, sehingga masyarakat semakin puas terhadap layanan tersebut. Selain itu dihasilkan pula metode pengurusan ijin secara paralel sehingga satu langkah pengurusan memperoleh dua ijin atau lebih. Adapun ijin yang telah dihasilkan adalah 9.330 perijinan, yang meliputi: ijin gangguan sebanyak 992, IMB sebanyak 1.085, ijin usaha perdagangan sebanyak 799, tanda daftar perusahaan sebanyak 165, dan sisanya sebanyak 6.289 berupa ijin-ijin lainnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah pemohon yang meminta ijin sebanyak 11.518 pemohon, maka persentasenya adalah 81,00% selama satu tahun. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi Pemerintah Daerah karena telah mampu meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat. Implementasi kemudahan perijinan dapat ditunjukkan dengan peningkatan PAD yang diterima, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 5.93. Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011**

No	Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan	PAD/ Pendapatan (%)
1	2007	57.229.726.493,62	727.836.911.979,62	7,86
2	2008	69.800.761.508,85	1.023.590.207.758,85	6,82
3	2009	88.691.362.690,38	882.149.788.429,75	10,05
4	2010	81.637.099.293,07	986.866.902.363,07	8,27
5	2011	128.900.086.173,41	1.180.550.742.432,41	10,92

Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2011

#### 5.1.1.4.3.4. Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

**Tabel 5. 94. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah Perda terkait perijinan	3	4	2
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa			
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan			1

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul

#### 5.1.1.4.3.5. Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa)

Berdasarkan statusnya desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Perda mengenai batas wilayah kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa pedesaan dan perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan pedesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 5.95. Desa Tertinggal di Kabupaten Bantul

No	Nama Desa	Status	Skor	Keterangan
1	Seloharjo	Perkotaan	31	Sangat tertinggal
2	Triharjo	Perkotaan	35	Tertinggal
3	Argosari	Perkotaan	36	Tertinggal
4	Jatimulyo	Pedesaan	36	Tertinggal
5	Poncosari	Perkotaan	37	Tertinggal
6	Gadingsari	Perkotaan	37	Tertinggal
7	Caturharjo	Perkotaan	37	Tertinggal
8	Selopamiro	Pedesaan	37	Tertinggal
9	Mangunan	Pedesaan	37	Tertinggal
10	Muntuk	Pedesaan	37	Tertinggal
11	Terong	Pedesaan	37	Tertinggal
12	Segoroyoso	Perkotaan	37	Tertinggal
13	Bawuran	Pedesaan	37	Tertinggal
14	Wonolelo	Pedesaan	37	Tertinggal
15	Triwidadi	Pedesaan	37	Tertinggal
16	Guwosari	Perkotaan	37	Tertinggal

Sumber: BPS Bantul, 2010

Berdasarkan hasil survei BPS pada Tahun 2009 dan koordinasi bersama Pemerintah Daerah pada Tahun 2010 di Kabupaten Bantul terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal. Adapun secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.94. di atas.

#### 5.1.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya

manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

#### 5.1.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri.

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

**Tabel 5.96. Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah lulusan S1	5.288	5.459	5.654
2	Jumlah lulusan S2	309	371	444
3	Jumlah lulusan S3	-	-	1
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	5.597	5.830	6.099

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, 2012

#### 5.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Srandakan

Pantai Baru adalah salah satu tujuan wisata yang ada di Kecamatan Srandakan. Pantai Baru terletak di Dusun Ngentak, Desa Poncocari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Rute perjalanan ke Pantai Baru dari Kota Yogyakarta di tempuh melalui Kabupaten Bantul kemudian Kecamatan Srandakan dan selanjutnya mengikuti ruas jalan ke arah Pandansimo.

Pantai Baru yang berada di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan kurang lebih 30 km dari Yogyakarta ke arah selatan, terletak bersebelahan dengan Muara Sungai Progo dan merupakan pantai paling barat dari deretan pantai Selatan yang masuk wilayah Kabupaten Bantul. Deburan ombak yang besar dan liar dengan kelengkungan ombak yang tajam, suasana mistis yang masih kental dengan banyaknya petilasan yang keramat, hiruk-pikuk nelayan melawan melawan ganasnya ombak merupakan gaya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain panorama pantai yang sangat indah, di Pantai Baru ini juga terdapat objek wisata Ziarah dan tradisi. Salah satu hal yang dapat menarik minat wisatawan adalah disini wisatawan dapat berbelanja ikan laut langsung dari nelayan lokal.

Pantai Baru memiliki cemara udang yang merindangi sepanjang pantai dan yang membuat suasana teduh di daerah sekitarnya. Pantai Baru memiliki sebuah ikon yakni kincir angin, sebagai pembangkit listrik bagi aktivitas di wilayah pantai. Di pantai ini juga sebagai

tempat berlabuhnya belasan kapal nelayan lokal dan dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan. Selain menikmati alam pantai, pengunjung juga dapat menikmati kuliner, aneka sajian ikan laut segar dapat dinikmati di tempat ini. Puluhan warung atau gasebo dengan masakan khas masing-masing siap melayani pengunjung yang datang di Pantai Baru ini. Selain terkenal dengan pantainya Kecamatan Srandakan khususnya di Dusun Ngentak, Desa Poncosari juga potensial dengan penggalian pasir dan batu-batuan dari Sungai Progo. Penduduk yang tinggal di sekitarnya menggantungkan hidupnya dari endapan pasir dan bebatuan yang diambil dari Sungai Progo tersebut.

Salah satu desa di Kecamatan Srandakan yakni Desa Trimurti merupakan desa yang memiliki sentra industri tahu, tahu yang dihasilkan di desa ini memiliki cita rasa yang khas dan dicari oleh banyak orang sehingga banyak dicari oleh masyarakat di sekitarnya dan juga masyarakat lainnya sebagai teman untuk minum teh hangat, tahu yang dihasilkan dari Desa Trimurti ini juga dapat dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh dari Kecamatan Srandakan. Di samping menjadi sentra industri tahu, Kecamatan Srandakan juga terkenal dengan mi lethehnya yang dapat ditemukan di Dusun Bendo, Desa Trimurti. Mi letheh ini diproduksi secara tradisional yakni dengan menggunakan alat penggiling tepung berupa batu silinder berat yang ditarik dengan menggunakan sapi dan menggunakan oven berbahan bakar kayu, cara tradisional seperti ini sampai sekarang masih dipergunakan untuk memproduksi mi letheh tersebut.

#### **5.1.2.1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Srandakan merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Secara astronomi keberadaan posisi Kecamatan Srandakan terletak di  $110^{\circ}14'46''$  Bujur Timur dan  $07^{\circ}56'20''$  Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Srandakan terletak di bagian paling barat daya di wilayah Kabupaten Bantul. Adapun batas wilayah untuk Kecamatan Srandakan dengan daerah sekitarnya dapat diuraikan sebagai berikut, wilayah Kecamatan Srandakan berbatasan dengan :

- Utara : Kecamatan Pajangan;
- Timur : Kecamatan Pandak dan Sanden;
- Selatan : Samudra Indonesia;
- Barat : Sungai Progo, Kecamatan Galur, Kab Kulon Progo.

Kecamatan Srandakan berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 8 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 13 Km. Kecamatan Srandakan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Srandakan adalah  $37^{\circ}\text{C}$  dengan suhu terendah  $22^{\circ}\text{C}$ . Bentangan wilayah di Kecamatan Srandakan 100 % berupa daerah yang datar sampai berombak.

### 5.1.2.2. Penggunaan Lahan Kecamatan Srandakan

Penggunaan lahan di Kecamatan Srandakan sebagian besar dipergunakan untuk lahan bukan pertanian (bangunan dan pekarangan) sebesar 1.257 Ha atau 68,61 %. Sedangkan penggunaan lahan untuk lahan sawah 451 Ha (24,62 %) dan lahan bukan sawah hanya seluas 124 Ha (6,77 %).

**Tabel 5.97. Geografi dan Iklim**

Uraian	Tahun 2012
Luas wilayah	18,32 km <sup>2</sup>
Sungai yang melintasi	Sungai Progo
Panjang pantai	4,5 km <sup>2</sup>
Ketinggian tempat	2-7 DPL
Lahan bukan pertanian	1.257 Ha
Lahan sawah	451 Ha
Lahan bukan sawah	124 Ha

**Sumber : Kecamatan Srandakan, Tahun 2012**

### 5.1.2.3. Pemerintahan Kecamatan Srandakan

Diantara 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan adalah kecamatan dengan luas wilayah paling sempit yaitu luasnya hanya mencapai 3,61 persennya dari wilayah yang ada di Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah sebesar 18,32 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Srandakan terdiri dari 2 (dua) desa yaitu Desa Poncosari dengan luas mencapai 1.186 Ha (64,73 %) dan Desa Trimurti seluas 646 Ha (35,26 %). Sementara itu dilihat dari jumlah Pedukuhan dan Rukun Tetangganya (RT) di masing-masing desa adalah sebagai berikut :

- a. Poncosari terdiri dari 24 pedukuhan dan 120 RT
- b. Trimurti terdiri dari 20 pedukuhan dan 135 RT

### 5.1.2.4. Kependudukan

Penduduk mempunyai peran penting dalam proses pembangunan, karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Berdasarkan data hasil estimasi penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Srandakan pada tahun 2012 adalah 28.668 jiwa yang tersebar di 2 (dua) desa. Dari jumlah tersebut 14.214 jiwa adalah laki-laki dan 14.454 jiwa adalah perempuan. Selama periode 2000-2010 tingkat pertumbuhan penduduk tercatat meningkat 0,50 persen. Dengan luas wilayah 18,32 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kecamatan Srandakan tahun 2012 1.565 jiwa per km<sup>2</sup>. Apabila dilihat per desa kepadatan penduduk tertinggi ada di Desa Trimurti sebesar 2.581 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk di Desa Poncosari hanya sebesar 1.011 jiwa per km<sup>2</sup>. Sementara kepadatan penduduk di Kecamatan Srandakan pada level Kabupaten Bantul berada di urutan ke-9, berada di atas Kecamatan Piyungan, sedangkan kepadatan terendah dan tertinggi berada di Kecamatan Dlingo dan Banguntapan.

**Tabel 5.98. Kependudukan**

Uraian	Tahun 2012
Jumlah penduduk (jiwa)	28.668
Laki-laki (jiwa)	14.214
Perempuan (jiwa)	14.454
Laju pertumbuhan (%)	0,50
Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )	1.565

Sumber : Bantul dalam Angka, Tahun 2012

Komposisi penduduk Kecamatan Srandakan didominasi oleh penduduk muda/dewasa, usia anak-anak dan usia tua yang relatif hampir merata. Rasio ketergantungan penduduk usia produktif di Kecamatan Srandakan sebesar 51,42 persen, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif (usia 15 – 65 tahun) menanggung sekitar 51 orang yang belum/tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Itu artinya beban tanggungan penduduk usia produktif saat ini relatif kecil, dimana 1 orang usia tidak produktif menjadi beban bagi 2 orang usia produktif. Jika dianalogikan dengan sebuah keluarga, dalam kondisi ideal dua orang yang bekerja hanya menanggung satu orang yang tidak bekerja (penduduk usia 0 – 14 tahun dan 65+).

Secara umum jumlah penduduk perempuan (14.454 jiwa) di Kecamatan Srandakan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki (14.214 jiwa). Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilai lebih kecil dari 100. Angka sex ratio di Kecamatan Srandakan pada tahun 2012 mencapai 98 persen yang mempunyai arti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Di Desa Trimurti jumlah laki-laki dan perempuan relatif sama yaitu ditunjukkan dengan angka sex rasionya 100 persen.

**Tabel 5.99. Sex Ratio Penduduk**

Uraian	Tahun 2012
0 – 14 tahun (jiwa)	6.096
15 – 65 tahun (jiwa)	18.933
65 + tahun (jiwa)	3.639
Angka Ketergantungan (%)	51,42
Laki-laki	14.214
Perempuan	14.454
Sex ratio	98

Sumber : Kecamatan Srandakan dalam Angka, Tahun 2012

Salah satu indikator yang dapat mengukur kualitas kehidupan masyarakat adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi komoditas kebutuhan secara umum. Keluarga sejahtera dimaknai dengan beberapa ciri diantaranya keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat di sarana kesehatan modern. Sedangkan untuk Keluarga Sejahtera (KS) I-III kondisinya lebih baik daripada Keluarga Pra Sejahtera.

Pada tahun 2012 data Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Srandakan mencapai 1.821 KK (20,40 %) dari total keluarga di Kecamatan Srandakan yang berjumlah 8.928 KK. Sedangkan untuk Keluarga Sejahtera (KS I) sebanyak 2.164 KK, KS II mencapai 1.610 KK, KS III 3.017 KK dan KS III Plus hanya sebanyak 316 KK.

#### 5.1.2.5. Pendidikan

Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya dan jumlah sarana pendidikan yang dimiliki akan semakin mudah dalam mengakses mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Dengan menguasai pengetahuan dan teknologi, penduduk dapat menjadikan kemampuan yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Jumlah TK (Swasta dan Negeri) di Kecamatan Srandakan pada tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 20 unit, Sekolah Dasar (SD) 16 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 3 unit. Sedangkan jumlah murid (Swasta dan Negeri) di Kecamatan Srandakan pada tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 2.488 siswa untuk Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1.123 siswa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 387 siswa.

**Tabel 5.100. Sarana Pendidikan**

Uraian	TK	SD	SLTP	SLTA
Trimurti	8	8	2	1
Poncosari	12	8	1	2
Kecamatan Srandakan	20	16	3	3

**Sumber : Kecamatan Srandakan, Tahun 2012**

#### 5.1.2.6. Kesehatan

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah terpenuhinya kesehatan penduduk secara optimal baik dari sisi pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan maupun terjangkauanya biaya kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terjangkaunya biaya kesehatan pada tempat-tempat pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat menengah ke bawah akan sangat membantu dalam menjaga daya tahan tubuh dan pengobatan penyakit

Sarana kesehatan menjadi salah satu yang vital yang harus ada di setiap kecamatan. Banyaknya sarana kesehatan satu wilayah secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Srandakan pada tahun 2012, terdapat 4 unit rumah sakit bersalin, 1 unit puskesmas yang didukung dengan 2 unit puskesmas pembantu dan balai pengobatan sebanyak 3 unit. Sedangkan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas Kecamatan Srandakan pada tahun 2012 sebanyak 4 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 8 orang bidan, 10 orang perawat dan tenaga medis kesehatan lainnya sejumlah 8 orang (ahli gizi, farmasi, dan lain-lain).

### 5.1.2.7. Sosial

Sebagai bangsa yang majemuk dan beragam, Kecamatan Srandakan memiliki penduduk yang memeluk dan beribadat dengan berbagai macam agama. Untuk itu sarana peribadatan juga terdapat beberapa macam yang dapat diketemukan di Kecamatan Srandakan. Sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Srandakan meliputi : Masjid 57 unit, Mushola 53 unit, Gereja Katolik 1 unit, dan Gereja Kristen 1 unit. Banyaknya sarana ibadah di suatu wilayah menunjukkan tingkat pembangunan pada bidang mental spiritual berjalan dengan baik.

**Tabel 5.101. Sarana Peribadatan**

Uraian	Tahun 2012
Masjid (unit)	57
Mushola (unit)	53
Gereja Katolik (unit)	1
Gereja Kristen (unit)	1

**Sumber : Kecamatan Srandakan dalam Angka, Tahun 2012**

### 5.1.2.8. Pertanian

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar perekonomian di Kabupaten Bantul terutama produksi tanaman pangan (padi dan palawija). Peningkatan pembangunan di sektor pertanian sangat penting karena menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Kelangkaan pangan bisa berakibat fatal sekaligus dapat menguncang stabilitas perekonomian daerah.

Tanaman bahan makanan yang ditanam oleh sebagian penduduk di Kecamatan Srandakan antara lain : tanaman padi sawah yang luas panennya mencapai 848 Ha, tanaman jagung 73 Ha, kacang kedelai 143 Ha, dan kacang tanah 1.728,6 Ha.

Potensi komoditas pertanian yang lainnya di Kecamatan Srandakan yaitu bawang merah dan tanaman cabai. Tanaman ini banyak terdapat di Desa Poncosari, luas panen tanaman bawang merah mencapai 15 Ha, sedangkan luas panen tanaman cabainya seluas 15 Ha. Produksi tanaman bawang merah dan cabai pada tahun 2012 masing-masing mencapai 639 kwintal dan 474 kwintal. Sedangkan tanaman buah-buahan yang paling banyak ditanam oleh penduduk Kecamatan Srandakan antara lain : pisang, mangga, rambutan dan pepaya.

Secara geografis wilayah Kecamatan Srandakan di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Hal ini memberikan potensi pertanian yang lain yaitu sub sektor perikanan terutama perikanan tangkap laut. Sumber daya ini tentunya berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk di pesisir pantai selatan.

Produksi ikan tangkap laut di Kecamatan Srandakan dapat diperoleh dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Fajar Arum Kuwaru dan Pandan Mino Poncosari. Ikan layur

merupakan jenis ikan yang paling banyak terjaring oleh nelayan. Produksi ikan tangkap laut yang tercatat di TPI Fajar Arum dan Pandan Mino masing-masing produksinya mencapai 8.206 kg dan 44.706 kg dengan nilai penjualan ikan sebanyak Rp. 442.112 ribu dan Rp. 590.671 ribu.

Selain potensi ikan tangkap laut, keberadaan peternak sapi potong, sapi perah dan kerbau di Kecamatan Srandakan cukup banyak dijumpai juga. Sampai dengan bulan Desember 2012 populasi ternak sapi potong di Kecamatan Srandakan mencapai 4.017 ekor, sapi perah sebanyak 29 ekor dan kerbau sebanyak 11 ekor.

**Tabel 5.102. Produksi Pertanian**

Uraian	Produksi (kwintal)
Bawang Merah	639
Cabai Merah	474
Pisang	3.964
Pepaya	258
Mangga	575
Rambutan	354

**Sumber : Kecamatan Srandakan dalam Angka, Tahun 2012**

**Tabel 5.103. Produksi Ikan Tangkap**

TPI	Produksi (kg)	Nilai (000 Rp.)
Fajar Arum	8.206	44.112
Pandan Mino	44.706	590.671

**Sumber : Kecamatan Srandakan dalam Angka, Tahun 2012**

**Tabel 5.104. Produksi Ternak**

Uraian	Tahun 2012
Sapi Potong (ekor)	4.017
Sapi Perah (ekor)	29
Kerbau (ekor)	11

**Sumber : Kecamatan Srandakan dalam Angka, Tahun 2012**

#### 5.1.2.9. Sarana Perekonomian

Sarana transportasi yang baik dan lancar serta sarana perdagangan yang memadai sebagai tempat bertemunya konsumen dan produsen akan menumbuhkan wilayah tersebut menjadi titik-titik pertumbuhan perekonomian. Kecamatan Srandakan terletak pada bagian wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Hal ini mengakibatkan percepatan perkembangan wilayah yang berhubungan dengan wisata pantai dan perikanan yang potensial tumbuh cepat dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Srandakan meliputi : Pasar Mangiran, Jragan dan Pasar Koripan sebagai tempat jual beli tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli. Selain pasar tradisional, supermarket/mini market yan terdapat di

Kecamatan Srandakan mencapai 4 unit. Bank dan Koperasi sebagai suatu lembaga perantara keuangan yang akan memperlancar dalam pengembangan usaha yang ada di Kecamatan Srandakan, jumlah Bank yang ada di Kecamatan Srandakan mencapai 3 unit bank sedangkan jumlah Koperasinya ada sebanyak 1 unit.

Aset yang lain dari sarana perekonomian di Kecamatan Srandakan adalah obyek wisata Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo yang dapat memberi peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Kunjungan wisatawan ke Pantai Pandansimo dan Kuwaru pada tahun 2012 sebanyak 325.451 orang dengan pendapatan sebanyak 700 juta rupiah

**Tabel 5.105. Sarana Perekonomian**

Uraian	Poncosari	Trimurti
Pasar Tradisional	2	1
Super Market	1	3
Koperasi	-	1
Bank	-	3
BUKP	1	1

**Sumber : Kecamatan Srandakan dalam Angka, Tahun 2012**

### **5.1.3. Gambaran Umum Desa Poncosari**

#### **5.1.3.1. Letak dan Luas Wilayah**

Desa Poncosari secara administratif memiliki luas 1.186,112 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 24 dusun dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Progo, Kabupaten Kulon Progo (Monografi Desa, 2013).

Seperti daerah pedesaan lainnya, Desa Poncosari juga merupakan desa agraris, sehingga penggunaan lahannya sebagian besar untuk pertanian. Berdasarkan data monografi desa luas lahan untuk pertanian adalah sebesar 61,99%/735,353 ha.

#### **5.1.3.2. Keadaan Demografi**

##### **5.1.3.2.1. Penduduk**

Aspek Demografi merupakan suatu bagian yang penting untuk menganalisis aktifitas dan tingkat kemajuan penduduk suatu wilayah. Kondisi Demografi untuk masing-masing wilayah berbeda-beda, dengan demikian untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah perlu memasukan faktor Demografi agar lebih mudah memahami kondisi suatu wilayah.

Keadaan penduduk Desa Poncosari mengalami perubahan dari tahun ketahun. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor politik dan ekonomi. Di samping kedua faktor tersebut faktor geografis juga mendukung pertumbuhan penduduk.

Pertambahan penduduk di Desa Poncosari dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang tidak begitu pesat. Tetapi tidak jarang mereka mengorbankan lahan pertanian yang produktif untuk didirikan kawasan pemukiman. Hal tersebut dapat dilihat pada jalur-jalur transportasi dan daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan, jalur perekonomian dan jalan-jalan besar akan sangat cepat merubah areal persawahan menjadi menjadi pemukiman.

Berdasarkan monografi Desa Poncosari Jumlah penduduk untuk tahun 2012 di desa ini tercatat 14.158 jiwa yang terdiri dari 6.723 jiwa penduduk laki-laki dan 7.435 jiwa penduduk wanita. Jumlah penduduk di suatu daerah akan berubah dari waktu ke waktu, demikian juga untuk jumlah penduduk di Desa Poncosari ini, senantiasa juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh adanya penduduk yang lahir, mati, datang dan pergi. Angka pertambahan penduduk adalah besarnya pertambahan penduduk suatu wilayah pertahun karena faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan penduduk yang terdapat di desa Poncosari dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.106.**  
**Perubahan Penduduk Desa Poncosari tahun 2004, 2006, 2008, 2010 dan 2012**

No	Tahun	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1.	2004	6.347	6.078	12.425
2.	2006	6.801	6.642	13.443
3.	2008	6.851	6.718	13.569
4.	2010	6.853	6.751	13.604
5.	2012	7.435	6.723	14.158

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2010 dan tahun 2012**

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2004 hingga tahun 2012 Desa Poncosari mengalami perubahan penduduk meskipun jika dilihat dari tahun ke tahun perubahannya tidak terlalu pesat. Selama kurun waktu dari tahun 2004 hingga tahun 2012 nampak bahwa pertambahan penduduk di Desa Poncosari mencapai 1.733 jiwa.

Kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai jumlah penduduk persatuan luas atau perbandingan antara jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut. Desa Poncosari mempunyai jumlah penduduk 14.158 jiwa dengan luas wilayah 1.186.122 Ha Berarti dalam setiap km persegi ditempati sekitar 838 orang.

#### **5.1.3.2.2. Mata pencaharian.**

Mata pencaharian penduduk di Desa Poncosari sangatlah bervariasi, meskipun jika dilihat Desa Poncosari merupakan sebuah desa yang agraris. variasi mata pencaharian penduduk Desa Poncosari dapat dilihat pada tabel 5.107.

**Tabel 5.107.**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Poncosari tahun 2012**

No	Jenis Pekerjaan	2012
1.	Karyawan	
	a. PNS	403
	b. ABRI	48
	c. Swasta	792
2.	Wiraswasta/Pedagang	106
3.	Tani	1.334
4.	Pertukangan	170
5.	Buruh Tani	2.254
6.	Pensiunan	710
7.	Nelayan	140
8.	Pemulung	5
8.	Jasa	85
	<b>Jumlah</b>	<b>6.047</b>

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2012**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Poncosari sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh tani. Mata pencaharian lain yang juga banyak ditekuni oleh penduduk Desa Poncosari adalah swasta dan juga pensiunan. Sedangkan untuk mata pencaharian sebagai nelayan di Desa Poncosari pada tahun 2012 berjumlah 140 orang. Jika dilihat dari perkembangan dari tahun sebelumnya, mata pencaharian sebagai nelayan mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan penduduk Desa Poncosari masih takut dengan keadaan gelombang laut yang besar, sehingga menyurutkan minat mereka dalam usaha pencarian ikan di laut. Hanya orang-orang yang mempunyai keberanian tinggi yang mampu mengalahkan rasa takut mereka dan berani terjun ke laut untuk mencari ikan. Sehingga meskipun Desa Poncosari dekat dengan Samudera Indonesia, namun tidak menumbuhkan minat yang cukup besar penduduknya untuk berprofesi sebagai nelayan.

### **5.1.3.3. Kondisi Sosial Budaya**

#### **5.1.3.3.1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu daerah di mana kemungkinan akan mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang dalam melakukan aktifitas kehidupan dalam lingkungannya. Jumlah penduduk Desa Poncosari berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diamati pada tabel 5.108. berikut.

**Tabel 5.108.**

**Jumlah penduduk Desa Poncosari Berdasarkan Pendidikan, Usia 15 Tahun Ke atas**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Jmlh Penduduk Buta huruf	195 orang
2.	Jmlh Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	1.304 orang
3.	Jmlh Penduduk tamat SD/ sederajat	2.551 orang
4.	Jmlh Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1.991 orang
5.	Jmlh Penduduk tamat SLTA/ sederajat	3.359 orang
6.	Jumlah Penduduk tamat D – 1	85 orang
7.	Jumlah Penduduk tamat D – 2	51 orang
8.	Jumlah Penduduk tamat D – 3	268 orang
9.	Jumlah Penduduk tamat S – 1	458 orang
10.	Jumlah Penduduk tamat S – 2	35 orang
11.	Jumlah Penduduk tamat S – 3	4 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>10.301 orang</b>

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2012**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun Desa Poncosari yang memiliki jumlah terbesar adalah tamatan SLTA/ sederajat, yaitu sebesar 3.359 orang. Sedangkan jumlah yang buta huruf adalah yang terendah yaitu sejumlah 195 orang, sementara tingkat pendidikan penduduk yang pernah mengenyam di bangku Perguruan Tinggi relatif banyak juga yakni sebanyak 901 orang, bahkan dari sebanyak 901 orang tersebut, ada sebanyak 35 orang yang dapat menamatkan pendidikan hingga Strata-2 dan ada sebanyak 4 orang yang telah menamatkan pendidikan hingga Strata-3.

#### **5.1.3.3.2. Sarana dan Prasarana Desa**

Pembangunan sarana dan prasarana Desa Poncosari sangat membantu pembangunan daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana dengan cara pengaspalan di desa ini dimulai pada tahun 1989, yaitu yang menghubungkan desa tersebut dengan daerah sekitarnya. Untuk saat ini alat transportasi desa ini sudah memadai, karena jalan desa telah memiliki jalur bus yang dapat menghubungkan dengan Kota Yogyakarta dan daerah-daerah di sekitarnya, sehingga sampai saat ini Desa Poncosari banyak dilewati kendaraan umum dan bus pariwisata. Dalam masalah transportasi penduduk Desa Poncosari tidak mengalami kesulitan. Tersedianya sarana umum tersebut membuka kesempatan luas bagi warga desa untuk berinteraksi secara intensif dan masif dengan masyarakat kota dan sekitarnya. Hal tersebut dapat terlihat dari gerak mobilitas penduduk menuju ke Kota Yogyakarta dan sekitarnya dengan sangat mudah untuk tujuan diantaranya bekerja, sekolah, atau pun belanja.

Selain sarana dan prasarana jalan, penerangan di Desa Poncosari saat ini telah terpenuhi dengan baik. Program Listrik Masuk Desa telah masuk di desa ini sejak tahun 1989. Penerangan tersebut tidak hanya digunakan untuk penerangan rumah penduduk, namun juga digunakan sebagai penerangan jalan-jalan yang ada di desa tersebut. Hal itu

tentunya juga dapat mendorong penduduk Desa Poncosari untuk bisa beraktifitas sampai malam hari, sehingga harapannya masyarakat Desa Poncosari akan lebih produktif dan pemenuhan kebutuhannyapun juga akan dapat terpenuhi.

Selain listrik masuk desa, komunikasi di Desa Poncosari telah dipermudah dengan adanya alat komunikasi telepon yang juga telah masuk ke desa tersebut. Hal itu sangat membantu dan mempercepat penduduk desa dalam berhubungan dengan daerah lain.

Perubahan fisik lain yang ada di Desa Poncosari adalah semakin bertambahnya bangunan-bangunan yang telah ada dari bangunan semi permanen menjadi bangunan permanen. Hanya sebagian kecil dari rumah penduduk desa ini yang masih berupa bangunan semi permanen. Bangunan permanen lainnya yaitu toko, losmen, restoran dan bangunan sekolah serta bangunan milik pemerintah dapat diketemukan di desa ini.

Dilihat dari potensi wilayah maka Kabupaten Bantul mempunyai potensi wisata yang cukup besar yang meliputi wisata alam pantai, wisata pendidikan, taman hiburan, sentra industri kerajinan dan juga potensi perikanan yang besar. Dengan keanekaragaman potensi tersebut serta ditambah dengan pengelolaan secara profesional akan mendorong tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga akan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

#### **5.1.3.3.3. Struktur Masyarakat.**

Masyarakat di Desa Poncosari ini masih kuat rasa kebersamaannya, hal ini disebabkan masyarakat pesisir pantai memang masih diikat oleh rasa kebersamaan, kegotong-royongan dan senasib sepenanggungan dalam ikatan suatu keluarga besar yang terdiri dari seluruh warga dusun dan desa yang ada. Masyarakat desa semacam ini menghadapi segala kesulitan hidupnya dalam satu kebersamaan yang saling membantu diantara sesama warga masyarakat desa. Mereka saling membantu dan bekerjasama dalam perbaikan jalan, upacara kelahiran, kematian, perkawinan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Struktur sosial yang ada di Desa Poncosari ini terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang berupa himpunan atau kesatuan-kesatuan masyarakat yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka, saling tolong menolong, pengaruh mempengaruhi, nasib yang sama, kepentingan atau tujuan yang sama.

Masyarakat Desa Poncosari pada kenyataannya bukanlah masyarakat yang tersusun dari orang-orang yang serba sama tetapi masih membedakan anggota masyarakatnya menjadi berbagai lapangan sosial. Dalam masyarakat desa ini karena sebagian penduduknya adalah sebagai nelayan, untuk itu kegiatan nelayan juga ikut menentukan status sosial mereka dalam masyarakat. Susunan masyarakat di desa ini khususnya Dusun Ngentak dan Kuwaru baik secara horizontal maupun vertikal sangat dipengaruhi oleh kegiatan pariwisata yang ada serta organisasi penangkapan ikan untuk mendukung pada

tingkat pendapatan yang mereka capai. Makin strategis posisinya dalam organisasi kerja di kegiatan kepariwisataan dan nelayan dan makin besar pula pendapatan mereka, makin besar pula kemungkinan mereka menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi sosial. Sebaliknya, makin kecil pendapatan mereka dan makin tidak strategis peran mereka dalam kegiatan pariwisata dan organisasi penangkapan ikan makin rendah pula posisi mereka dalam masyarakat.

Secara horizontal kelompok sosial terkecil masyarakat desa adalah terwujud dalam bentuk kesatuan keluarga. Kelompok sosial terkecil ini didasari pada hubungan darah atau ikatan perkawinan. Pada tingkat yang lebih luas adalah kelompok-kelompok sosial yang masing-masing anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan kepemilikan atas sarana produksi.

#### **5.1.3.3.4. Kehidupan Religius**

Penduduk desa pesisir Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru sebagian besar beragama Islam. Meskipun sebagian besar penduduk desa memeluk agama Islam, namun masyarakat desa ini memiliki rasa toleransi yang cukup baik dengan agama-agama yang lainnya.

Kehidupan beragama masyarakat desa yang saling hormat menghormati antara pemeluk agama nampak pada saat mereka bergotong royong dalam pendirian tempat ibadah dan sarana-sarana umum yang lain. Hal itu dapat dilihat saat pendirian masjid atau mushola disekitar pesisir atau pendirian kantor TPI dan kantor koperasi nelayan yang semua sarana tersebut dilakukan dengan bergotong-royong. Selain itu juga jika ada masyarakat desa yang mempunyai hajat seperti pesta pernikahan, khitanan, upacara kelahiran, kematian dan yang lainnya mereka akan saling membantu dan bekerja sama dengan suka rela. Jumlah penduduk Desa Poncosari berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.109.**  
**Jumlah Penduduk Desa Poncosari Berdasarkan Agama yang Dianut.**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	13.540
2.	Kristen	207
3.	Katholik	305
4.	Hindu	20
5.	Lainnya	86
	<b>Jumlah</b>	<b>14.158</b>

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2012**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Poncosari adalah beragama Islam. Sedangkan yang memeluk agama Hindu, Budha dan penganut aliran kepercayaan lebih kecil jika dibandingkan dengan penduduk yang memeluk agama Islam, Katholik maupun Kristen.

**Tabel 5.110.**  
**Jumlah Sarana Peribadatan Desa Poncosari Tahun 2012**

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	28
2.	Mushola	19
3.	Gereja	2
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2012**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masjid dan mushola menempati posisi tertinggi karena mayoritas penduduk Desa Poncosari beragama Islam. Untuk sarana peribadatan Gereja ada 2 buah yang meliputi 1 buah untuk Gereja Kristen dan 1 buah untuk Gereja Katholik. Untuk penganut agama Hindu dan Budha, mereka beribadah dengan bergabung di desa tetangga, karena pengikutnya yang sangat sedikit.

## **5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.2.1. Karakteristik Responden**

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang diteliti dalam kajian ini adalah pemberdayaan masyarakat yang ada di Dusun Ngentak dan Dusun Kuwaru, terutama pemberdayaan untuk perempuannya. Kedua dusun tersebut merupakan daerah yang dikembangkan sebagai daerah wisata pantai. Untuk Dusun Ngentak ada Pantai Baru Pandansimo dan Dusun Kuwaru ada Pantai Kuwaru. Oleh karena kajian ini terkait dengan pemberdayaan perempuan di pesisir, untuk itu responden yang dipilih dalam kajian atau penelitian ini adalah para perempuan yang berdomisili di sekitar Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru.

Berdasarkan kelompok umur responden, dari hasil penelitian baik untuk responden yang berada di Pantai Pandansimo maupun Kuwaru menunjukkan sebagian besar responden berada pada kelompok umur < 35 tahun, selebihnya pada kelompok 35-55 tahun dan > 55 tahun.

**Tabel 5.111.**  
**Kelompok Umur Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Kelompok Umur	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
< 35 tahun	46	57,50	12	40,00
35 – 55 tahun	29	36,25	10	33,33
> 55 tahun	5	06,25	8	26,67
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Berdasarkan jenis pekerjaan pokok responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden bermata pencaharian sebagai pedagang, baik responden yang berada di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru. Dusun Ngentak dan Dusun Kuwaru meskipun merupakan daerah pertanian, namun responden yang bermata pencaharian pokok sebagai

petani tidaklah begitu banyak. Hal ini disebabkan dengan dikembangkannya daerah pantai sebagai daerah wisata dan adanya program pemberdayaan masyarakat pesisir nampaknya lebih memilih untuk menekuni kegiatan di sektor perdagangan khususnya berdagang di daerah wisata pantai baik di Pandansimo maupun Kuwaru.

**Tabel 5.112.**  
**Jenis Pekerjaan Pokok Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Jenis Pekerjaan Pokok	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Petani	14	17,50	8	26,67
Pedagang	34	42,50	10	33,33
Buruh	13	16,25	4	13,33
Wiraswasta	12	15,00	6	20,22
Pegawai Swasta	4	05,00	2	06,67
Pegawai Negeri Sipil	2	02,50	0	00,00
Lainnya (Ibu Rumah Tangga)	1	01,25	0	00,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Pekerjaan sampingan perempuan di Pantai Pandansimo dan Kuwaru untuk jenis pedagang adalah menduduki urutan teratas dari sisi jumlah maupun persentasenya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan diminati dan dipilih oleh sebagian besar perempuan di sekitar Pantai Pandansimo dan Kuwaru, baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan mereka. Pekerjaan sebagai pedagang yang dimaksud adalah berdagang di warung-warung maupun tempat-tempat di sekitar Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru, baik sebagai pedagang kuliner, pedagang ikan segar, souvenir, maupun pedagang warung kelontong lainnya.

Perempuan sekitar Pantai Pandansimo dan Kuwaru memilih bekerja sebagai pedagang di sekitar Pantai dikarenakan mereka merasa pendapatan dari hasil berdagang di sekitar pantai, terutama pada hari-hari libur sangatlah besar dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka, apalagi sekarang Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru telah banyak dikenal masyarakat sebagai tujuan wisata pantai yang ada di Kecamatan Srandakan, sehingga dengan berjualan di warung ataupun tempat-tempat sekitar pantai akan memberi pendapatan yang lebih baik dan menjanjikan daripada pekerjaan lainnya. Oleh karena itu perempuan yang telah mempunyai pekerjaan pokok di luar sebagai pedagangpun, mempunyai minat untuk bekerja sebagai pedagang sebagai pekerjaan sampingan mereka terutama pada hari-hari libur yang tentunya banyak diketemukan pengunjung wisata pantai yang datang.

Pekerjaan pedagang dipilih oleh sebagian besar responden baik sebagai pekerjaan pokok maupun responden ditegaskan pula oleh Ibu Djumali sebagai istri wakil ketua pokgiat yang ada di salah satu pantai lokasi penelitian (wawancara, 23 November 2013). Berikut hasil wawancara yang berhasil diperoleh :

“..... sejak pantai ini ramai dan dikunjungi banyak orang, penduduk sekitar berlomba-lomba untuk menjadi pedagang, baik sebagai pekerjaan pokok maupun samping. Penduduk sekitar banyak yang tertarik berjualan di sekitar wisata pantai ini karena kalau pas waktu libur, pendapatan kami lumayan bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Berkembangnya wisata pantai memang memberi berkah bagi masyarakat sekitar, terutama kami sebagai istri sangat merasakan dampaknya. Dulu sebelum saya berjualan di sekitar wisata pantai ini, pendapatan keluarga tidak mencukupi, namun sekarang ya.... lumayanlah untuk tambah-tambah pendapatan keluarga. Pekerjaan sebagai pedagang di sekitar pantai ini, selain ditekuni ibu-ibu sebagai pekerjaan pokok, ada juga ditekuni oleh ibu-ibu yang sudah punya pekerjaan tetap atau pokok lainnya, seperti perempuan yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri jika hari libur mereka juga ikut berdagang di sekitar pantai ini. Ini disebabkan karena pendapatan dari dagang di sekitar pantai ini lumayanlah.....”

Berikut ini disajikan tabel pekerjaan sampingan responden, nampak pada tabel di bawah ini bahwa pekerjaan sampingan sebagai pedagang baik di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru dipilih oleh sebagian besar responden (perempuan). Kondisi ini mempertegas bahwa pekerjaan sebagai pedagang, khususnya sebagai pedagang di kawasan wisata pantai baik di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru banyak diminati oleh para perempuan disekitar wisata pantai. Secara lengkap terkait dengan jenis pekerjaan sampingan responden dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.113.**  
**Jenis Pekerjaan Sampingan Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Jenis Pekerjaan Pokok	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Petani	12	15,00	6	20,00
Pedagang	46	57,50	20	66,67
Buruh	11	13,75	3	13,33
Wiraswasta	9	11,25	1	10,00
Pegawai Swasta	0	00,00	0	00,00
Pegawai Negeri Sipil	0	00,00	0	00,00
Lainnya (Ibu Rumah Tangga)	2	00,25	0	00,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan perempuan di sekitar Pantai Pandansimo dan Kuwaru sebagai pedagang di daerah sekitar pantai adalah antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 800.000,-. Hal ini ditunjukkan dari kisaran pendapatan yang diterima perempuan dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan mereka, yang sebagian besar berada pada kisaran angka tersebut. Sementara jumlah pendapatan antara Rp. 1.301.000,- sampai dengan Rp. 1.800.000,- bahkan penghasilan lebih dari Rp. 1.800.000,- hanya diterima oleh sebagian kecil saja dari perempuan yang bekerja di sekitar Pantai Pandansimo dan Kuwaru.

**Tabel 5.114.**  
**Pendapatan Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Pendapatan	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
< Rp. 300.000,-	4	05,00	8	26,67
Rp. 300.000,- - Rp. 800.000,-	39	48,75	12	40,00
Rp. 801.000,- - Rp. 1.300.000,-	20	25,00	7	23,33
Rp. 1.301.000,- - Rp. 1.800.000,-	13	16,25	2	06,67
> Rp. 1.800.000,-	4	05,00	1	03,33
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Tingkat pendidikan responden di sekitar Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru posisinya hampirlah sama yaitu berada pada tingkat pendidikan SMP maupun SMA. Pernyataan tersebut didukung dari hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa baik untuk responden di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah Tamat SMP, kemudian untuk urutan kedua adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA. Sementara responden yang memiliki tingkat pendidikan sampai tamat Perguruan Tinggi hanya ada 2 orang saja dan mereka berada di lokasi Pantai Pandansimo, sedangkan untuk Pantai Kuwaru tidak dijumpai satu orang respondenpun yang berpendidikan hingga tamat Perguruan Tinggi.

Berdasarkan tingkat pendidikan responden ini, dapat dikemukakan bahwa tingkat pendidikan perempuan yang beraktivitas di sekitar wisata pantai rata-rata memiliki tingkat pendidikan menengah baik menengah pertama maupun atas. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kedua lokasi penelitian ini seperti halnya perempuan-perempuan desa lainnya, tidaklah menjadi fokus yang sangat penting dan utama sehingga banyak responden (perempuan) yang tidak menonjolkan untuk dapat mengenyam sampai pendidikan yang setinggi-tingginya termasuk untuk meneruskan hingga ke Perguruan Tinggi. Ada beberapa alasan mengapa perempuan desa tidak begitu mementingkan pendidikan hingga bangku Perguruan Tinggi yaitu diantaranya karena faktor ekonomi dan juga adanya anggapan yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya perempuan juga akan menjadi tanggung jawab suami mereka.

**Tabel 5.115.**  
**Tingkat Pendidikan Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Tingkat Pendidikan	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tamat SD	9	11,25	7	23,33
Tamat SMP	36	45,00	12	40,00
Tamat SMA	33	41,25	11	36,67
Tamat PT	2	02,50	0	00,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

## 5.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Responden

Responden dalam penelitian ini yang merupakan para perempuan yang termasuk dalam masyarakat pesisir, secara sosial ekonomi tentunya akan memiliki kesamaan dengan pola-pola yang terdapat pada masyarakat pesisir pada umumnya. Masyarakat pesisir biasanya terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial-ekonominya tergantung pada sumber daya kelautan, yang merupakan segmen anak bangsa dan pada umumnya masih tergolong miskin.

Keteringgalan masyarakat pesisir biasanya disebabkan oleh karena keterbatasannya dalam mengakses sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat pesisir semakin tertinggal (Mubyarto, 1984).

Komunitas masyarakat pesisir, pada umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang berada pada *level* paling bawah dan acapkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibat ketidakberdayaan dan kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan, bahwa para nelayan (tradisional) bukan saja sehari-hari harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim pakeklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan (Satria, 2002; Yustika, 2003)

Dengan latar belakang kemiskinan masyarakat pesisir yang selalu mendera, maka diperlukan suatu program atau kegiatan yang sifatnya inovasi agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian untuk status social ekonomi dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 5.116.**  
**Kepemilikan Rumah Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Kepemilikan Rumah	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Rumah Milik Sendiri	71	88,75	26	86,67
Menyewa	2	02,50	0	00,00
Menumpang	7	08,75	4	13,33
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berada di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru sebagian besar menempati rumah sendiri, sedangkan yang menyewa dan menumpang hanya sebagian kecil saja. Hal ini disebabkan ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh warga dusun baik di Ngentak (untuk Pantai Pandansimo) dan Kuwaru (untuk Pantai Kuwaru), adapun kesepakatan tersebut adalah penduduk masyarakat sekitarnya memprioritaskan penduduk setempat yaitu penduduk yang berdomisili di kedua

dusun tersebut dan memiliki KTP dusun setempat. Berdasarkan kesepakatan tersebut layak kalau sebagian besar responden adalah warga masyarakat yang berdomisili di kedua dusun tersebut.

Kesepakatan tentang prioritas warga setempat dalam aktivitas di sekitar Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru tersebut ditegaskan oleh salah seorang kelompok penggiat kegiatan di sekitar Pantai Baru Pandansimo dan Kepala Dusun di Dusun Kuwaru. Adapun hasil wawancara kedua informan tersebut adalah sebagai berikut :

“..... selaku pengurus pokgiat di Pantai Baru Pandansimo ini tentunya kami mengutamakan masyarakat sekitar yang bisa masuk dalam kegiatan di sekitar Pantai Baru Pandansimo ini, karena yang selalu menjaga kebersihan di sekitar lokasi Pantai Baru Pandansimo ini adalah warga kami, seminggu sekali kami bersama warga dusun melakukan kerjabakti untuk membersihkan lokasi sekitar pantai, sementara orang lain dari luar dusun kurang memperhatikan kebersihan dan mereka juga tidak pernah terlibat kerjabakti ini, jadi wajar kalau kami mendahulukan warga dusun sekitar untuk berjualan dan beraktivitas di sekitar Pantai Baru Pandansimo ini. Namun tidak menutup kemungkinan orang lain di luar dusun bisa berjualan akan tetapi lokasinya adalah di tempat tertentu yang telah disediakan oleh pengurus akan tetapi mereka tidak boleh memiliki kapling warung-warung seperti penduduk setempat.....”

“..... untuk kegiatan di warung-warung yang ada di sekitar Pantai Kuwaru, saya dan warga dusun akan mendahulukan warga Dusun Kuwaru untuk berjualan di sekitar pantai ini, hal ini menurut saya wajar saja karena lokasi pantai ada di dusun kami, sehingga yang seharusnya menikmati hasil adalah warga dusun kami. Lucu rasanya kalau lokasi pantai di sekitar wilayah kami sementara yang menikmati hasilnya adalah orang lain di luar dusun kami ini.....”

**Tabel 5.117.**  
**Lantai Rumah Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Lantai Rumah	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Keramik	20	25,00	5	16,67
Tegel	38	47,50	13	43,33
Semen	15	18,75	8	26,67
Tanah	7	08,75	4	13,33
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Kondisi lantai rumah responden yang berada di lokasi Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru sebagian besar hampir sama yaitu tegel. Sementara jenis lantai rumah responden yang paling sedikit dari total responden di masing-masing lokasi adalah tanah. Namun ada perbedaan pada jenis lantai keramik dan semen yang dimiliki oleh responden, yaitu untuk responden yang ada di Pantai Baru Pandansimo yang memiliki jenis lantai rumah keramik lebih banyak daripada lantai semen, hal ini kebalikan dengan responden yang ada di Pantai Kuwaru, yakni responden di Pantai Kuwaru ini yang memiliki jenis lantai rumah semen lebih banyak daripada yang memiliki rumah dengan lantai keramik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari jenis lantai rumah responden, maka rata-rata responden telah berada pada kondisi sosial ekonomi yang relatif cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jenis lantai rumah responden. Jenis lantai rumah akan memberi indikasi pada kesejahteraan masyarakat yang memilikinya, sehingga dengan mengetahui jenis lantai rumah inipun dapat diketahui bahwa rata-rata kesejahteraan di kedua lokasi ini sudah cukup baik.

**Tabel 5.118.**  
**Dinding Rumah Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Dinding Rumah	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tembok	65	81,25	20	66,67
Setengah Tembok	11	13,75	7	23,33
Papan	2	02,50	2	06,67
Bambu	2	02,50	1	03,33
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Parameter kondisi sosial ekonomi responden lainnya adalah jenis dinding rumah yang dimiliki oleh responden. Dinding rumah responden sebagian besar adalah tembok, yakni di Pantai Pandansimo sebesar 81,25% dan di Pantai Kuwaru 66,67%. Namun masih terdapat responden yang memiliki dinding rumah berjenis bambu, yakni di Pantai Pandansimo 02,50% dan di Pantai Kuwaru sebesar 03,33%.

**Tabel 5.119.**  
**Atap Rumah Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Atap Rumah	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Genteng Beton	15	18,75	2	06,67
Genteng Biasa	57	71,25	22	73,33
Seng	8	10,00	6	20,00
Sirap	0	00,00	0	00,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Jenis atap rumah sebagian besar responden adalah genteng biasa, baik responden yang ada di Pantai Baru Pandansimo maupun Kuwaru, yakni 71,25% di Pantai Baru Pandansimo dan 73,33% di Pantai Kuwaru. Sedangkan jenis atas rumah seng yang paling sedikit dimiliki oleh responden yang ada di Pantai Baru Pandansimo yaitu seng (10,00%) dan jenis atap rumah yang dimiliki paling sedikit oleh responden di Pantai Kuwaru adalah genteng beton yaitu 06,67%.

Sementara itu kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari sarana air bersih yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa jumlah responden sebagian besar sudah menggunakan sarana air bersihnya dengan menggunakan air sumur,

yaitu di Pantai Baru Pandansimo 80,00% dan di Pantai Kuwaru 93,33%, sedangkan responden lainnya menggunakan sarana air bersih PAM.

**Tabel 5.120.**  
**Sarana Air Bersih Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Sarana Air Bersih	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sumur	64	80,00	28	93,33
PAM	16	20,00	2	06,67
Sungai	0	00,00	0	00,00
Tampungan Air Hujan	0	00,00	0	00,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Penerangan yang dipergunakan oleh sebagian besar responden di sekitar Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru adalah listrik, sedangkan penerangan yang dipergunakan sebagian kecil dari responden di kedua lokasi penelitian ini adalah lampu minyak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Dusun Ngentak dan Dusun Kuwaru telah memanfaatkan listrik sebagai sumber penerangan rumah mereka. Apalagi saat ini disekitar Pantai Pandansimo dan Kuwaru ada program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu pembangkit listrik dengan menggunakan kincir angin, sehingga ini akan berimbas pada ketersediaan listrik di sekitar pantai Pandansimo dan Kuwaru yang tentunya kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan lebih mudah.

**Tabel 5.121.**  
**Penerangan Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Penerangan	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Listrik	78	97,50	29	96,67
Lampu Minyak	2	02,50	1	03,33
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Masyarakat di Dusun Ngentak dan Kuwaru telah banyak yang menggunakan bahan bakar rumah tangga mereka dengan menggunakan gas elpiji. Ini dapat dibuktikan dalam penelitian ini pun sebagian besar dari responden baik yang ada di Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru telah menggunakan bahan bakar elpiji, untuk responden di Pantai Baru Pandansimo 97,50% dan untuk responden di Pantai Kuwaru sebesar 96,67%.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat di Dusun Ngentak dan Dusun Kuwaru masih ada yang menggunakan bahan bakar kayu bakar maupun minyak tanah, meskipun kalau dilihat saat ini harga minyak tanah di pasaran harganya sudah mahal, akan tetapi karena kebiasaan masyarakat setempat yang masih belum dapat meninggalkan penggunaan minyak tanah untuk bahan bakar rumah tangga mereka. Demikian juga halnya dengan kayu bakar, meskipun kayu bakar saat ini juga semakin sulit

diperoleh masyarakat, akan tetapi karena kebiasaan mereka kuga tetap menggunakan batu bakar sebagai bahan bakar rumah tangga mereka.

**Tabel 5.122.**  
**Bahan Bakar Rumah Tangga Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Bahan Bakar Rumah Tangga	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Elpiji	75	93,75	15	50,00
Minyak Tanah	4	05,00	2	06,67
Kayu Bakar	1	01,25	13	43,33
Total	80	100,00	30	100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013

Penerimaan keluarga atau rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dominan dalam kehidupan manusia sehari-hari dan dengan melihat pendapatan rumah tangga responden, maka dapat diketahui kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut. Segala kegiatan dalam keluarga lebih diutamakan pada pemenuhan dan pemuasan kebutuhan hidup keluarga, selanjutnya berusaha sedapat mungkin agar kebutuhan dapat terpenuhi secara wajar. Penerimaan keluarga dapat diartikan sebagai penghasilan dari seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam keluarga.

Menurut Sumardi (1985) dalam Khiyar (2004), istilah penghasilan keluarga adalah seluruh penerimaan seseorang atau kelompok baik berupa uang maupun barang, dari sumber sendiri maupun dari pihak lain, yang dinilai dengan uang berdasarkan atas harga yang berlaku pada jangka waktu tertentu. Sumber penerimaan keluarga atau rumah tangga dibedakan menjadi 2 yaitu dari pekerjaan pokok dan dari pekerjaan sampingan. Untuk mengetahui penerimaan responden dari kegiatan di sekitar pesisir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.123.**  
**Pendapatan Total Rumah Tangga Responden Pantai Pandansimo dan Kuwaru**

Jumlah Pendapatan Total	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
≤ Rp, 750.000,-	3	03,75	6	20,00
Rp. 751.000,- Rp, 1.500.000,-	11	13,75	7	23,34
Rp, 1.501.000,- - Rp. 2.250.000,-	14	17,50	10	33,33
Rp. 2.251.000,- - Rp. 3.000.000,-	25	31,25	3	10,00
Rp. 3.001.000,- - Rp. 3.750.000,-	12	15,00	2	06,67
Rp. 3.751.000,- - Rp. 4.500.000,-	9	11,25	1	03,33
> Rp. 4.500.000,-	6	07,50	1	03,33
Total	80	100,00	30	100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013

Jika dilihat dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat pesisir di Pantai Baru Pandansimo dan Pantaaai Kuwaru penerimaan rumah tangganya di kisaran Rp 1.501.000,- sampai dengan Rp.3.000.000 yaitu 48,75% untuk

responden di Pantai Baru Pandansimo dan 43,33% untuk responden yang beraktivitas di Pantai Kuwaru, pendapatan rumah tangga responden saat ini dirasakan mengalami kenaikan apabila dibandingkan sebelum ada program PEMP dan pengelolaan pariwisata di sekitar pantai. Sebelum masyarakat sekitar mendapat bantuan dana PEMP dan sebelum dilakukannya pengelolaan wisata pantai rata-rata pendapatan masyarakat sekitar rata-rata tidak lebih Rp 1.000.000,- dalam sebulan, namun setelah mendapat bantuan dana untuk meningkatkan usahanya dari PEMP dan ada pengelolaan wisata pantai, pendapatan masyarakat sekitar rata-rata bisa mencapai lebih dari Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- setiap bulannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bantuan dana dari PEMP telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pesisir baik di Pantai Baru Pandansimo maupun Kuwaru untuk memperkuat modalnya dalam berusaha, di samping itu juga dengan semakin berkembangnya wisata pantai di Pantai Baru Pandansimo dan Kuwaru pada akhirnya akan menambah penerimaan rumah tangga mereka yang melakukan aktivitas di sekitar pantai tersebut.

### **5.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu program pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut adalah program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Konsistensi kebijakan program PEMP merupakan salah satu unsur penting yang menunjang pelaksanaan program pemberdayaan di kawasan pesisir. Program PEMP yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan mengembangkan dinamika ekonomi kawasan pesisir dirancang untuk mencapai pendekatan kelembagaan (Miraza, 2009).

Dalam program PEMP terdapat strategi pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. *Pertama*, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya atau kelembagaan sosial. *Kedua*, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis gender. Kedua model juga bisa disinergikan dan didukung dengan program-program terkait. Pilihan terhadap salah satu model tersebut dalam pemberdayaan masyarakat pesisir akan dipengaruhi oleh tujuan pemberdayaan, unsur-unsur yang terlibat dan kondisi-kondisi lingkungan sekitar (Suharto, 2005).

Program PEMP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Usaha Simpan Pinjam (USP), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Beberapa dugaan yang menunjukkan adanya kondisi-kondisi kurang berhasilnya implementasi program PEMP melalui DEP pinjaman tunai ditunjukkan oleh sebagian fenomena adanya sebagian penerima program yang menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan rumah tangga yang sifatnya konsumtif baik digunakan untuk membeli televisi, radio maupun untuk memperbaiki rumahnya. Selain itu adanya anggapan dari masyarakat bahwa bantuan dana yang mereka dapatkan merupakan hibah, sehingga mereka tidak perlu lagi mengembalikan bantuan tersebut.

Menurut Dunn (2003), secara umum evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria: a) efektivitas, keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik; b) efisiensi, jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki, dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan; c) kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, dimana didalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan; d) pemerataan, berkenaan dengan distribusi manfaat dari suatu kebijakan; e) responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan; dan d) ketepatan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat.

Untuk melihat hasil pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian terkait dengan kegiatan PEMP, berikut akan diuraikan beberapa hal mengenai kegiatan PEMP dan juga manfaat yang dapat mereka peroleh dari kegiatan PEMP tersebut.

**Tabel 5.124.**  
**Pengetahuan Responden Mengenai Partisipasinya dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Kategori	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tahu	30	37,50	13	43,33
Tidak Tahu	50	62,50	17	56,67
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 30 orang (37,50%) responden di Pantai Pandansimo mengetahui bahwa di desa mereka dilaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Selebihnya sekitar 50 orang (62,50%) menyatakan tidak mengetahui bahwa di daerah dilaksanakan PEMP tersebut. Hal ini hampir sama komposisi pengetahuan responden yang ada di Pantai Kuwaru, dari sebanyak 30 orang, ada sebanyak 13 orang (43,33%) yang tahu adanya pelaksanaan program PEMP di

desa mereka dan ada sebanyak 17 orang (57,67%) tidak tahu adanya program PEMP di daerahnya.

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan program PEMP ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini. Karena keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan.

Sumber informasi yang diperoleh masyarakat terkait dengan PEMP yang ada di daerah mereka berasal dari berbagai sumber informasi. Adapun sumber informasi yang diperoleh masyarakat tentang PEMP yang ada di Pantai Pandansimo adalah dari Pokgiat. Hal ini ditunjukkan adanya sebagian besar responden 76,67% memperoleh informasi tentang PEMP dari Pokgiat, sedangkan untuk di Pantai Kuwaru sebagian besar adalah berasal dari Pokdarwis yaitu 61,54%. Sumber informasi lainnya seperti dari pengurus koperasi, anggota koperasi dan sumber lainnya kurang berperan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai PEMP ini.

**Tabel 5.125.**  
**Sumber Informasi Responden Mengenai**  
**Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Kategori	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Pengurus Koperasi	2	06,67	1	07,69
Anggota Koperasi	3	10,00	1	07,69
Pengurus Pokdarwis	1	03,33	8	61,54
Pengurus Pokgiat	23	76,67	1	07,69
Lainnya	1	03,33	2	15,38
Total	30	100,00	13	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah suatu program pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut. Namun pada kenyataannya masyarakat menganggap bahwa program PEMP ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang ada di desa mereka. Hal ini ditunjukkan dari pendapat responden mengenai pihak mana yang berhak mendapatkan program PEMP ini.

**Tabel 5.126.**  
**Pendapat Responden Mengenai Pihak yang Paling Berhak Mendapatkan Program**  
**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Kategori	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Anggota Koperasi	13	16,25	5	16,67
Masyarakat Pesisir	22	27,50	10	33,33
Masyarakat Umum	45	46,25	15	50,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa secara mayoritas yang berhak mendapatkan program PEMP adalah masyarakat umum. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian ini baik di Pantai Baru Pandansimo maupun di Pantai Kuwaru sebagian besar menyatakan bahwa yang paling berhak mendapatkan program PEMP adalah masyarakat umum, secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut : di Pantai Pandansimo 46,25% dan di Pantai Kuwaru 50,00%.

Untuk anggota koperasi, baik di Pantai Pandansimo maupun Pantai Kuwaru justru hanya dipilih oleh sebagian kecil saja yakni hanya sekitar 16% saja dari jumlah responden dalam penelitian ini. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini menurut pedoman umum program PEMP yang paling berhak mendapatkan sebenarnya adalah masyarakat pesisir yang menjadi anggota koperasi. Karena diharapkan kepada masyarakat pesisir ini mereka dapat memberdayakan kemampuannya dalam mengelola simpan pinjam melalui koperasi, dengan aktivitas masyarakat dalam koperasi ini diharapkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Hal ini seperti diketahui bahwa visi dan misi dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

**Tabel 5.127.**  
**Ketepatan Sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**  
**Menurut Responden**

Kategori	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tepat Sasaran	69	86,25	24	80,00
Tidak Tepat Sasaran	11	13,75	6	20,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Sasaran dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah untuk memberi ketrampilan dan kemampuan manajemen dalam mengembangkan ekonomi produktif masyarakat sarannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, nampak bahwa sasaran program PEMP di lokasi penelitian telah tepat sasaran, karena sebagian besar responden baik yang terdapat di Pantai Baru Pandansimo (86,25%) dan Pantai Kuwaru (80,00%) menyatakan bahwa program PEMP tepat sasaran, sementara yang menyatakan tidak tepat sasaran hanya dinyatakan oleh sebagian kecil dari responden yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini.

Program PEMP yang dilakukan di lokasi penelitian dalam memberikan ketrampilan kepada kelompok sarannya dirasakan tepat oleh sebagian besar responden, hal ini dikarenakan program PEMP yang dilakukan melihat dan mengelaborasi dari ketrampilan yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Berikut ini disajikan berbagai ketrampilan yang dimiliki oleh responden baik responden yang ada di Pantai Baru Pandansimo maupun Pantai Kuwaru.

**Tabel 5.128.**  
**Jenis Ketrampilan Yang Dimiliki Oleh Responden**

Jenis Ketrampilan	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Memasak	12	15,00	8	26,67
Membuat Kerajinan Tangan	10	12,50	3	10,00
Dagang	34	42,50	13	43,33
Tidak Punya	24	30,00	6	20,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Jenis ketrampilan yang dimiliki oleh sebagian besar responden adalah dagang, yaitu di Pantai Pandansimo 42,50% dan Pantai Kuwaru 43,33%. Jenis ketrampilan lainnya adalah memasak dan membuat kerajinan tangan. Untuk responden yang memiliki ketrampilan memasak di Pantai Pandansimo ada sebesar 15,00% dan Pantai Kuwaru ada sebesar 26,67%, kemudian untuk yang memiliki ketrampilan membuat kerajinan tangan di Pantai Pandansimo 12,50% dan Pantai Kuwaru 10,00%. Namun demikian dari seluruh responden, ada juga yang menyatakan tidak memiliki ketrampilan apapun, yaitu di Pantai Pandansimo 30,00% dan di Pantai Kuwaru 20,00%.

Penggalan potensi masyarakat termasuk mengetahui ketrampilan yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan program PEMP ini diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan melihat ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka pelaksana program dapat merencanakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir setempat.

Ada beberapa jenis pelatihan yang pernah diikuti oleh responden, diantaranya adalah pelatihan memasak, membuat kerajinan tangan, koperasi, pemandu wisata, manajemen usaha, membuat batik, diversifikasi usaha dan juga menjaga higienes makanan. Berikut jenis pelatihan yang pernah diikuti oleh responden.

**Tabel 5.129.**  
**Pelatihan Yang Pernah Diikuti Oleh Responden**

Pelatihan Yang Pernah Diikuti	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Memasak	80	100,00	30	100,00
Membuat Kerajinan Tangan	15	18,75	7	23,33
Koperasi	80	100,00	25	83,33
Pemandu Wisata	23	28,75	7	23,33
Manajemen Usaha	80	100,00	30	100,00
Lainnya	12	15,00	4	13,33

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Pelatihan yang telah diikuti oleh sebagian besar responden adalah pelatihan memasak, koperasi dan manajemen usaha. Pelatihan ini diikuti oleh hampir seluruh responden (lebih dari 80%) baik responden yang ada di Pantai Baru Pandansimo maupun Pantai Kuwaru. Sementara pelatihan membuat kerajinan tangan dan pemandu wisata hanya

diikuti oleh sebagian kecil saja dari responden di kedua lokasi penelitian ini. Demikian juga pelatihan lainnya seperti : pelatihan diversifikasi usaha, membuat, dan higienis masakan diikuti paling sedikit oleh responden di Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru.

**Tabel 5.130.**  
**Asal Lembaga Yang Pernah Memberikan Pelatihan**

Asal Lembaga Pemberi Pelatihan	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Dinas Pariwisata	80	100,00	30	100,00
Dinas Perindustrian dan UKM	80	100,00	30	100,00
Dinas Kesehatan	12	15,00	4	13,33
Perguruan Tinggi	80	100,00	30	100,00
Lainnya	10	12,50	10	33,33

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Lembaga yang memberikan pelatihan ataupun ketrampilan masyarakat di sekitar pesisir berasal dari berbagai macam. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya beberapa lembaga yang pernah memberikan pelatihan dan ketrampilan di desanya. Adapun menurut seluruh responden (100%) baik di Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru lembaga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Propinsi, Dinas Perindustrian dan UKM Kabupaten Bantul dan Perguruan Tinggi pernah memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada mereka. Sementara Dinas Kesehatan dan lainnya seperti : dari Sumber Daya Air PU dan LIPI hanya pernah diikuti oleh sebagian kecil dari responden (kurang dari 35%) baik di Pantai Baru Pandansimo maupun Pantai Kuwaru.

**Tabel 5.131.**  
**Manfaat Yang Dirasakan Dari Pelatihan Yang Diikuti**

Manfaat Pelatihan	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sangat Bermanfaat	45	56,25	15	50,00
Cukup Bermanfaat	22	27,50	8	26,67
Tidak Tahu	8	10,00	4	13,33
Kurang Bermanfaat	5	06,25	1	03,33
Tidak Bermanfaat	0	00,00	2	06,67
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Pelatihan yang dilaksanakan di lokasi penelitian biasanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, oleh karena itu kemanfaatan dari pelatihan yang diberikan seharusnya juga memiliki nilai kemanfaatan yang besar. Hasil penelitian mengenai manfaat pelatihan yang dapat dirasakan oleh responden adalah sebagai berikut : sebagian besar responden (lebih dari 75%) menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan oleh berbagai pihak selama ini dirasakan memiliki manfaat bagi responden. Kemanfaatan yang cukup besar ini dirasakan oleh responden yang ada di Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru. Sedangkan hanya sebagian kecil saja (kurang dari 15%) yang menyatakan bahwa

pelatihan yang diikuti selama ini kurang dan tidak bermanfaat. Hasil demikian ini jelas menunjukkan bahwa pelatihan memang diperlukan oleh masyarakat setempat dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan mereka dalam melakukan usahanya di sekitar pantai.

**Tabel 5.132.**  
**Bidang Usaha Yang Dimiliki**

Bidang Usaha Yang Dimiliki	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Warung Kuliner	53	66,25	16	53,33
Dagang Sovenir	12	15,00	5	16,67
Warung Kelontong	8	10,00	6	20,00
Jasa Penyewaan Tikar	4	05,00	2	06,67
Lainnya	3	03,75	1	03,33
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Bidang usaha yang dimiliki oleh sebagian besar responden adalah warung kuliner. Jumlah responden di Pantai Baru Pandansimo sampai saat ini yang memiliki bidang usaha kuliner ada sebanyak 53 orang (66,25%) dan di Pantai Kuwaru ada sebesar 53,33%. Sementara itu responden yang berdagang souvenir untuk Pantai Pandansimo 15,00% dan Pantai Kuwaru 16,67%, kemudian responden yang memiliki usaha warung kelontong, untuk Pantai Pandansimo ada sebanyak 8 orang (10,00%) dan Pantai Kuwaru ada 6 orang (20,00%), serta responden yang memiliki usaha jasa penyewaan tiker serta usaha lainnya (usaha di bidang kesenian) di kedua lokasi penelitian ini hanya sekitar 10,00% saja.

**Tabel 5.133.**  
**Sifat Usaha Yang Dimiliki**

Sifat Usaha Yang Dimiliki	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Usaha yang dikembangkan bersifat sederhana	80	100,00	30	100,00
Usaha mudah dikelola	55	68,75	19	63,33
Usaha tidak perlu modal besar	65	81,25	20	66,67
Usaha tidak perlu teknologi modern	75	93,75	30	100,00
Usaha mudah berkembang	80	100,00	28	93,33
Usaha menghasilkan banyak untung	60	75,00	24	80,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Sifat usaha yang dimiliki oleh masyarakat pesisir tentunya tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, modal besar, penggunaan teknologi tinggi. Usaha yang dipilih oleh masyarakat pesisir biasanya usaha yang mudah mereka kembangkan dan menghasilkan keuntungan bagi mereka.

Terkait dengan sifat usaha yang dimiliki oleh responden diketahui bahwa sebagian besar responden (lebih dari 80,00%), baik yang ada di Pantai Pandansimo maupun Pantai Kuwaru menyatakan usaha yang dikembangkan bersifat sederhana, tidak perlu modal besar, tidak perlu teknologi modern dan usaha mudah dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa responden memilih usaha yang dapat mereka kerjakan dan tidak memerlukan biaya yang besar dan yang penting dapat menghidupi keluarga mereka.

**Tabel 5.134.**  
**Partisipasi Laki-laki Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Partisipasi Laki-laki	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Laki-laki pesisir bersemangat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat	55	68,75	13	43,33
Laki-laki pesisir tergabung dalam pokmas	78	97,50	22	73,33
Aktivitas pokmas Laki-laki pesisir sangat besar kontribusinya dalam pengembangan perekonomian	67	83,75	15	50,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Kegiatan di sekitar pantai dalam rangka pengembangan wisata pantai baik di Pantai Baru Pandansimo maupun Pantai Kuwaru, tidak hanya difokuskan pada kegiatan perempuan saja akan tetapi juga kaum laki-lakinya. Untuk itu pelaksanaan program PEMP di lokasi penelitian inipun perlu melihat partisipasi peran laki-laki dalam program PEMP. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa partisipasi laki-laki dalam program PEMP cukup baik, terutama partisipasi laki-laki yang ada di lokasi Pantai Pandansimo. Adapun partisipasi laki-laki di Pantai Pandansimo dalam aktivitasnya dalam pokmas ada 97,50% dan aktivitas laki-laki dikatakan sangat besar memberikan kontribusi pada pengembangan perekonomian dalam program PEMP ini sebesar 83,75% dan dinyatakan pula sebesar 68,75% laki-laki bersemangat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan untuk partisipasi laki-laki di Pantai Kuwaru adalah sebagai berikut : sebagian besar responden 73,33% menyatakan bahwa laki-laki telah berpartisipasi dalam pokmas, kemudian aktivitas laki-laki juga sangat besar memberikan kontribusi pada pengembangan perekonomian dalam program PEMP ini 50,00% dan laki-laki bersemangat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 43,33%.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui pula bahwa partisipasi laki-laki dalam program PEMP adalah kegiatan-kegiatan yang juga merepresentasikan maskulinitas, yaitu kegiatan-kegiatan seperti : pengelolaan di bidang perikanan seperti : usaha tambak udang, koperasi nelayan, pengelolaan TPI; sedangkan di sektor pertanian dan peternakan (penghijauan, penggemukan dan pemeliharaan sapi, pembuatan kompos, dan juga bio gas);

dan juga pengelolaan kincir angin. Kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut menunjukkan bahwa program PEMP di sekitar pesisir masih terpecah berdasarkan gender. Oleh karenanya kegiatan perempuan di sekitar lokasi pantai yang menunjang pengembangan sektor wisata, yakni usaha di perdagangan di sekitar pantai tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan dan perhatian yang optimal dari laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki juga memiliki usaha atau pekerjaan lain yang harus mereka kerjakan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang pengurus Pokglat yang ada di Desa Ngentak bernama Bapak Djumali (Wawancara tanggal 26 November 2013).

“..... dalam rangka mendukung perkembangan sektor pariwisata di Pantai Baru Pandansimo ini ke depan akan dikembangkan terkait dengan pengembangan agro wisata, yaitu memadukan antara sektor pertanian dan peternakan yang terdapat di sekitar daerah ini. Sekarang ini bapak-bapak yang ada di sekitar sini sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan perikanan, pertanian dan peternakan. Dengan didirikannya pabrik indokor di daerah ini telah memotivasi bapak-bapak untuk usaha tambak udang, selain itu kegiatan-kegiatan penghijauan dan pertanian untuk agrowisata, termasuk pembuatan kompos dan bio gas, yang kesemuanya itu dilakukan untuk menunjang kegiatan sektor wisata. Selain itu juga dengan akan dikembangkannya wisata pendidikan akan menambah pekerjaan bagi laki-laki yang ada di dusun ini, karena saat ini sekitar Pantai Baru Pandansimo ini terdapat kincir-kincir angin yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik. Dengan berbagai kegiatan yang demikian ini tentunya akan menyita waktu dan tenaga, sehingga bapak-bapak yang ada di dusun ini kurang optimal membantu ibu-ibu di sektor kuliner di sekitar pantai ini.....”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan PEMP di sekitar pantai untuk menunjang wisata terutama yang dilakukan oleh perempuan, tidak dapat maksimal mendapatkan kontribusi dari laki-laki. Dengan demikian dalam program PEMP inipun kegiatan-kegiatan masih berbasis pada perbedaan gender, meskipun dalam kegiatan PEMP yang ditujukan bagi perempuan, adapula kontribusinya dari kaum laki-laki yang ada. Untuk itu ke depan perlu merumuskan suatu program PEMP yang sinergis antara kebutuhan laki-laki dan perempuan, sehingga satu dengan lainnya bisa saling memberi kontribusi dan tidak timpang.

Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program yang diinisiasi, harapannya program yang dilaksanakan dapat memberi manfaat bagi kelompok sasarannya. Hal ini seharusnya berlaku juga pada program PEMP yang dilakukan pada masyarakat pesisir. Data di bawah ini menunjukkan tentang manfaat yang dapat dirasakan oleh responden mengenai program pemberdayaan yang pernah mereka terima. Tentunya ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh masyarakat, diantaranya adalah : adanya diversifikasi usaha ekonomi, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi diri untuk mengembangkan ketrampilan mereka.

**Tabel 5.135.**  
**Manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Manfaat Program	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Dengan program pemberdayaan terjadi diversifikasi usaha ekonomi masyarakat pesisir	80	100,00	24	80,00
Dengan program pemberdayaan tingkat pendapatan masyarakat meningkat	77	96,25	15	50,00
Masyarakat pesisir memperoleh tempat untuk pengembangan diri	55	68,75	12	40,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Manfaat program PEMP yang dapat dirasakan oleh responden di Pantai Pandansimo diakui telah memberdayakan mereka khususnya terkait dengan terjadinya diversifikasi usaha ekonominya dinyatakan oleh seluruh responden (100,00%) kemudian dapat meningkatkan pendapatan mereka (96,25%) dan masyarakat memperoleh tempat untuk pengembangan diri (68,75%). Sementara itu untuk responden yang ada di Pantai Kuwaru terkait dengan manfaat program yang dapat mereka rasakan, dinyatakan sebagai berikut : sebagian besar (80,00%) mengatakan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan dapat menciptakan diversifikasi usaha ekonomi, kemudian sebesar 50,00% menyatakan pendapatan mereka meningkat dan sebesar 40,00% menyatakan mereka dapat mengembangkan dirinya.

**Tabel 5.136.**  
**Kelemahan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Kelemahan Program	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Ada banyak kelemahan dalam program pemberdayaan	13	16,25	4	13,33
Kelemahan salah satunya adalah kurang aksesibel	28	35,00	9	30,00
Ada kelemahan teknis dalam pengembangan usaha, yaitu belum adanya infrastruktur ekonomi yang memadai	69	86,25	24	80,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Setiap program yang dicanangkan pasti ada kekuatan dan kelemahannya, demikian juga untuk program PEMP yang telah dilaksanakan di Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru inipun juga ditemukan kelemahannya. Baik responden yang ada di Pantai Baru Pandansimo maupun Pantai Kuwaru menyatakan bahwa sebagian besar menyatakan kelemahan program PEMP adalah adanya kelemahan teknis dalam pengembangan usaha, yaitu belum adanya infrastruktur ekonomi yang memadai, Pantai Pandansimo (86,25%) dan Pantai Kuwaru (80,00%). Sementara yang menyatakan bahwa terdapat banyak kelemahan

dari program PEMP yang telah dilaksanakan hanya dinyatakan oleh sebagian kecil responden saja baik di Pantai Pandansimo maupun Pantai Kuwaru, yakni untuk Pantai Pandansimo 16,25% dan Pantai Kuwaru 13,33%. Responden yang menyatakan bahwa program PEMP menyatakan bahwa salah satu kelemahan adalah kurang aksesibel adalah sebagai berikut : Pantai Baru Pandansimo 35,00% dan Pantai Kuwaru 30,00%.

**Tabel 5.137.**  
**PKK Sebagai Kelembagaan Sosial Menjadi Media Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pesisir**

PKK Sebagai Kelembagaan Sosial Media Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pesisir	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sangat Setuju	45	56,25	14	46,66
Setuju	5	06,25	8	26,67
Tidak Tahu	12	15,00	5	16,67
Kurang Setuju	8	10,00	1	03,33
Tidak Setuju	10	12,50	2	06,67
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir perlu memperhatikan tiga hal yaitu *enabling*, *empowering* dan *independency*, seperti yang dikemukakan oleh Winarni (1998). Di samping itu juga pemberdayaan harus mampu melakukan identifikasi, meraih peluang, adanya skala prioritas yang tepat, kesesuaian cara dan alat mencapai sasaran serta mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan. Hal ini berarti bahwa sebuah program pemberdayaan yang disusun seharusnya mampu mengarahkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas diri dan kelompok Sulistiyani (2003).

Berdasarkan pendapat di atas maka pemberdayaan yang dilakukan perlu mengali potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan kelembagaan yang terdapat di tingkat lokal. Dari hasil penelitian tentang peran kelembagaan sosial seperti PKK masih dianggap efektif untuk melakukan program PEMP yang ditujukan bagi perempuan. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian, yakni untuk Pantai Pandansimo sebagian besar responden (lebih dari 60,00%) menyatakan setuju bahwa PKK sebagai kelembagaan sosial dapat menjadi media dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, sementara sisa lainnya menyatakan tidak tahu, kurang setuju bahkan tidak setuju. Sedang untuk responden yang ada di Pantai Kuwaru sebagian besar (lebih dari 70%) menyatakan setuju bahwa PKK sebagai kelembagaan sosial sebagai media dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan sisa lainnya menyatakan tidak tahu dan kurang setuju serta tidak setuju.

Kelembagaan yang ada di tingkat lokal memang diperlukan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi, diseminasi serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang tengah diinisiasi. Di samping PKK sebagai kelembagaan formal perlu juga

digali kelembagaan-kelembagaan lokal yang lainnya seperti arisan dan pertemuan-pertemuan masyarakat lainnya yang biasanya menggunakan sistem penanggalan jawa, seperti : pertemuan selasa paingan, rebo leginan dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan karena masyarakat desa pada umumnya masih kental dengan jiwa komunalnya, oleh karena itu kerifan lokal yang ada juga perlu digali untuk menunjang program PEMP yang dilaksanakan agar menjadi lebih efektif.

**Tabel 5.138.**

**Gotong Royong Sebagai Nilai-nilai Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pesisir**

Gotong Royong Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Yang Mampu Membantu Sebagai Nilai-nilai Pemberdayaan	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sangat Setuju	40	50,00	16	53,33
Setuju	25	31,25	8	26,67
Tidak Tahu	4	05,00	3	10,00
Kurang Setuju	7	08,75	1	03,33
Tidak Setuju	4	05,00	2	06,67
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Kearifan lokal menurut Naritoom (Wagiran, 2010) disebut dengan *local wisdom*, yang dirumuskan sebagai berikut :

*local wisdom* dengan definisi, "*Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by lokal people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation.*"

Definisi kearifan lokal tersebut, paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu: (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Konsep demikian juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya.

Sedangkan Suardiman (Wagiran, 2010) menyatakan bahwa kearifan lokal identik dengan perilaku manusia berhubungan dengan: (1) Tuhan, (2) tanda-tanda alam, (3) lingkungan hidup/pertanian, (4) membangun rumah, (5) pendidikan, (6) upacara perkawinan dan kelahiran, (7) makanan, (8) siklus kehidupan manusia dan watak, (9) kesehatan, (10) bencana alam. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dirumuskan lingkup kearifan lokal dapat pula dibagi menjadi delapan, yaitu: (1) norma-norma lokal yang dikembangkan, seperti 'laku Jawa', pantangan dan kewajiban; (2) ritual dan tradisi masyarakat serta makna dibaliknya; (3) lagu-lagu rakyat, legenda, mitos dan ceritera rakyat yang biasanya mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh komunitas lokal;

(4) informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri seseorang masyarakat, tetua adat, pemimpin spiritual; (5) manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat; (6) cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari; (7) alat-bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu; dan (8) kondisi sumberdaya alam/lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Gotong royong dengan mengacu pendapat di atas juga dapat disebut dengan kearifan lokal, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (lebih dari 80,00%) baik yang ada di Pantai Pandansimo maupun Pantai Kuwaru menyatakan setuju bahwa gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal yang mampu membantu sebagai nilai-nilai pemberdayaan perekonomian pada masyarakat pesisir, sedang sisa lainnya menyatakan tidak tahu, kurang setuju dan tidak setuju bahwa gotong royong mampu membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir.

Salah satu sasaran program PEMP adalah untuk penguatan manajemen usaha masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu berbagai macam bantuan dilakukan melalui simpan pinjam dalam koperasi. Berikut pendapat responden terkait dengan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi dalam program PEMP.

**Tabel 5.139.**  
**Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Yang Efektif Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pesisir**

Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Yang Efektif	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sangat Setuju	59	73,75	22	73,34
Setuju	13	16,25	6	20,00
Tidak Tahu	2	02,50	1	03,33
Kurang Setuju	5	06,25	1	03,33
Tidak Setuju	1	01,25	0	00,00
Total	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Data di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (lebih dari 85,00%) baik di Pantai Pandansimo maupun Pantai Kuwaru menyatakan bahwa setuju jika koperasi dikatakan sebagai lembaga ekonomi yang efektif dalam program PEMP, sedangkan sisa lainnya atau sebagian kecil saja yang menyatakan tidak tahu dan kurang setuju, apalagi yang menyatakan tidak setuju di Pantai Pandansimo dinyatakan oleh 01,25% saja dan di Pantai Kuwaru tidak ada satupun yang menyatakan tidak setuju kalau koperasi dinyatakan sebagai lembaga ekonomi yang efektif untuk program PEMP.

Pelaksanaan program akan dapat berhasil dengan optimal jika ada minat, kebutuhan, ketrampilan dan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat. Program PEMP pun juga memerlukan hal-hal tersebut. Jika kedepan sudah dikemukakan bagaimana partisipasi laki-

laki dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir, berikut ini akan disajikan partisipasi perempuan dalam program PEMP yang dilaksanakan di kedua lokasi penelitian ini.

**Tabel 5.140.**  
**Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Partisipasi Perempuan	Pantai Pandansimo		Pantai Kuwaru	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Perempuan pesisir bersemangat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat	80	100,00	30	100,00
Perempuan pesisir tergabung dalam pokmas	77	96,25	30	100,00
Aktivitas pokmas perempuan pesisir sangat besar kontribusinya dalam pengembangan perekonomian	80	100,00	30	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam program PEMP di kedua lokasi penelitian sangat baik, karena perempuan yang ada di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru menunjukkan seluruhnya menyatakan mau ikut tergabung dalam pokmas serta bersemangat mengikuti pemberdayaan dan mereka aktif dalam pokmas untuk pengembangan perekonomian di daerah mereka. Hanya saja diketahui untuk responden di Pantai Pandansimo yang menyatakan mau tergabung dalam pokmas tidak seluruhnya yaitu 96,25%.

Hasil ini menunjukkan bahwa ada kesadaran kebutuhan dari responden terkait dengan program PEMP sehingga dengan demikian partisipasi perempuan dalam program PEMP yang dilaksanakannya pun sangat baik. Partisipasi perempuan dalam program PEMP ditengarai juga karena adanya peran berbagai pihak untuk menyadarkan, memberi pemahaman dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan terkait dengan model pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Baru Pandansimo dan Pantai Kuwaru adalah sebagai berikut :

1. Terdapat partisipasi masyarakat yang cukup baik dan partisipasi masyarakat di lokasi penelitian ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja akan tetapi juga kaum laki-lakinya. Berbicara mengenai partisipasi, setiap orang pasti mengatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang baru. Barangkali pendapat ini ada benarnya. Namun demikian bisa dikatakan juga bahwa partisipasi masyarakat terutama *grass root* dalam pembangunan selama 50 tahun terakhir ini adalah sesuatu yang artifisial, sebatas slogan, direkayasa, dan dipaksakan. Dengan adanya rejim sentralistik maka partisipasi masyarakat tidak mendapat tempat sama sekali.

Inisiatif masyarakat sering dinilai kurang tepat, kalau tidak dikatakan salah sama sekali. Yang lebih tepat adalah program pemerintah pusat, program departemen maupun program pemerintah daerah yang untuk masyarakat dikemas dalam bentuk program-program pembinaan.

Hanya baru pada akhir tahun 1990-an, program pemberdayaan masyarakat sebagai ganti program pembinaan masyarakat mulai mendapat tempat karena bukti dan pengalaman empiris di banyak negara. Program pemberdayaan masyarakat seakan-akan menjadi *new mainstream* dalam pembangunan.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir di lokasi penelitian dalam rangka pelaksanaan PEMP ini dirancang agar terdapat pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, selanjutnya program juga berpangkal dan berbasis kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Harapan dari pelaksanaan program PEMP di lokasi penelitian ini berasal dari bawah yang berarti bahwa masyarakatlah yang mengusulkannya, serta program yang bersifat advokasi karena peran orang luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya adanya intervensi dari berbagai pihak masih masyarakat perlukan, yakni diantaranya dari dinas-dinas terkait dan juga pihak Perguruan Tinggi untuk menginisiasi program sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada untuk memotivasi keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program PEMP di daerahnya.

Program pemberdayaan masyarakat khususnya program PEMP untuk itu diarahkan untuk menjadi *mainstream* upaya peningkatan kesejahteraan serta dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah pesisir. Dengan pemberdayaan masyarakat maka pembangunan tidak mulai dari titik nadir, tetapi berawal dari sesuatu yang sudah ada pada masyarakat. Pemberdayaan berarti apa yang telah dimiliki oleh masyarakat adalah sumberdaya pembangunan yang perlu dikembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat sendiri.

## 2. Bersifat *top down*

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di lokasi penelitian ini masih bersifat *top down* yang melibatkan beberapa pihak, diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan maupun instansi pemerintah daerah lainnya, serta pihak dari Perguruan Tinggi. Beberapa program yang diinisiasi oleh beberapa pihak di atas dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut : (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima

pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Uraian tentang kelima program ini adalah sebagai berikut.

3. Program PEMP di lokasi penelitian dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya lokal yang terdiri dari : a. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) setempat, b. Menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan c. Memanfaatkan lembaga lokal, seperti : koperasi, arisan dan lembaga lokal yang lainnya.

Hal ini berarti model pemberdayaan masyarakat pesisir di lokasi penelitian adalah menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bepusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community based management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*). Dalam kaitan ini, Moebyarto (1999), mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumberdaya lokal yang berbasis masyarakat, yang meliputi:

a. Keputusan dan inisiatip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam mayarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis.

d. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.

e. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya setempat.

4. Jenis pemberdayaan masyarakat yang diketemukan di lokasi penelitian dalam program PEMP ini masih berbasis pada gender, yakni program PEMP untuk laki-laki berbeda dengan program PEMP yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dari program atau kegiatan yang diperuntukkan bagi laki-laki yakni seperti : program-program di sektor perikanan dengan mengelola tambak udang, kegiatan koperasi nelayan, dan juga

pengelolaan TPI. Sedangkan di sektor pertanian dan peternakan program PEMP yang dicanangkan diantaranya adalah kegiatan penghijauan dan penanaman tanaman produktif, penggemukan dan pemeliharaan sapi, pembuatan kompos, serta pembuatan bio gas. Selain program-program tersebut sasaran program PEMP bagi laki-laki di lokasi penelitian ini adalah pengelolaan dan pemanfaatan kincir angin yang diarahkan untuk wisata pendidikan.

Sementara itu program PEMP bagi perempuan di lokasi penelitian ini diantaranya adalah : kegiatan-kegiatan memasak untuk wisata kuliner, manajemen usaha kuliner, ketrampilan untuk membuat souvenir yang menunjang pariwisata, diversifikasi usaha untuk menunjang pengembangan pariwisata pantai dan juga higienis makanan yang disajikan untuk menunjang pariwisata pantai.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Program pemberdayaan masyarakat lewat program PEMP yang telah dilakukan di lokasi penelitian baik di Pantai Baru Pandansimo maupun Pantai Kuwaru dinyatakan memiliki manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini dinyatakan oleh lebih dari 60,00% yang setuju bahwa program PEMP adalah mempunyai manfaat bagi masyarakat setempat. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari program PEMP ini adalah : terjadi diversifikasi usaha ekonomi masyarakat pesisir, tingkat pendapatan masyarakat meningkat dan masyarakat memperoleh tempat pengembangan diri.
- (2) Ada kelemahan dari program PEMP yang terdapat di lokasi penelitian, kelemahan program PEMP tersebut adalah : belum adanya infrastruktur ekonomi yang memadai, untuk lokasi Pantai Pandansimo dinyatakan oleh 86,25% responden dan Pantai Kuwaru 80,00% responden. Terdapat banyak kelemahan dari program PEMP yang telah dilaksanakan hanya dinyatakan oleh sebagian kecil responden saja oleh responden, yakni untuk Pantai Pandansimo 16,25% dan Pantai Kuwaru 13,33%. Kelemahan lainnya tentang program kurang aksesibel dinyatakan oleh responden di Pantai Baru Pandansimo 35,00% dan Pantai Kuwaru 30,00%.
- (3) Program PEMP dirasakan berjalan dengan baik karena dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal, diantaranya adalah melalui lembaga lokal dan budaya yang berkembang pada masyarakat setempat. Program memanfaatkan PKK sebagai kelembagaan sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dikemukakan oleh 60,00% responden di Pantai Baru Pandansimo dan 70,00% di Pantai Kuwaru. Penelitian ini juga menemukan sebagian besar responden (lebih dari 80,00%) baik yang ada di Pantai Pandansimo maupun Pantai Kuwaru menyatakan setuju bahwa gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal yang

mampu membantu sebagai nilai-nilai pemberdayaan perekonomian pada masyarakat pesisir.

- (4) Terdapat partisipasi masyarakat yang cukup baik di lokasi penelitian, partisipasi tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja akan tetapi juga kaum laki-laki. Lebih dari 90,00% perempuan di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru menunjukkan mau ikut tergabung dalam pokmas serta bersemangat mengikuti pemberdayaan dan mereka aktif dalam pokmas untuk pengembangan perekonomian di daerah mereka. Sedangkan partisipasi laki-laki di Pantai Pandansimo dalam aktivitasnya dalam pokmas ada 97,50% dan aktivitas laki-laki sangat besar memberikan kontribusi pada pengembangan perekonomian dalam program PEMP ini sebesar 83,75% dan sebesar 68,75% laki-laki bersemangat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam program PEMP.
- (5) Pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di lokasi penelitian ini masih bersifat *top down*. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan program PEMP yang melibatkan beberapa pihak, diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan maupun instansi pemerintah daerah lainnya, serta pihak dari Perguruan Tinggi.
- (6) Program PEMP pada pelaksanaannya menggunakan sumber daya lokal yang terdiri dari : a. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) setempat, b. Menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan c. Memanfaatkan lembaga lokal, seperti : koperasi, arisan dan lembaga lokal yang lainnya.
- (7) Jenis pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian dalam program PEMP masih berbasis pada gender, yakni program PEMP untuk laki-laki berbeda dengan program PEMP yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Program PEMP untuk laki-laki yakni seperti : program-program di sektor perikanan (tambak udang, koperasi nelayan, pengelolaan TPI). Sedangkan di sektor pertanian dan peternakan (penghijauan dan penanaman tanaman produktif, penggemukan dan pemeliharaan sapi, pembuatan kompos, serta pembuatan bio gas). Program lainnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan kincir angin yang diarahkan untuk wisata pendidikan. Program PEMP bagi perempuan diantaranya adalah : memasak untuk wisata kuliner, manajemen usaha, membuat souvenir, diversifikasi usaha dan higienis makanan.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang sangat diperlukan untuk keberlanjutan program PEMP yang ditujukan bagi masyarakat pesisir, yakni :

(1) Pada dasarnya berbagai program pembangunan masyarakat pesisir harus mengikutsertakan konsep pemberdayaan berbasis komunitas lokal. Dalam hal ini, program PEMP yang dilaksanakan tidak hanya menyentuh aspek ekonomi saja akan tetapi program PEMP tidak boleh melupakan aspek pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari aspek sosial dan budaya serta memanfaatkan kearifan lokal.

(2) Pemerintah hendaknya memerhatikan setiap keluhan yang disampaikan dari masyarakat karena keluhan itu berupa masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat dijadikan intropeksi bagi pelaksana program itu sendiri untuk membuat program pemerintah itu lebih baik lagi.

(3) Perlu dilakukan sinergi antara dinas-dinas terkait dan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat pesisir, sehingga program-program yang diberikan kepada masyarakat pesisir dapat saling menunjang, berkesinambungan dan tidak *overlap*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, N., 1999. *Aspek Hayati Teknik Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir*, Bapedalda, Semarang.
- Anggoro, S., 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat*, MSDP, UNDIP, Semarang.
- Anonymous, *ADB lanjutkan Proyek pemberdayaan pesisir dan laut di NTT*, Nusa Tenggara Timur.
- Ariana, Lutfah. Dkk, 2007, Pengaruh Modal Sosial Dalam Kemandirian Sentra Industri Yang Berlokasi Di Daerah Pedesaan, dalam *Info Baru PDII Vol. 3 No. 10 Th. 2007-Oktober*
- Ary Wahyono, dkk, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999, 4<sup>ed</sup>, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Ataupah, 2004, *Peluang Pemberdayaan Keraifan Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan*, Kupang.
- BPS, 2012, *Bantul dalam Angka Tahun 2012*, BPS Kabupaten Bantul.
- Clark, J., 1996, *Coastal Ecosystems Ecological Considerations for Management of the Coastal Zone*, Department the Conservation Foundation 1717 Masschu setts Avenue, N. W. Washington, D.C.
- Dahuri, R., 1996, *Ekosistem Pesisir, Makalah/Materi Kuliah*, IPB, Bogor
- Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Perikanan dan Kelautan, 2003, *Modul Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terpadu*, Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta.
- Dunn, Willian N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Friedmann, 1992, *Empowement: the Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher.
- Ghofar, A., 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, Cipayung-Bogor.
- Hendratmoko, Christiawan dan Hidup Marsudi, 2010, Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap di Kabupaten Cilacap, Dalam *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Volume 6 Nomor 1 Edisi Mei 2010*.
- Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta-red.
- Indrawadi, 2006, *Sekilas tentang Terumbu Karang*, dalam <http://www.Universitas%20Bung%20Hatta%20Sekilas%20Tentang%20Terumbu%20OK>.
- Indrawadi, 2008, *Rumpon Menetap, Mampu Atasi Masalah Nelayan*, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Keraf, S. A., 2002, *Etika Lingkungan*, Pn. Buku Kompas, Jakarta.
- Kusnadi, 2007, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, LKiS, Yogyakarta.
- Latama, Gunarto, dkk., 2002, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*, [http://rudycr.tripod.com/sem1\\_023/group2\\_123.htm](http://rudycr.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm).

- Miraza, Razak. 2009. "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat." Medan: Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU. Skripsi yang tidak dipublikasikan
- Mubyarto SL, Dove M. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rajawali.
- Nababan, 2003, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan dan Peluang*, [http://dte.gn.org.../makalah\\_ttg\\_psd\\_a\\_berb-ma\\_di\\_pplh\\_ipb.htm](http://dte.gn.org.../makalah_ttg_psd_a_berb-ma_di_pplh_ipb.htm).
- Payne M. 1997. *Modern Social Work Theory*. Edisi Kedua. London: MacMillan Press Ltd.
- Prijono, Onny S. Dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Purwanto, 2003, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Pusat Informasi Perekonomian, Badan Informasi Publik, Departemen Komunikasi Dan Informatika: <http://www.depkominfo.go.id/>
- Rokhmin Dahuri dan Rais Ginting, 2004, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan*, LISPI, Jakarta.
- Satria A. 2000. *Dinamika Modernisasi Perikanan, Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Humaniora Utama Press, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Karakteristik Sistem Sosial Masyarakat Pesisir*, Kendari.
- Satria, Arif, dkk. 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Jakarta: Cisesindo
- Setyawati, Yuningtyas, 2006, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Pengelolaan Ekonomi Produktif di Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Laporan Penelitian* Tidak Dipublikasikan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2007, "Dampak Aktivitas Pariwisata Terhadap Aktualisasi Diri Perempuan di Pantai Pandansimo (Studi Mengenai Dampak Pariwisata Terhadap Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan di Pantai Pandansimo, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta)", *Laporan Penelitian* Tidak Dipublikasikan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soediyanto. 1997, Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sebagai Salah Satu Alternatif model Penyuluhan untuk Mendukung Pembangunan Pertanian di Awal Datangnya Millenium Baru. Presentasi Pertemuan Penyegaran Pemandu Lapangan. Malang: Univ. Brawijaya.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2003, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Gava Media, Yogyakarta.
- Supriharyono, 2002, *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*, Pn. Djembatan, Jakarta.
- Tohir M., 2002, *Penelitian Sosial Budaya dari Memahami ke Melakukan dan Memuliskan*, UNDP, Semarang.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Wilayah Pantai dan Pulau-Pulau Kecil.
- Van den Ban AW, Hawkins HS. 1999. *Agricultural Extension*. London: Elsevier.
- Wagiran, dkk. 2010. "Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Provinsi DIY dalam Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY menuju Tahun 2025 (Tahun Kedua)". *Penelitian*. Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan.
- Wahyono, A., 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Winarni, Tri, 1998, Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta.  
Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.





**LAMPIRAN**

# KUESIONER

## **Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal**

(Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan  
Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul untuk  
Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata)



Oleh :  
**Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
JUNI 2013**

## KUESIONER PENELITIAN

No. Responden : .....

### Pekerjaan perempuan

Apa pekerjaan Ibu/Sdr	Tani	Dagang	Buruh	Pegawai swasta	Pegawai negeri/ABRI
-----------------------	------	--------	-------	----------------	---------------------

### Pendapatan perempuan

Berapa besar pendapatan Ibu/Sdr	Kurang dari Rp 300.000	Rp300.000-800.000	Rp 801.000-1.300.000	Rp 1.301.000-1.800.000	Lebih dari 1.801.000
---------------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	------------------------	----------------------

### Sumber ekonomi keluarga

Apa yang menjadi sumber ekonomi pokok keluarga	Tani	Dagang	Buruh	Peg. Swasta	Peg. Negeri/ABRI
--	------	--------	-------	-------------	------------------

### Ketrampilan yang dimiliki

Ketrampilan utama yang dimiliki	
---------------------------------	--

### Pelatihan ketrampilan yang pernah diikuti

Pelatihan ketrampilan yang pernah diikuti (bisa lebih dari satu)	
--	--

### Manfaat yang dirasakan dari pelatihan yang diikuti

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Pelatihan yang pernah diikuti mempunyai manfaat yang berharga					

### Bidang usaha yang dimiliki

Bidang usaha yang dimiliki	
----------------------------	--

### Sifat usaha

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Usaha yang saya kembangkan bersifat sederhana					
Usaha mudah dikelola					
Usaha tidak perlu modal besar					
Usaha tidak perlu teknologi modern					
Usaha mudah berkembang					
Usaha menghasilkan banyak untung					

Pelatihan Usaha dan Manajemen usaha

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Pelatihan usaha dan manajemen penting dilakukan					
Semakin sering ikut pelatihan semakin terampil					
Pelatihan sangat menarik					

Manfaat Pelatihan Usaha dan manajemen usaha

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Pelatihan usaha dan manajemen sangat bermanfaat					
Pelatihan usaha dan manajemen meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha					

Pengetahuan tentang adanya program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Saya tahu banyak tentang program pemberdayaan masyarakat pesisir					
Banyak program pemberdayaan masyarakat pesisir yang sudah dilakukan					
Program pemberdayaan masyarakat pesisir telah memberikan peningkatan kemampuan masyarakat pesisir					

Jenis program yang dilakukan di wilayah tempat tinggal

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Pemberdayaan masyarakat pesisir tercakup dalam program yang dikembangkan dalam PEMP					
Pemberdayaan perekonomian rakyat juga telah mengakomodasi masalah perekonomian masyarakat pesisir					

Partisipasi laki-laki pesisir dalam program pemberdayaan

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Laki-laki pesisir bersemangat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat					
Laki-laki pesisir tergabung dalam pokmas					
Aktivitas pokmas Laki-laki pesisir sangat besar kontribusinya dalam pengembangan perekonomian					

Manfaat program pemberdayaan

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Dengan program pemberdayaan terjadi diversifikasi usaha ekonomi masyarakat pesisir					
Dengan program pemberdayaan tingkat pendapatan masyarakat meningkat					
Masyarakat pesisir memperoleh tempat untuk pengembangan diri					

Kelemahan program pemberdayaan

	Tidak setuju	setuju Setuju	Netral	Kurang	Sangat setuju
Ada banyak kelemahan dalam program pemberdayaan					
Kelemahan salah satunya adalah kurang aksesibel					
Ada kelemahan teknis dalam pengembangan usaha, yaitu belum adanya infrastruktur ekonomi yang memadai					

Kelembagaan sosial yang membantu

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
PKK dapat menjadi media pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir					

Kegotongroyongan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal yang mampu membantu sebagai nilai-nilai pemberdayaan					

Sistem perekonomian koperasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang efektif					

Partisipasi perempuan pesisir dalam program pemberdayaan

	Sangat setuju	Setuju	Netral	Kurang setuju	Tidak setuju
Perempuan pesisir bersemangat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat					
Perempuan pesisir tergabung dalam pokmas					
Aktivitas pokmas perempuan pesisir sangat besar kontribusinya dalam pengembangan perekonomian					

**CATATAN-CATATAN :**

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA KEPADA PARA RESPONDEN YANG TELAH SUDI MEMBERIKAN WAKTU BAGI KAMI DALAM PENELITIAN INI. SEBAGAI MANUSIA BIASA KAMI MOHON MA'AF YANG SEDALAM-DALAMNYA JIKA TERJADI KESALAHAN BAIK YANG KAMI SENGAJA MAUPUN TIDAK KAMI SENGAJA. DAN SEMOGA HUBUNGAN BAIK INI DAPAT TETAP TERBINA UNTUK MASA-MASA YANG AKAN DATANG.**

## **PANDUAN WAWANCARA :**

1. Bagaimana komitmen pemerintah terhadap perlunya pemberdayaan masyarakat pesisir ?
2. Bagaimana realisasi program pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan ?
3. Apa nilai positif dari program pemberdayaan masyarakat pesisir yang ingin diwujudkan ?
4. Bagaimana kemampuan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan Masyarakat pesisir ?
5. Bagaimana penilaian sikap dan respon laki-laki dan perempuan pesisir terhadap program pemberdayaan ?
6. Hambatan apa yang dijumpai dalam proses pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir ?
7. Kelembagaan apa yang digunakan dalam proses pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir ?
8. Berapa lama perubahan sikap usaha dapat riil dirasakan melalui program pemberdayaan ?
9. Bagaimana manfaat Pelatihan Usaha dan manajemen usaha yang telah dilakukan ?
10. Bagaimana respon laki-laki dan perempuan pesisir dalam menanggapi program pemberdayaan ?
11. Apa saja jenis program yang dilakukan di wilayah pesisir ?
12. Bagaimana kemampuan akomodasi semua program pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengakomodasi permasalahan pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir ?
13. Bidang apa saja yang dikembangkan dalam program pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir ?
14. Bagaimana peningkatan kapasitas yang dapat dicapai dengan melalui program pemberdayaan tersebut ?
15. Kelembagaan sosial laki-laki dan perempuan mana yang efektif untuk digunakan dalam pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir di bidang ekonomi ?
16. Bagaimana koperasi, gotong royong dan kolektivitas sosial mampu menjadi katalisator dalam pemberdayaan laki-laki dan perempuan pesisir ?

## **PANDUAN PENGUMPULAN DATA SEKUNDER**

1. Statistik kependudukan, rasio laki-laki dan perempuan
2. Statistik Mata pencaharian perempuan pesisir
3. Statistik Pendapatan perempuan
4. Statistik Sumber ekonomi keluarga
5. Monografi Desa
6. Monografi Kecamatan
7. Kabupaten dalam angka
8. Statistik program-program pemberdayaan yang dilakukan di kabupaten.
9. Laporan-laporan implementasi program pemberdayaan di kabupaten
10. Daftar kelompok usaha binaan kabupaten
11. Anggaran pemberdayaan
12. Daftar prioritas program pemberdayaan
13. RPJM dan RPJP Pemerintah daerah
14. Lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program pemberdayaan
15. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan program pemberdayaan